LKJ IP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pemerintah Kabupaten Asahan



(0623) 41928

www.asahankab.go.id

Jl. Jendral Sudirman No.5 Kisaran

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jend. Ahmad Yani Telepon (0623) 41606 Fax (0623) 43254
K I S A R A N

21213

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Asahan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kisaran, 06 Maret 2025

INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN

ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Asahan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Kinerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerahsecara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kisaran, Maret 2025

Bupati Asahan



Taufik Zainal Abidin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. LKjIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2024 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2024 agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan ini menginformasikan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024. Semua program yang dilaksanakan sudah mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari RPJMD 2021-2026. LKjIP ini disusun berdasarkan hasil analisis pengumpulan data untuk menginformasikan pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Asahan yang dicapai dalam 15 sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2024 adalah 15 (sebelas) indikator sasaran atau 53,75% masuk kategori sangat tinggi dan 3 (satu) indikator sasaran atau 10,71% dan 10 (sepuluh) indikator dalam proses pemeriksaan BPK RI dengan rincian sebagai berikut:

- Indikator dengan persentase capaian kinerja 100% atau lebih dan berkategori sangat tinggi berjumlah 15 (lima belas) indikator
- Indikator dengan persentase capaian sesuai target berjumlah 3 (tiga) indikator
- Indikator dengan persentase capaian belum sesuai target berjumlah 10 (sepuluh) indikator.

Adapun hasil capaianKinerja Pemerintah Kabupataen AsahanTahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Reliasasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1. Meningkatnya Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Nilai LPPD	92.26	Tinggi= 3,15		
	Nilai SAKIP	89,05	75	66,74	88,98
	Level Maturitas SPIP	100,00	Level 3=3,3	Level 3	100
	Indeks Profesionalitas ASN	90,32	70	81,85	102,31
2. Meningkatnya Pelayanan Dan Informasi Publik Berbasis IT	Cakupan Pelayanan Smart City	100	77,78	77,78	100
	Indeks SPBE	98,99	2,01	2,86	142,28

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Reliasasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
3. Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian dalam arti Luas	Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian	100	1,69	1,70	100,59
4. Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	Pertumbuhan wira usaha baru yang mendukung potensi unggulan daerah	96,78	4,52	4,71	104,20
5. Meningkatnya Kelestarian Potensi Seni Budaya Dan Nilai Nilai Kearifan Lokal Yang Sinergi Dengan Pengembangan Wisata Daerah	Potensi Daya Tarik Pariwisata Daerah Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat (Kelompok Sadar Wisata) yang direalisasikan	171,43	8	16	200
6. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Persentase Desa Mandiri dan Maju Indeks Desa Membangun (IDM)	774,78	2,82 %	27,68 %	981,56
7. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA (Juta US $)	178,84	207,07	370,99	95,12
	Realisasi Investasi PMDN (Triliyun Rupiah)	76,14	11,1	8,7	78,37
8.	Opini BPK	WTP	WTP		
9. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Mayarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	183	58	33	175,76
	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	100	1	1,52	65,79
	Angka Stunting	169,93	11,23	11	102,09
10. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Peran Generasi Muda Melek Teknologi.	APK PAUD	100,13	70.07	61,81	88,22
	APM SD	100,02	99,7	99,97	100,27
	APM SMP	100,17	82,98	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD	100,05
	Persentase SMP Yang Memilik Ruang Baca Digital	95,97	51,00	51,34	100,67

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Reliasasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
11. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Cakupan Penyelesaian Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum) Daerah	100	100	100	100
12. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur yang Baik	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	92,00	41,00	36,18	88,24
13. Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan Dan Pemanfaatan Potensi Ekonomis Lingkungan Hidup	Indeks Air	119,56	52,90	56,57	110,71
	Indeks Udara	101,44	87,53	87,21	99,63
	Indeks Kualitas Lahan	78,25	41,93	33,20	79,17
	Persentase RTH	27,22	40	12,78	31,95
14. Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat Dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan	100,5	68,10 %	67%	100,9
15. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS Kategori Miskin Yang Ditingkatkan Kompetensinya	107,5	0.40	0.45	112.5

Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu, kami sudah melakukan upaya antisipasi agar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang capaian kinerja dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Asahan untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan di masa mendatang.

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Tujuan, Sasaran , Indikator dan target Kinerja Pemkab. Asahan ……	14
Tabel	2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan	18
Tabel	2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024	25
Tabel	3.1	Pengkatagorian Capaian Kinerja ……	2
Tabel	3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan ……..	4
Tabel	3.3	Pengukuran capaian Sasaran……....	9
Tabel	3.4	Capaian Indikator Kinerja Nilai LPPD……..	12
Tabel	3.5	Skor dan Status Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah terhadap 414 Kab. Asahan.	14
Tabel	3.6	Skor dan Status Penyelenggaraan Pemda pada masing Provinsi Kab/Kota berdasarkan kode wilayah ……	14
Tabel	3.7	Matrik Tindaklanjut LHE SAKIP 2024 …….	17
Tabel	3.8	Capaian Indikator kinerja level Maturitas SPIP …….	23
Tabel	3.9	Kab/Kota di Provinsi Sumut yang memiliki Karakteristik maturitas SPIP pada Lavel 3	24
Tabel	3.10	Capaian Indikator Indeks Profesional ASN Sasaran Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	28
Tabel	3.11	Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indek Propesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan	32
Tabel	3.12	Pengukuran Capaian Sasaran 2	33
Tabel	3.13	Capaian Indikator Kinerja Cakupan pelayanan Smart City	35
Tabel	3.14	Capaian Indikator Kinerja Cakupan pelayanan Smar City terhadap 50 (Lima Puluh) Kab/Kota	37

Tabel	3.15	Skor capaian indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Smart City Tahun 2024 pada masing- Prov. Dan Kab/Kota berdasarkan pendampingan	37
Tabel	3.16	Capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE.	41
Tabel	3.17	Hasil Evaluasi SPBE Pemda di Sumut.	36
Tabel	3.18	Pengukuran Capaian Sasaran 3	45
Tabel	3.19	Peningkatan produktivitas potensi unggulan Daerah sektor Pertanian	45
Tabel	3.20	Capaian Indikator Kinerja Peningkatan produktivitas potensi unggulan Daerah sektor Pertanian	47
Tabel	3.21	Pengukuran Capaian Sasaran 4	47
Tabel	3.22	Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Wira Usaha baru yang mendukung potensi unggulan daerah	55
Tabel	3.23	Pengukuran Capaian Sasaran 5	57
Tabel	3.24	Capaian Indikator Kinerja potensi daya tarik Pariwisata Daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (Kelomok Sadar Wisata) yang direalisasikan	60
Tabel	3.25	Pengukuran Capaian Sasaran 6	62
Tabel	3.26	Capaian Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri dan Maju di dasarkan dari Indeks Desa Membangun (IDM)	64
Tabel	3.27	Pengukuran Capaian Sasaran 7	67
Tabel	3.28	Capaian Indikator Kinerja Realisasi Investasi PMA (Juta US $)	71
Tabel	3.29	Capaian Indikator Kinerja Realisasi Investasi PMDN (Triliun)	72
Tabel	3.30	Pengukuran Capaian Sasaran 8	76
Tabel	3.31	Capaian Indikator Kinerja Opini BPK	78
Tabel	3.32	Pengukuran Capaian Sasaran 9	81
Tabel	3.33	Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	83
Tabel	3.34	Capaian Sasaran Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	87
Tabel	3.35	Capaian Indikator Kinerja Angka Stunting	90
Tabel	3.36	Pengukuran Capaian Sasaran 11	93
Tabel	3.37	Capaian Sasaran Indikator Kinerja PAUD	95
Tabel	3.38	Capaian Sasaran Indikator Kinerja APM SD	98
Tabel	3.39	Capaian Sasaran Indikator Kinerja APM SMP	101
Tabel	3.40	Capaian Sasaran Indikator Kinerja Persentase SMP Yang Memiliki Ruang Baca Digital	105

Tabel	3.41	Capaian Indikator Kinerja Cakupan Penyelesaian Penanganan Gangguan Trantibum Daerah	108
Tabel	3.42	Pengukuran capaian Sasaran 11	109
Tabel	3.43	Pengukuran capaian Sasaran 12	112
Tabel	3.44	Capaian Indikator kinerja proporsi panjang dan jaringan Jalan Kab. Dalam kondisi baik	114
Tabel	3.45	Pengukuran capaian Sasaran 13	118
Tabel	3.46	Capaian Indikator Indeks air	120
Tabel	3.47	Capaian Indikator Indeks udara sejak tahun 21 s/d tahun 2024	124
Tabel	3.48	Skor dan status Indikator Indeks Udara terhadap 514 (Lima Ratus Empat empat belas) Kabupaten	126
Tabel	3.49	Skor dan status Indikator Indeks Udara pada masing -masing Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan urutan kode wilayah	126
Tabel	3.50	Capaian Indikator Indeks Kualitas Lahan sejak Tahun 2021 sd Tahun 2024	128
Tabel	3.51	Skor dan Status Indeks Kualitas Lahan terhadap 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kabupaten	130
Tabel	3.52	Skor dan Status Indeks Kualitas Lahan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urutan Kode Wilayah	130
Tabel	3.53	Capaian Indikator Persentase RTH	133
Tabel	3.54	Skor dan Status Indikator Persentase RTH terhadap 400 (Empat Ratus) Kabupaten	135
Tabel	3.55	Skor dan Status Indikator Persentase RTH pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urutan Kode Wilayah	136
Tabel	3.56	Pengukuran Capaian Sasaran 14.	137
Tabel	3.57	Capaian Indikator Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	138
Tabel	3.58	Pengukuran Capaian Sasaran 15	139
Tabel	3.59	Capaian Indikator Persentase PMKS Kategori Miskin Yang Ditingkatkan Kompetensinya	142
Tabel	3.60	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran/Indikator Kinerja	145

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024…….	7
Grafik 3.2	Capaian Indikator Kinerja Nilai LPPD ……	12
Grafik 3.3	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja ……	15
Grafik 3.4	Capaian Indikator Kinerja level Maturitas SPIP ……	22
Grafik 3.5	Capaian Tingkat Indeks Propesional ASN	27
Grafik 3.6	Capaian Pertumbuhan wirausaha baru	54
Grafik 3.7	Pengukuran capaian Sasaan 6	62
Grafik 3.8	Jumlah Investasi PMDN dan PMA diKabupaten Asahan	69
Grafik 3.9	Capaian Indikator Kinerja Realisasi PMA (Juta US $)	70
Grafik 3.10	Capaian Indikator Kinerja Realisasi PMDN Triliun Rupiah)	72
Grafik 3.11	Indikator Opini BPK	77
Grafik 3.12	Capaian Indikator angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	82
Grafik 3.13	Capaian APK PAUD	94
Grafik 3.14	Capaian APM SD	97
Grafik 3.15	Panjang Jalan berdasarkan kondisi	113
Grafik 3.16	Capaian Indikator kualitas air	119
Grafik 3.17	Capaian Indikator Indeks Udara	123
Grafik 3.18	Capaian Indikator Indeks Kualitas Lahan	127
Grafik 3.19	Capaian Indikator persentase RTH	132
Grafik 3.20	Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Asahan	141



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Gambaran Umum Kabupaten Asahan ……...	3
Gambar	1.2	Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan ……	5
Gambar	2.1	Visi Pemerintah Kabupaten Asahan ……	12
Gambar	2.2	Misi Pemerintah Kabupaten Asahan ……	13
Gambar	3.1	Rangkaian Kegiatan penyusunan LPPD	11
Gambar	3.2	Dokumentasi Maturitas SPIP dan Manajemen resiko pada Pemkab. Asahan	25
Gambar	3.3	Dokumen Indeks Profesionalisme ASN Pemkab. Asahan . ……	31
Gambar	3.4	Pemerintah Kab. Asahan terima Penghargaan Smart City tahun 224 …..	34
Gambar	3.5	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Indikator Kinerja capaian pelayanan smart City ….	36
Gambar	3.6	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Indeks SPBE …….	40
Gambar	3.7	Capaian Kinerja Peningkatan Poroduktivitas potensi ungulan daerah sektor pertanian	50
Gambar	3.8	Rangkaian kegiatan pencapaian target indikator Desa Mandiri dan Maju yang di dasarkan dari indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 ……	66
Gambar	3.9	Rangkaian kegiatan pencapaian target indikator Kinerja Realisasi Investasi PMA/PMDN tahun 2025	74
Gambar	3.10	Raih Opini WTP 6 kali berturut-turut Bupati Asahan terima Laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2022 ……...	80
Gambar	3.11	Rangkaian kegiatan pencapaian target angka kematian ibu ……	85
Gambar	3.12	Rangkaian kegiatan pencapaian target angka PAUD Tahun 2025.....	96
Gambar	3.13	Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas ……..	100
Gambar	3.14	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target APM SMP Tahun 2025 …….	103
Gambar	3.15	Dokumen kegiatan untuk mencapai target kierja proposi jalan Kab. Dalam kondisi baik ….	116

Gambar	3.16	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indikator Kualitas air tahun 2025	124
Gambar	3.17	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indikator Indeks udara Tahun 2025	125
Gambar	3.18	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indeks kualitas lahan tahun 2025	129
Gambar	3.19	Rangkaian Kegiatan Pencapaian TargetI ndikator Persentase RTH tahun 2025	135

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Asahan selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kepala Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Asahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP). Penyusunan LKJ Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini beribukota di Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.732,97 km². Ibu kota terdahulu Kabupaten Asahan ialah Tanjung Balai, yang kemudian dimekarkan menjadi kota otonom.

Asahan merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang membentuk lembaga pengawas pelayanan umum bernama Ombudsman Daerah Asahan, melalui SK Bupati Asahan Nomor: 419-Huk/Tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004. Di era kolonial, wilayah ini disebut sebagai Assaban oleh orang Eropa. Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Asahan sebanyak 777.626 jiwa.

Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia, maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan di bentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan yang di pegang oleh Jepang sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan

Fuku Bunsyu di Batu Bara masih tetap ada. Tanggal 15 Maret 1946, berlaku struktur pemerintahan Republik Indonesia di Asahan dan wilayah Asahan di pimpin oleh Abdullah Eteng sebagai kepala wilayah dan Sori Harahap sebagai wakil kepala wilayah.

Secara Geografis, Demografis dan lainnya, Gambaran Umum Kondisi Pemerintah Kabupaten Asahan tersaji dalam gambar berikut.

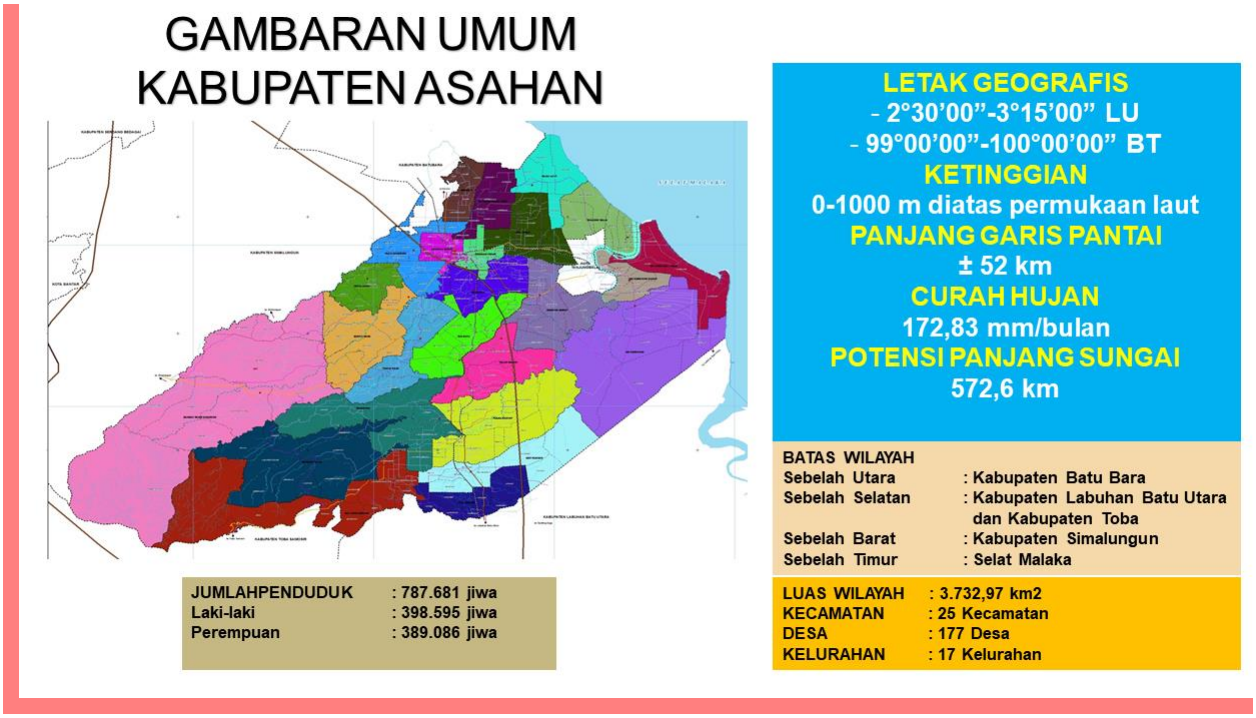

Gambar 1.1
Gambaran Umum Kabupaten Asahan

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kabupaten Asahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud ***Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter***.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

Kepala Daerah sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas Kepala Kantor dan Camat. Berikut bagan struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Asahan. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asahan tergambar dalam struktur di bawah ini.

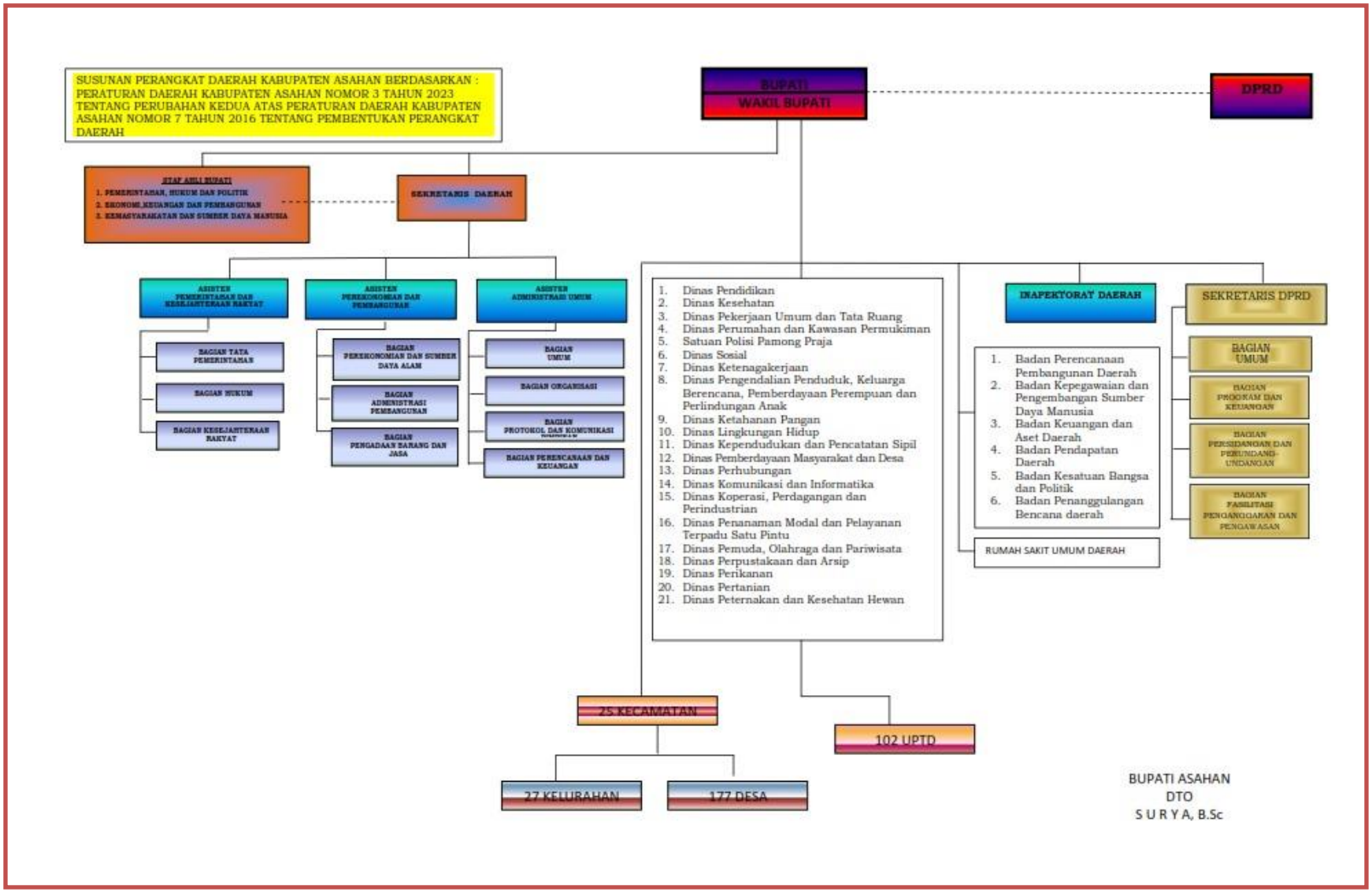

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan

D. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Asahan

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Pemerintah Kabupaten Asahan yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Asahan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Digitalisasi Birokrasi;
2. SDM Tangguh;
3. Ekonomi Mandiri
4. Asahan Sehat;
5. Asahan Cerdas;
6. Infrastruktur Kuat
7. Asahan Religius
8. Lingkungan Berbasis Partisipatif
9. Asahan Go Wisata
10. Asahan Perang COVID-19

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Asahan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Digitalisasi Birokrasi**;

   Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan mudah, cepat, efisien, murah dan transparan seperti:

- Menciptakan Kartu Tanda Penduduk Tangguh,
- Melaksanakan Pelayanan Delivery System Adminduk,
- Melaksanakan transparansi birokrasi.

2. **SDM Tangguh**;

   Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang unggul dan serta menghubungkan terhadap perusahaan atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan, seperti:
   - Merencanakan Pembangunan Balai Latihan Kerja,
   - Melaksanakan Pelatihan dan Pemberdayaan Wirausaha Muda

3. **Ekonomi Mandiri;**

   Menbentuk perekonomian rakyat dengan mendorong kehidupan masyarakat secara gotong royong berdasarkan kegiatan ekonomi yang tidak menganut prinsip ketergantungan, tetapi berdasarkan swadaya, . seperti:
   - Merencanakan Pembangunan Mall Usaha Mikro Kecil Mandiri,
   - Membentuk Kampung Mandiri,
   - Memberikan insentif wirausaha tangguh,
   - Memberikan subsidi sarana produksi pertanian untuk petani dan nelayan

4. **Asahan Sehat**;

   Merupakan menciptakan kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah, seperti:
   - Merencanakan Pembangunan Rumah Sakit Modern Berstandar Nasional,
   - Memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat miskin,
   - Meningkatkan insentif kader kesehatan.

5. **Asahan Cerdas**;

   Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memanfaatkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui budaya literasi serta Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai sumber inspirasi untuk meningkatkan kebersaman, kerukunan, tolong menolong, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, seperti:

   - Pemberiaan beasiswa pendidikan pelajar/mahasiswa miskin dan berprestasi,
   - Meningkatkan kesejahteraan Guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil,
   - Memfasilitasi Pendirian SMA/SMK negeri di setiap kecamatan.

6. **Infrastruktur Kuat**;

   Mengalokasikan 60 (enam puluh) % anggaran belanja yang selama ini terdapat pada belanja langsung APBD untuk pembangunan infrastruktur.

7. **Asahan Religius**;

   Membentuk jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar, seperti:

   - Pembentukan Rumah Mengaji Disetiap Kecamatan,
   - Melaksanakan Sertifikasi Gratis Rumah Ibadah.

8. **Lingkungan Berbasis Partisipatif**;

   Merupakan gerakan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan yang melibatkan masyarakat umum dan berlangsung terus menerus untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, seperti:

   - Melaksanakan Kisaran bebas banjir,
   - Membangun Tempat Pembuangan Akhir sampah berstandar nasional,
   - Membentuk Kader Lingkungan,
   - Mengembangkan Ekowisata Mangrove.

9. **Asahan Go Wisata**;

   Merupakan meningkatkan potensi pariwisata dari segala aspek dan menjadikan suatu kesatuan paket-paket wisata unggulan lewat pembuatan travel pattern (Patron perjalanan wisata), seperti:

   - Membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah,
   - Menciptakan Asahan One Stop Adventure Tourism,
   - Wisata Religi dan Wisata Kuliner.

10. **Asahan Perang COVID-19**;

    Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, Pemerintah Kabupaten Asahan perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar sesuai dengan arahan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis Pemkab, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Lima tahun terhitung sejak kepala daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten dan RTRW.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asahan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas/ Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. VISI

Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga Pemda. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, rangkaian kata yang digunakan dalam sebuah visi harus ringkas dan jelas, umumnya hanya satu kalimat atau tidak lebih dari satu paragraf.

Visi akan sangat berpengaruh ketika organisasi tersebut hendak melakukan perubahan. Visi membuat organisasi tersebut tetap berjalan sesuai dengan apa yang pendiri cita-citakan, sehingga visi akan mencegah sebuah organisasi untuk membentuk arah baru atau melenceng dari tujuan visi.



Gambar 2.1
Visi Pemerintah Kabupaten Asahan

2. MISI

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

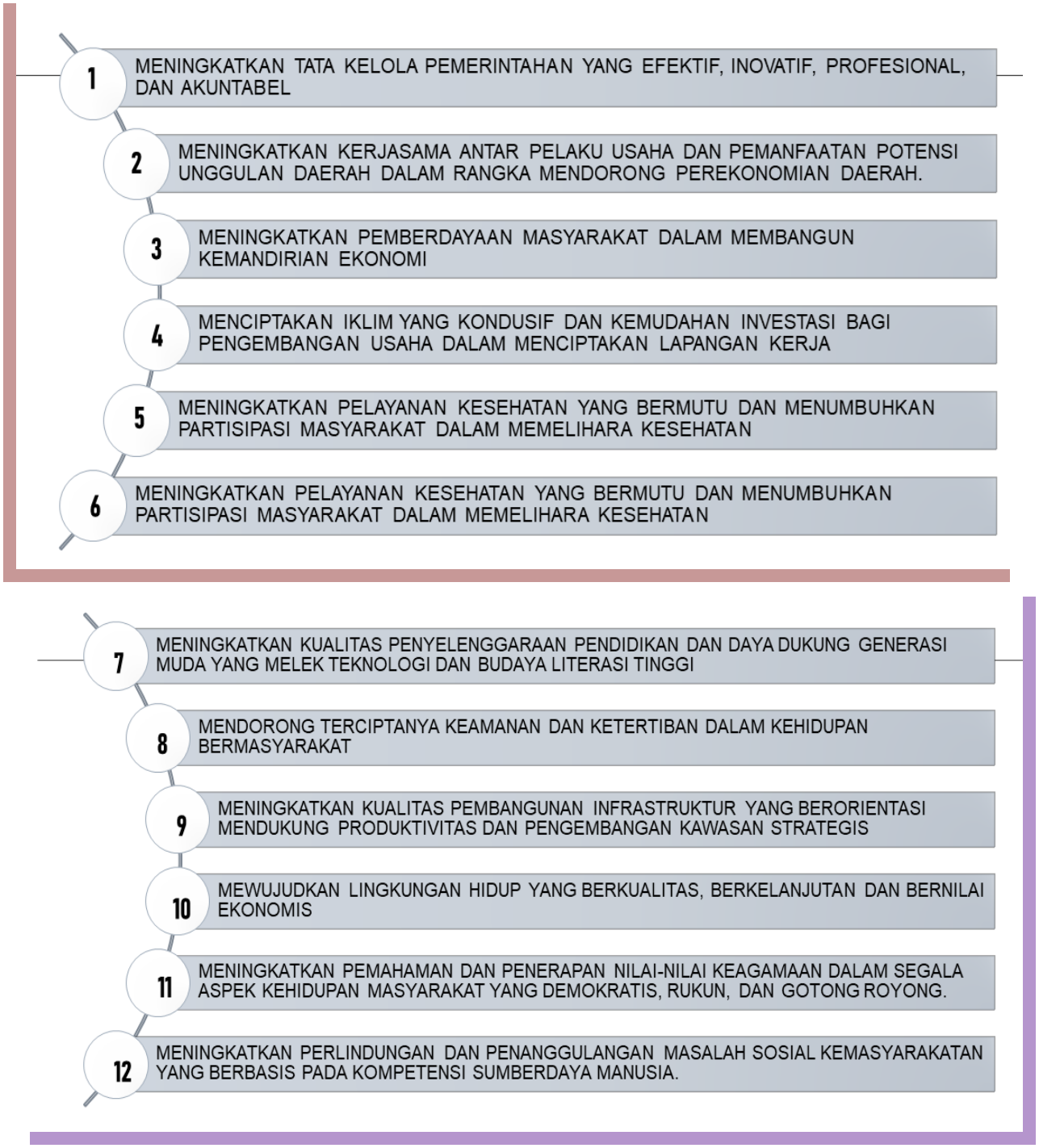

Gambar 2.2
Misi Pemerintah Kabupaten Asahan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 sebanyak 12 tujuan dan 15 sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Pemerintah Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2021	2022	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	xx	xx	xx	xx	xx
				Nilai SAKIP	B =60	BB=70	BB=75	BB=78	BB=80
				Level Maturitas SPIP	3=3,0	3,3,1	3=3,3	3=3,4	3=3,5
				Indeks Profesionalitas ASN	62	65	70	72	76
		1.2	Meningkatnya pelayanan dan informasi public berbasis IT	Cakupan pelayanan Smart City	44,4 %	55,56%	66,67%	77,78%	88,88%
				Indeks SPBE	1,95	1,97	2,01	2,03	2,05
2	Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	2.1	Meningkatnya produktifitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah sektor pertanian	1,63	1,65	1,69	1,71	1,73

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2021	2022	2024	2025	2026
		2.2	Peningkatan priduktivitas potensi unggulan daerah sector pertanian	Pertumbuhan \wira usaha baru yang mendukung potensi unggulan daerah.	3,93	4,16	4,35	4,52	4,69
		2.3	Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah.	Potensi daya tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (Kelompok sadar wisata) yang direalisasikan	3,93	4,16	4,52	4,69	4,77
3	Meningkatnya Peran masyarakat dalam pembangunan	3.	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju IDM	1,69	1,69	2,26	2,82	3,39
4	Meningkatkan daya saing Investasi daerah	4.	Meningkatnya realisasi investasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA (Juta US $)	201,4	202,6	204,7	207,7	211,9
				Realisasi Investasi PMDN (Triliyun Rupiah)	10,7	10,8	10,9	11,1	11,3
5	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	5.	Peningkatnya kualitas proses analisi, penyusunan, dan pengelolaan APBD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Meningkatkan tarif Kesehatan Masyarakat secara berkelanjutan	6.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	125	116	100	91	83
				Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	1	1	1	1	1
				Angka Stunting	28	27	24	22	20

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2021	2022	2024	2025	2026
7	Mengkatkan pendidkan yang unggul dan berkualitas serta peran generasi muda	7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Peran generasi muda melek teknologi	APK PAUD	69,90	70,00	70,07	70,12	70,15
				APM SD	99,67	99,68	99,70	99,71	99,72
				APM SMP	82,82	82,89	82,98	83,26	83,40
				Persentase SMP yang memilik ruang baca digital	36,50	41,00	51,00	55,50	60,00
8	Meningkatkan kodusivitas daerah.	8.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat	Cakupan penyelesaian penganganan gangguan trantibun daerah	100%	100%	100%	100%	100%
9	Menurunkan kesenjangan pembangun an antar wilayah	9.	Meningkatnya kualitas dan kuwantitas infrastruktur yang baik	Proporsi Panjang Jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	30%	33%	40,5%	45%	50%
10	Meningkatkan kualitas dan kelestarian Lingkungan Hidup	10.	Meningkatnya Kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	Indek air	52,60	52,70	52,90	53,00	53,10
				Indek Udara	87,23	87,33	87,53	87,63	87,73
				Indeks Kualitas Lahan	34,49	36,97	41,93	44,41	46,89
				Persentase RTH	39,74	40	40	40	40
11	Meningkatkan Kehidupan	11.	Meningkatnya nilai Kehidupan Bermasyarakat dan wawasan Kebangsaan	Cakupan Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	33%	42%	55%	60%	65%
12	Meningkatkan Derajat ekonomi Masyarakat	12.	Menurunnya penyandang maslah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%

Sumber : RPJMD Pemerintah Kabupaten Asahan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	Nilai LPPD adalah Nilai atas Laporan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah.	Hasil Penilaian Evaluasi Tim EKPPD	Bagian Pemerintahan
	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Birokrasi (PAN RB)	Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Asahan yang diberikan Menteri PAN dan RB pada tahun	Bagian Organisasi
	Level Maturitas SPIP	Level	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP/ Total OPD x 100%	Inspektorat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Merupakan ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatan.	$IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	BKPSDM
Meningkatnya Pelayanan Dan Informasi Public Berbasis IT	Cakupan pelayanan Smart City	%	Jumlah 18 layanan dimensi smart city panduan dari Kementrian Kominfo yang dilaksanakan untuk membentuk Kabupaten/kota Cerdas.	Smart City terdiri dari enam dimensi yaitu *Smart Economy*, *Smart Mobility*, *Smart People*, *Smart Living* dan *Smart Governance*. Konsep dasar *SmartCity* adalah memwujut sebuah komunikasi /lingkungan bagi masyarakat yang efisien, berkelanjutan dan memberikan rasa aman	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks SPBE	%	Indikator yang mengukur capaian penerapan SPBE dan salah satu ukuran keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan transformasi Digital pada Kementeria/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan tingkat Nasional.	Nilai Indeks SPBE Merupakan Nilai Komulatif Dari Penghitungan Perkalian Antara Nilai Indeks Domain Dan Bobot Domain	
Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, Dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian	Ton/Luas	1. Produksi / Luas Panen 2. Produksi/ Luas Tanaman Menghasilkan	LQ0(Eij)/Ej)/(Ein/En)	Dinas Pertanian
Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Wira Usaha Baru Yang Mendukung Potensi Unggulan Daerah.	Usaha	Upaya peningkatan pertumbuhan wirausaha baru yang mampu melihat dan menilai kesempatan usaha, mengumpulkan serta sumber daya yang dibutuhkan.	Wb-(Wi-Wp)/ Wp x 100%	Dinas Kopdagin

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai□nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Pokdawis	Upaya peningkatan kelestarian potensi seni budaya dan nilai kearifan lokal terhadap kelompok Sadar Wisata	Jumlah kelompok sadarwisata	Dinas Olah Raga dan Pemuda
Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase Desa Mandiri Dan Maju IDM	%	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan .	Indeks komposit yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial,Indeks ketahanan Ekomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA	Juta US $	Realisasi investasi PMA adalah jumlah realiasi investasi yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah NKRI dengan menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah Investasi Berskala Nasional, PMA	Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP
	Realisasi Investasi PMDN	Triliyun Rupiah	Realisasi investasi PMDN adalah jumlah realiasi investasi yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri yang melakukan kegiatan usaha di wilayah NKRI dengan menggunakan modal dalam negeri	Jumlah Investasi Berskala Nasional, PMDN	
Meningkatnya Kualitas Proses	Opini BPK	Opini	Pernyataan atau Pendapat propesional BPK yang merupakan	Opini Dihasilkan Dari Pemeriksaan Keuangan Yaitu Pemeriksaan Atas	BKAD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Analisis, Penyusunan, Dan Pengelolaan APBD			kesimpulan Pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informassi yang diasajikan dalam Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan mayarakat	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	%	Kematian bayi adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (tremasuk kehamilan ektopik), Persalinan, abortus mola, dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.	**AKI = (Dhamil/JLH) x 1000;Dhamil=angka kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran; JLH=Jumlah kelahiran**	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	%	Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	**AK_{Neo} =D_ (0 -1 bln)/B x 1000**	
	Angka Stunting	%	Stunting (pendek dan sangat pendek) adalah anak umur 0-sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (BP/U) atau (TB/U) memiliki Z-Score Kurang, dari-2SD.	Jumlah Anak Balita Yang Sangat Pendek (Stunting) Pada Masa Tertentu	
Meningkatnya Kualitas	APK PAUD	%	Perbandingan antara Jumlah Penduduk yang masih bersekolah di	APK =Jumlah Anak Yang Bersekolah PAUD/ Jumlah Anak Diumur 0-6 Tahun X 100%	Dinas Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi			Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi Penduduk Usia Sekolah di jenjang pendidikan.		
	APM SD	%	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang APM SD/MI/Paket A (umur 7-12) dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun	APM=Jumlah Siswa SD Usia 7-12 Thn/ Penduduk Usia Yang 7-12 Thn x 100 %	
	APM SMP	%	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang APM SMP/MTs/Paket B (umur 13-15) dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun	Jumlah Siswa SD Usia 13-15 Thn /Penduduk usia yang 13-15 thn x 100%	
	Persentase SMP yang memiliki ruang baca digital	%	Merupakan ruang baca digitalisasi dari Buku Materi Pokok (BMP) yang dikembangkan untuk membantu Siswa membaca buku melalui jaringan internet	RBD=Jumlah SMP Yang Memiliki Ruang Baca Digital / Total X 100%	
Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Umum Di Masyarakat	Cakupan Penyelesaian Penganganan Gangguan Trantibun Daerah	%	Jumlah penyelesaian Penganganan Gangguan Trantibun Daerah	Jumlah Gangguan Tarntibun Daerah Yang Ditangani /Total Gangguan Trantibun Daerah x 100%	Sat Pol PP
Menurunkan kesenjangan	Proporsi Panjang Jaringan jalan	%	Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan SK Jalan yang telah	Panjang Jalan Kondusi baik dibagi jumlah panjang seluruhnya x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
pembangunan antar wilayah	Kabupaten dalam kondisi baik		dibangun		
Meningkatkan kualitas dan kelestarian Lingkungan Hidup	Indek air	Indeks	Perbandingan Nilai Ci dibagi Nilai Lij	Indeks air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,	Dinas Lingkungan Hidup
	Indek Udara	Indeks	Perumusan Nilai IKU 100 dikurang 50 dibagi 0,9 dikali leu dikurang 0,1	IPU=IPNO2+IPSO2/2; IPU+Indeks Pencemaran Udara; IPNO2=Indeks pencemaran NO2; IPSO2=Indeks Pencemaran SO2	
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Perumusan nilai IKTL seratus dikurangi 84,3 dikurang Tutupan Hutan dikali 100 dikali 50 dibagi 54,3	ITH = LHP + LHS/LKH ITH = Indeks tutupan hutan LHP + Luas hutan primer LHS = Luas Hutan Skunder LKH = Luas kawasana Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.	
	Persentase RTH	%	Perbandingan Luas RTH dibagi luas Kabupaten dikali 100%	30% dari luas wilayah	
Meningkatkan Kehidupan Harmoni Intern dan antar masyarakat dan Umat beragama	Cakupan Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan didapatkan dari tiga indikator : 1. Kelompok Yang Dibina Tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Pendidikan Politik terhadap	Jumlah Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan /jumlah total ormas x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			masyarakat Kab. Asahan 3. Pembinaan Ormas yang terdaftar di Kab. Asahan		
Meningkatkan Derajat ekonomi Masyarakat	Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya	%	PMKS yang di tingkatkan kompentensi adalah PMKS yang mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan Skill (Keahlian).	PMKS yang ditangani/Jumlah PMKS yang ada x 100	Dinas Sosial

Sumber : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun (2023)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	Meningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi (3,10)
			Nilai SAKIP	Nilai	BB (75)
			Level Maturitas SPIP	Level	Level 3=3,3
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70
		1.2 Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Publik Berbasis IT	Cakupan Pelayanan *Smart City*	%	77,78
			Indeks SPBE	%	2,01
2	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	2.1 Meningkatnya Produktifitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sector Pertanian Dalam Arti Luas	Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian	Produk	1,69
		2.2 Peningkatan Priduktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian	Pertumbuhan Wira Usaha Baru Yang Mendukung Potensi Unggulan Daerah.	Usaha	1,69
		2.3 Meningkatnya Daya Dukung Dan Nilai Tambah Potensi Unggulan Daerah.	Potensi daya tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (Kelompok sadar wisata) yang direalisasikan	Pokdawis	8

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
3	Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Persentase Desa Mandiri Dan Maju IDM	%	2,82
4	Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA (Juta US $)	Juta US $	207,07
			Realisasi Investasi PMDN (Triliyun Rupiah)	Triliyun Rupiah	11,1
5	Meningkat Kan Kualitas Perencanaan Dan Penganggaran Daerah	Peningkatnya Kualitas Proses Analisi, Penyusunan, Dan Pengelolaan APBD	Opini BPK	Opini	WTP
6	Meningkat Kan Tarif Kesehatan Masyarakat Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	%	58
			Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	%	1
			Angka Stunting	%	11,23
7	Mengkatkan Pendidkan Yang Unggul Dan Berkualitas Serta Peran Generasi Muda	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Peran Generasi Muda Melek Teknologi	APK PAUD	%	70,07
			APM SD	%	99,70
			APM SMP	%	82,98
			Persentase SMP Yang Memilik Ruang Baca Digital	%	51,00
8	Meningkatkan Kodusivitas Daerah.	Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Umum Di Masyarakat	Cakupan Penyelesaian Penganganan Gangguan Trantibun Daerah	%	16,7
9	Menurunkan Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Dan Kuwantitas Infrastruktur Yang Baik	Proporsi Panjang Jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	41,00
10	Meningkatkan Kualitas Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan Dan Pemanfaatan Potensi Ekonomis Lingkungan Hidup	Indek Air	Indeks	52,90
			Indek Udara	Indeks	99,63
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks	79,17
			Persentase RTH	%	40%
11	Meningkatkan Kehidupan	Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat Dan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Ormas Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	66,4

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
12	Meningkatkan Derajat ekonomi Masyarakat	Menurunnya Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS Kategori Miskin Yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	41,93

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah Pemerintah Kabupaten Asahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Perhitungan Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan target yang telah ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

2. bila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2x\ \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/ Interpretasi	Rata-Rata (%) Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber Data : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (Hasil Olahan : 2024)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Pemkab yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Asahan telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asahan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Reliasasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1. Meningkatnya Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Nilai LPPD	92.26	Tinggi= 3,15		
	Nilai SAKIP	89,05	75	66,74	88,98
	Level Maturitas SPIP	100,00	Level 3=3,3	Level 3	100
	Indeks Profesionalitas ASN	90,32	70	81,85	102,31
2. Meningkatnya Pelayanan Dan Informasi Publik Berbasis IT	Cakupan Pelayanan Smart City	100	77,78	77,78	100
	Indeks SPBE	98,99	2,01	2,86	142,28
3. Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian dalam arti Luas	Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian	100	1,69	1,70	100,59
4. Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	Pertumbuhan wira usaha baru yang mendukung potensi unggulan daerah	96,78	4,52	4,71	104,20
5. Meningkatnya Kelestarian Potensi Seni Budaya Dan Nilai Nilai Kearifan Lokal Yang Sinergi Dengan Pengembangan Wisata Daerah	Potensi Daya Tarik Pariwisata Daerah Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat (Kelompok Sadar Wisata) yang direalisasikan	171,43	8	16	200
6. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Persentase Desa Mandiri dan Maju Indeks Desa Membangun (IDM)	774,78	2,82 %	27,68 %	981,56
7. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA (Juta US $)	178,84	207,07	370,99	95,12
	Realisasi Investasi PMDN (Triliyun Rupiah)	76,14	11,1	8,7	78,37

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Reliasasi 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian %
8.		Opini BPK	WTP	WTP		
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Mayarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	183	58	33	175,76
		Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	100	1	1,52	65,79
		Angka Stunting	169,93	11,23	11	102,09
10.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Peran Generasi Muda Melek Teknologi.	APK PAUD	100,13	70.07	61,81	88,22
		APM SD	100,02	99,7	99,97	100,27
		APM SMP	100,17	82,98	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD	100,05
		Persentase SMP Yang Memilik Ruang Baca Digital	95,97	51,00	51,34	100,67
11.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Cakupan Penyelesaian Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum) Daerah	100	100	100	100
12.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur yang Baik	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	92,00	41,00	36,18	88,24
13.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan Dan Pemanfaatan Potensi Ekonomis	Indeks Air	119,56	52,90	56,57	110,71
		Indeks Udara	101,44	87,53	87,21	99,63
		Indeks Kualitas Lahan	78,25	41,93	33,20	79,17

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Reliasasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
Lingkungan Hidup					
	Persentase RTH	27,22	40	12,78	31,95
14. Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat Dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan	100,5	68,10 %	67%	100,9
15. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS Kategori Miskin Yang Ditingkatkan Kompetensinya	107,5	0.40	0.45	112.5

Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 12 Misi Bapak Bupati / Wakil Bupati Asahan tahun 2024 jika disimpulkan terhadap pencapaian dari target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 15 target;
2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 target;
3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 8 target: dan
4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target.

Grafik 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024



	Presentasi	Jumlah Indikator
Melampaui Target	53,57	15
Sesuai Target	10,71	3
Belum Mencapai Target	35,72	10

Sumber Data : Hasil Olahan (2024)

Hasil dari capaian di atas turut didukung program prioritas daerah di Kabupaten Asahan. Hal ini telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi pada saat tahun anggaran berjalan. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Pemkab Asahan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan ketentuan Kementerian dalam negeri resmi menerbitkan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2024.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis dengan indikator kinerja utama.

Sasaran 1	:	Meningkatnya Akuntabilitas, dan Profesional Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah

Akuntabilitas dan Profesionalitas merupakan dua hal penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja, sedangkan profesionalitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Alat ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Produk akhir SAKIP adalah LAKIP merupakan Laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP dilakukan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) berubah menjadi LKJ (Laporan Kinerja) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014.

Alat ukur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal 4 Maret 2021 LKj kemudian diintegrasikan kedalam LPPD.

Sedangkan salah satu alat ukur terhadap Profesional Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas, dan profesional penyelenggaraan pemerintah di daerah menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk

mencapai Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel*" serta tujuan "*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Nilai LPPD	Tinggi= 3,15				3.25	
2.	Nilai SAKIP	BB (75)	B (66,74)	89,05	Sangat Baik	BB (80)	83,43%
3.	Level Maturitas SPIP	Lavel 3	Level 3	100%	Sangat Baik	Level 3	100%
4.	Indeks Profesionalitas ASN	71	81,85	109,13 %	Sangat Baik	75	109,13 %

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2024.

1. Indikator Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. EKPPD 2018 terhadap LPPD Tahun 2017 Pemkab Asahan sesuai dengan Kepmendagri nomor 118-8840 Tahun 2018 adalah sebesar 3.3019 dengan kategori Sangat Tinggi (ST) pada peringkat ke 11 (sebelas) nasional untuk kategori pemerintah daerah kota. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 terhadap LPPD 2016 dengan nilai 3.4110 pada peringkat 7 (tujuh) terdapat penurunan 0.1091 poin dan penurunan 4 (empat) peringkat. Capaian sementara EKPPD 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat nomor : LEV-657/PW10/3/2019 tanggal 7 Oktober adalah sebesar 3.4144 dengan Kategori Sangat Tinggi (ST).

Dalam rangka mencapai target Nilai LPPD yaitu Sedang (3,15) yang ditetapkan, Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan kinerja perangkat daerah
b. Melakukan Rapat Koordinasi dengan OPD dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara berkala.
c. Melakukan Asistensi terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD bagi anggota Tim Penyusun LPPD dari masing-masing OPD.
d. Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memantau kinerja perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar Perangkat daerah lebih optimal dapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci dan dokumentasi kinerja kota lainnya serta lebih optimal dalam menyajikan data pendukung kinerjanya.
e. Melakukan koordinasi dengan tim Reviu LPPD yakni Inspektorat Kabupaten Asahan terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD tersebut kepada OPD yang ditindaklanjuti.

Gambar : 3.1

Rangkaian Kegiatan Penyususnan LPPD









Adapun Capaian Kinerja Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Grafik 3.2
Capaian Indikator Kinerja Nilai LPPD

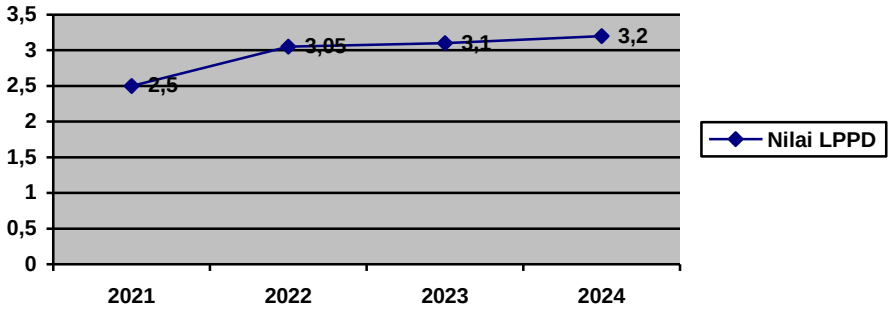

Adapun Capaian Kinerja Nilai LPPD pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.4
Capian Indikator Nilai LLPD

2021			2022			2023			2024	
Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
2,5	70,29	99,37	3,05	3.05	2.54	2,86	112,60	Tinggi= 3,15		

Sumber Data : Bagian Pemerintahan (2024)

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Nilai LPPD tahun 2024 belum mendapat nilai dari Kementerian Dalam Negeri`

Untuk Nilai LPPD TA. 2022 yang dilakukan evaluasinya pada tahun 2024, berdasarkan nilai hasil EKPPD dari Tim Evaluasi Nasional (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia) dengan capaian angka 2,8650 (kategori sedang) sedangkan untuk Nilai LPPD TA. 2024 belum dapat dilakukan evaluasi dikarenakan dalam proses tahap penyusunan terhitung sampai tanggal 31 Maret 2025.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/ dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 3.5
Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 414 (Empat Ratus Empat Belas) Kabupaten

:No	Kabupaten / Kota	Skor	Status
1.	Kabupaten Banyuwangi	3,69	Tinggi
193.	**Kabupaten Asahan**	2,86	Sedang
414.	Kabupaten Yalimo	0,06	Sangat Rendah

Sumber Data : LHE PPD Kemendagri (2023)

Dari Tabel di atas diketahui bahwa secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan berada pada posisi urutan ke 193 dengan Skor 2,86 dengan status masih Sedang.

Sementara terhadap perbandingan Capaian Pemkab/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.6
Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urutan Kode Wilayah

.No	Kabupaten / Kota	Skor	Status
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan	2,97	Sedang
2.	Kabupaten Batu Bara	2,93	Rendah
3.	**Kabupaten Asahan**	**2,86**	**Sedang**
4.	Kabupaten Karo	2,83	Sedang
5.	Kabupaten Labuhan batu Utara	2,75	Sedang
6.	Kabupaten Nias	2,74	Sedang
7.	Kabupaten Toba	2,70	Rendah
8.	Kabupaten Samosir	2,33	Rendah
9.	Kabupaten Labuhan Batu	2,30	Rendah
10.	Kabupaten Dairi	2,28	Rendah
11.	Kabupaten Simalungun	2,25	Rendah
12.	Kabupaten Labuhan batu Selatan	2,05	Rendah
13.	Kabupaten Nias Utara	1,61	Sangat

.No	Kabupaten / Kota	Skor	Status
14.	Kabupaten Nias Barat	1,45	Rendah Sangat Rendah

Sumber Data : LHE PPD Kemendagri (2023)

Dari data di atas terlihat bahwa Pemkab Asahan berada di urutan ke-3 dari 14 Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera utara dengan Skor Nilai 2,86 dengan status Sedang.

Selanjutnya untuk capaian Misi 1 dengan Indikator Nilai SAKIP dapat dilihat dari data berikut:

2. Indikator Nilai SAKIP

Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Grafikk 3.3
Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja

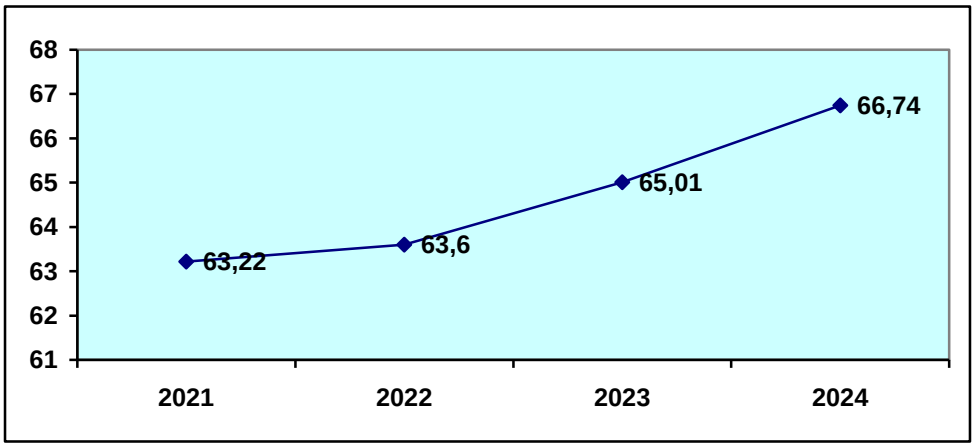

Dari Grafik tersebut di atas terlihat bahwa Hasil Evaluasi atas AKIP Kabupaten Asahan semakin meningkat sejak tahun 2021, namun belum mencapai target sesuai dengan RPJMD. Dari sisi capaian kinerja Nilai SAKIP tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,8% yaitu sebesar 90,85% (2023) menjadi 89,05 % (2024). Hal ini disebabkan karena penetapan target pada RPJMD adalah Nilai B yang mempunyai internal nilai dari 60 sampai dengan 70. Kenyataannya kenaikan Nilai SAKIP Pemkab Asahan sebesar 62,79 pada tahun 2021, 63,60 ditahun 2022, 65,01 ditahun 2023. Sekalipun Capaian Nilai SAKIP semakin menaik pada setiap tahunnya, namun berhubung karena Penetapan tidak didasarkan kepada kondisi yang terjadi sehingg target Nilai SAKIP dinaikkan menjadi 75 (Naik 2 angka dari 73 (2023).

Pemerintah Kabupaten Asahan mendapatkan nilai 66,74 atau dengan predikat penilaian “B” untuk penilaian tahun 2024. Dari hasil evaluasi, implementasi SAKIP di Kabupaten Asahan dinilai sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Dalam LHE AKIP ada 14 (empat belas) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Bobot yang besar dalam penilaian implementasi SAKIP adalah perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Pada LHE AKIP nilai perencanaan mencapai 22,68 dari bobot 30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder mengenai perkiraan pencapaian kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan. RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN. RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (annual planning) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui beberapa tahapan antara lain konsultasi publik, musrenbang tingkat kalurahan, Kecamatan, dan kabupaten sebagai bentuk perencanaan partisipatif.

Pemerintah Kabupaten Asahan telah melakukan upaya – upaya perbaikan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Tabel 3.7
MATRIK TINDAK LANJUT PERBAIKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 SESUAI HASIL EVALUASI SAKIP OLEH TIM EVALUATOR KEMENTERIAN PAN-RB TAHUN 2024

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan
1.	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi;	Melakukan penyusunan dan perbaikan IKU dan PK daerah dengan indikator yang SMART	Dokumen Perubahan IKU dan PK Daerah.	18 Maret s/d Juni 2025
		Melakukan pengawalan terhadap pencapaian kinerja.		
		Melakukan Perbaikan Dokumen Perencanaan pada setiap level daerah		

2.	Menyempurnakan pohon kinerja dengan mempertimbangkan Critical Succes Factor yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup;	Melakukan penyempurnaan pohon kinerja Kabupaten dan Perangkat daerah.	Pohon Kinerja Kabupaten dan perangkat Daerah	18 Maret s/d Juni 2025
3	Mereviu kembali format Perjanjian Kinerja tahun 2024 agar sesuai dengan yang tertuang dalam PermenPAN No.53 Tahun 2014;	Melukan perbaikan format PK tahun 2025	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30 Januari 2025
4	Memastikan keselarasan perencanaan antara IKU dan Perjanjian Kinerja;	Menyelaraskan perencanaan antara IKU dan Perjanjian Kinerja	IKU dan PK yang sudah selaras	18 Maret s/d Juni 2025
5	Mereviu kembali rencana aksi pada sebagian PD, dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut	Melakukan perbaikan rencana aksi pada sebagian perangkat daerah	Rencana Aksi	18 Maret s/d Juni 2025
6	Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai panduan dalam melakukan pengukuran kinerja;	Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai panduan dalam melakukan pengukuran kinerja	1 Surat Keputusan Bupati	Bulan Maret 2025

7	Melengkapi IKU PD dengan sumber data dan formulasi perhitungan yang relevan untuk setiap indikator kinerja	Melengkapi IKU PD dengan sumber data dan formasi perhitungan yang relevan	IKU Perangkat Daerah	18 Maret s/d Juni 2025
8	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward and punishmant, penentuan strategi, target kinerja kedepan pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Melaksanakan pemberian reward and punismant berdasarkan pengukuran hasil kinerja.	SK pengukuran kinerja	18 Maret s/d Juni 2025
9	Mendorong Pembangunan aplikasi E-SAKIP Asahan sebagai alat monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah secara berkala	Memaksimalkan aplikasi SEMAKINPAS.	Terupload dokumen perencanaan dan progres kinerja yg terintegrasi dari tingkat Pemerintah hingga Perangkat Daerah sebagai sarana pemantauan, pengendalian dan evaluasi Kepala Daerah dan kepala OPD.	Maret s/d April 2025
10	Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya	Melakukan perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya	PK Perangkat Daerah	Januari 2025

11	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi secara detail per pencapaian kinerja terkait dengan analisis keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan;	Melakukan rapat rangka meningkatkan kualitas laporan kinerja	Dokumen LKj	Januari 2025
12	Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;	Melaksanakan rapat evaluasi terkait evaluasi kualitas laporan dan pemahaman indikator	LHE AKIP Internal	Mei 2025
13	Membuat kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level PD;	Menyusun kebijakan reword and punishment atas evaluasi AKIP intern	1 Surat Keputusan Bupati	November-Desember 2024
14	Meningkatkan kapasitas evaluator internal sehingga menggambarkan kondisi sebenarnya dari implementasi SAKIP pada PD dan memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja.	Mengutus fungsional (Auditor/PPUPD) selaku evaluator iternal untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan implementasi SAKIP di Pusdiklat BPKP	2 orang fungsional (Auditor/PUPD).	Oktober 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Nilai SAKIP tersebut antara lain:

1. Masih terdapat dokumen perencanaan Perangkat Daerah rumusan tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan belum memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound)
2. Pohon kinerja masih harus disempunakan dengan mempertimbangkan Critical Succes Factor yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup;
3. Masih kurang kualitas laporan kinerja Pemkab Maupun Perangkat Daerah;

Dalam rangka mencapai target Nilai SAKIP yaitu BB (78) yang ditetapkan, telah dilaksanakan upaya-upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

- Menyusun Pohon Kinerja Pemkab dengan di damping oleh kementerian PAN dan RB.
- Mengadakan Bimbingan teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan
- Melaksanakan rapat dengan OPD dalam upaya peningkatan kualitas penyusunan LKj;
- Mendorong OPD memaksimalkan pemanfaat aplikasi E- SAKIP SEMAKINPAS.

Selanjutnya untuk capaian Misi 1 dengan Indikator Level Maturitas SPIP dapat dilihat dari data berikut:

3. Indikator Level Maturitas SPIP

Maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi yang satuan ukurnya adalah level maturitas. Dasar hukum penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP adalah Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016.

Penilaian maturitas SPIP didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Terdapat lima aspek yang harus dipenuhi dan diuji, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan indeks pengendalian korupsi (IEPK).

Grafik 3.4 : Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP

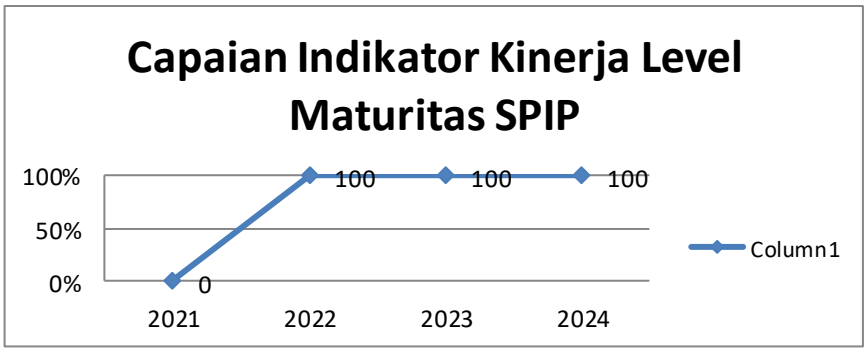

Adapun Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
Level 3	Level 2		Level 3	Level 3	100,00	Level 3	Level 3	100,00	Level 3	Level 3	100,00

Sumber Data : Inspektorat Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 tidak dilakukan penilaian (evaluasi) oleh BPKP sehingga tidak ada data ntuk indikator-indikator tersebut. Untuk tahun 2025 realisasi baru dapat diketahui hasilnya di akhir tahun 2025. Capaian kinerja Level Maturitas SPIP tahun 2024 sesuai target yaitu masih berada di posisi level 3 dan akan berusaha untuk menuju ke level 3 dari maturitas SPIP yang telah diperoleh dari tahun 2022.

Pada tahun 2024 Kabupaten Asahan berhasil mempertahankan capaian predikat maturitas SPIP pada Lavel 3 dengan skor 3,001. Hal ini dipengaruhi oleh :

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan mempertahankan /meningkatkan pencapaian Level Maturitas SPIP tersebut antara lain:

1. Adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari Kepala Daerah dan para Pimpinan OPD
2. Adanya pelaksanaan sosialisasi terhadap seluruh OPD terkait penilaian maturitas SPIP dan Manjemen resiko Indeks (MRI) setiap tahun.
3. Inspektorat melakukan pendampingan terhadap OPD secara intens dalam rangka pengisian kertas kerja dan melengkapi evidence (bukti dukung) padasaat pelaksanaan penilaian maturitas SPIP.

4. Tersedianya dukungan sumber daya yangcukup, baik SDM, anggaran, maupun peralatan pendukung pekerjaan dalam rangka kegiatan penilaian maturitas SPIP

`

Dalam rangka mencapai target Level Maturitas SPIP tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Bimtek/Pelatihan terkait maturitas SPIP.
2. Senantiasa bersikap proaktif meakukan koordinasi dengan BPKP selaku Tim evaluator penilaian Maturitas SPIP.
3. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pendampingan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Berdasarkan Surat Deputi kepala BPKP Nomor PE.0903/S-543//D3/04/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Kapasitas APIP Daerah Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Asahan diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Yang Memenuhi Karakteristik Maturitas SPIP pada Level 3

No	Kabupaten / Kota	Skor	Status
1.	Kabupaten Humbang Hasundutan	3,220	Level 3
2.	Kabupaten Pakpak Barat	3,154	Level 3
3.	Kabupaten Padang Sidimpuan	3,114	Level 3
4.	Kabupaten Tapanuli Utara	3,067	Level 3
5.	Kota Binjai	3,045	Level 3
6.	Kabupaten Samosir	3,045	Level 3
7.	Kabupaten Deli Serdang	3,012	Level 3
8.	Kabupaten Serdang Bedagai	3,005	Level 3
9.	Kota Tebing Tinggi	3,004	Level 3
10.	Kota Medan	3,003	Level 3
11.	Kabupaten Batu Bara	3,002	Level 3
12.	**Kabupaten Asahan**	**3,001**	**Level 3**
13.	Tapanuli Sealatan	3,000	Level 3
14.	Kota Pematang Siantar	2.939	Level 2

Sumber Data : Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 BPKP Perwakilan Provsu.

Terlihat Bahwa Pemkab Asahan berada pada urutan kedua belas setelah Kabupaten Batu Bara memperoleh skor sebesar 3,002. Target tahun 2024 ini Nilai

Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 yang juga merupakan pengawasan atas agenda prioritas pengawasan BPKP sebanyak 7 (tujuh) pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias, Kabupaten Gunung Sitoli, Kota Sibolga. Sampai dengan 30 Juni 2024 telah dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada 7 (tujuh) Kabupaten tersebut.

Gambar 3.2 : Dokumentasi Maturitas SPIP dan Manajemn Resiko Pada Pemerintah Kabupaten Asahan









Selanjutnya untuk capaian Misi 1 dengan Indikator Indeks Profesional ASN dapat dilihat dari data berikut:

4. Indikator Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

2 (dua) aturan yang mendasari Indeks Profesionalitas ASN, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN tersusun dari 4 (empat) dimensi, antara lain Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Adapun kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN dibagi menjadi 5 (lima) kategori, dimulai dari 91-100 (sangat tinggi), 81-90 (tinggi), 71-80 (sedang), 61-70 (rendah), kurang dari 60 (sangat rendah). Tingkat Indeks Profesionalitas ASN setiap pegawai akan berpengaruh pada peroleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Adapun Capaian Tingkat Indeks Profesionalitas ASN pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Gambar 3.5
Capaian Tingkat Ideks Profesionalitas ASN

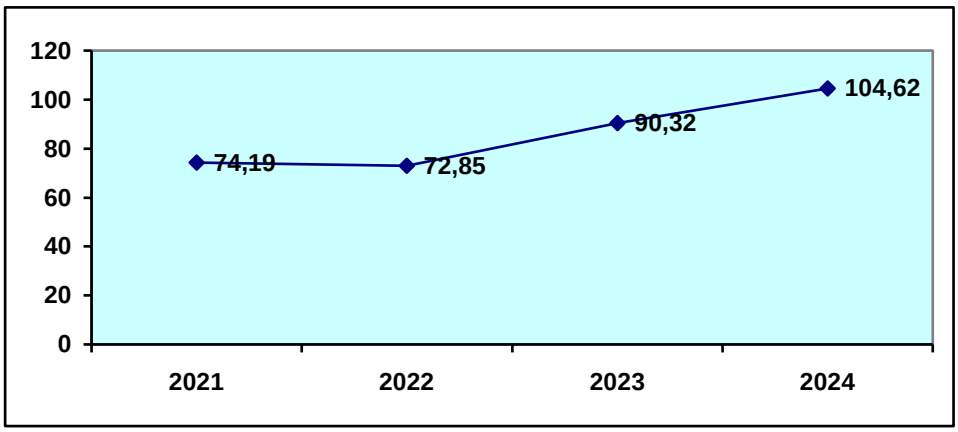

Adapun Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.10 Capaian Indikator Indeks Profesional ASN

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
62,00	46,00	74,19	65	47,35	72,85	68	61,42	90,32	71	81,85	102,31

Sumber Data : BKPSDM Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indeks Profesional berdasarkan Jumlah Total Hasil Perkalian dari Bobot Dimensi/Indikator Dikalikan Skor/Nilai masing-masing jawaban Dimensi/Indikator dengan capaian realisasi pada tahun 2024 yaitu 90,32% mengalami peningkatan jika dibandingkan IP ASN tahun 2022 yaitu 72,85%.

Indeks Profesionalitas yang masih perlu peningkatan adalah pada dimensi Kinerja dan Kompetensi ASN. Penggunaan aplikasi e-kinerja dari BKN mempermudah ASN dalam menyusun sasaran dan penilaian kinerja. Dengan kemudahan tersebut diharapkan nilai pada dimensi kinerja lebih baik lagi.

Pada dimensi kompetensi juga perlu peningkatan, kenaikan nilai masih kategori rendah sehingga nilai IP ASN juga kategori rendah karena dimensi kompetensi inilah yang memiliki standar nilai lebih tinggi dibandingkan tiga dimensi lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian* Indeks Profesional ASN *tersebut antara lain:

1. Dimensi KUALIFIKASI

Dimensi kualifikasi menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperolah suatu pengetahuan dan atau keahlian khusus, sehingga seseorang mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai profesinya.

Berdasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatan nilai IP ASN.

5. Dimensi KOMPETENSI

Dimensi kompetensi menggambarkan mampunya seseorang yang merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude) yang didukung oleh rencana pengembangan kompetensi berkesinambungan. Kesemuanya itu tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal maupun non klasikal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, yang dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :

A. Pelatihan struktural kepemimpinan;
B. Pelatihan menajerial;

C. Pelatihan teknis;
D. Pelatihan fungsional;
E. Pelatihan sosial kultural; dan lain-lain.

Sedangkan pelatihan non klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan atau pembelajaran di luar kelas mencakup di tempat kerja (experiental learning), pembelajaran melalui hubungan sosial (social learning), dan pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel (flexible learning). Pelatihan non klasikal berupa experiental learning dilakukan dengan kegiatan magang, patok banding (bencmarking), detasering dan lainnya. Contoh kegiatan social learning adalah coaching dan mentoring. Kemudian contoh kegiatan flexible learning dilakukan dengan pelatihan jarak jauh, e-learning, dan belajar mandiri.

6. Dimensi KINERJA

Dimensi kinerja merupakan penggambaran capaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan pada perencanaan kierja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan capaian, target, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, prestasi kerja diwujudkan dalam komponen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP), yang masing-masing pembobotannya adalah 60Persen (SKP) dan 40Persen (PKP). Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Kemudian Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

7. Dimensi DISIPLIN

Dimensi disiplin merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, apabila dimensi disiplin dilanggar atau tidak ditaati maka ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun hukuman disiplin tidak langsung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan.

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

membagi hukuman disiplin dalam 3 (tiga) kategori yakni hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dalam rangka mencapai target Indeks Profesional ASN Pemkab. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

- ✓ Pengembangan Kompetensi ASN dan kinerja ASN yang diupload di Aplikasi eKinerja secara konsisten,
- ✓ Menginformasikan kepada seluruh OPD agar meningkatkan pengembangan kompetensi kinerja ASN serta berperan aktif melaporkan hasilnya ke BKPSDM.

Gambar 3.3 : Dokumentasi Indeks Profesional ASN Pemkab. Asahan









Tabel 3.11
Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Di wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PNS	Nilai IP	Kategori
1.	Padadng Lawas	3.105	50,80	Sangat Rendah
2.	Gunung Sitoli	2.537	50,57	Sangat Rendah
3.	Tapanuli Selatan	4.083	50,55	Sangat Rendah
4.	Medan	11.624	50,19	Sangat Rendah
5.	Deli Serdang	10.577	50,10	Sangat Rendah
6.	Toba Samosir	3.591	49,90	Sangat Rendah
7.	Tebing Tinggi	2.462	49,35	Sangat Rendah
8.	Langkat	4.841	49,09	Sangat Rendah
9.	Pematang Siantar	3.835	47,56	Sangat Rendah
10.	Tanjung Balai	2.579	47,20	Sangat Rendah
11.	Padang Lawas Utara	3.505	46,68	Sangat Rendah
12.	Sibolga	2.272	46,48	Sangat Rendah
13.	**Asahan**	**5.741**	**46,00**	**Sangat Rendah**
14.	Tapanuli Tengah	4.494	45,45	Sangat Rendah
15.	Nias Selatan	3.620	25,19	Sangat Rendah

Sumber Data : Kantor Regional VI Medan

Dari data di atas terlihat bahwa Pemkab Asahan berada di urutan ke-13 dari 33 Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera utara dengan Skor Nilai 2,54 dengan status Rendah. Hal ini terjadi karena data SAPK yang menjadi unsur penilaian indeksnya tidak ter-update. Dalam hal ini peran admin kantor regional hanya sampai pada mendorong pengajuan admin IP-ASN dan mengarahkan admin instansi untuk melakukan updating data SAPK. Kendala lainnya adalah terkait hasil pengukuran Indeks Profesionalitas adalah masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas pada dimensi Kompetensi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu instansi tidak tertib dalam melakukan update data ke dalam aplikasi SAPK, instansi kesulitan mengumpulkan dokumen sertifikat dan beberapa seminar yang diikuti oleh pegawai di instansi bahkan tidak mengeluarkan sertifikat.

Selanjutnya untuk capaian Misi 1 dengan sasaran meningkatnya Pelayanan dan Informasi Publik Berbasis IT dengan Indikator Cakupan Pelayanan Smart City dapat dilihat dari data berikut:

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Dan Informasi Publik Berbasis IT

Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Publik berbasis IT memiliki dampak peningkatan efisiensi. Pelayanan berbasis IT memungkunkan proses yang lebih cepat dan efisiensi, meningkatkan Transparansi informasi oublik yang tersedia secara online memudahkan masyarakat untuk mengakses Informasi, peningkatan Akuntabilitas pelayanan berbasis IT memungkinkan pelacakan dan pemantauan proses pelayanan, dan Peningkatan Partisipasi masyarakat informasi public yang tersedia secara online memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam prosess pengambilan keputusanan.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Dan Informasi Publik Berbasis IT menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel*" serta tujuan "*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Cakupan Pelayanan Smart City	77,78	77,78	100%	Sangat Baik	100	100%
2.	Indeks SPBE	2,01	2,86	142,28%	Sangat Baik	2,05	139.51%

5. Indikator Cakupan Pelayanan Smart City

Smart city atau kota pintar adalah kerangka penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat tata kelola kota yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di area ini. Namun untuk dikatakan sebagai kota pintar, sebuah kota harus memenuhi 6 indikator. Keenam indikator tersebut adalah Masyarakat Penghuni Kota, Lingkungan, Prasarana, Ekonomi, Mobilitas, serta Konsep *Smart Living*.

Pemerintah Kabupaten Asahan bersama dengan 49 Kabupaten/Kota se-Indonesia menerima penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atas keikutsertaan dalam *Program Gerakan Menuju Smart City 2024* karena berhasil menyusun rencana induk pembangunan berbasis kota cerdas sekaligus memaksimalkan potensi masing-masing wilayah. Program ini berupa pendampingan bagi seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menyusun Masterplan Smart City Tahun 2024.



Gambar 3.4
Pemerintah Kabupaten Asahan Terima Penghargaan Smart City Tahun 2024

Plakat penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, di Nusantara Hall, ICE BSD City ini pada Forum Smart City Nasional, Pameran dan *Awarding* gerakan menjadi *Smart City* 2024, Rabu (07/12/2024).

Adapun Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan *Smart City* pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan *Smart City*

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
0	100	100	3	3	100	66,67	66,67	100	77,78	77,78	100,10%

Sumber Data : Dinas Kominfo Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indeks Profesional Indikator Cakupan Pelayanan Smart City didukung Program Aplikasi Informatika. Cakupan pelayanan *Smart City* diperoleh berdasarkan jumlah layanan dimensi smart city panduan dari kemenkominfo yang telah dilaksanakan. Pada Tahun 2024 diperoleh nilai cakupan pelayanan smart city sebesar 77,78 dengan capaian target 100%. Layanan dimensi *Smart City* yang dikerjakan sudah memenuhi dari target yang ditetapkan. Kinerja Tahun 2024 mendapat kategori sangat tinggi, sama dengan tahun 2023, Walaupun di Tahun 2021 Indikator ini belum ditetapkan targetnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan *Smart City* antara lain:

1. Telah memiliki payung hukum untuk Smart City, Dewan pelaksana Smart City dan Tim Pelaksan Smart City.
2. Memiliki Status Keuangan WTP.
3. Telah memiliki paying hukum untuk melaksanakan keamanan infrastruktur mengacu pada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021.
4. Telah menyelenggarakan forum Smart City dan rapat-rapat Tim Pelaksana maupun Dewan Smart City.
5. Komitmen kuat daerah Kabupaten Asahan,

Dalam rangka mencapai target Cakupan Pelayanan *Smart City Pemkab*. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam melaksanakan program smart city.
2. Meningkatkan Anggaran dari APBD untuk Smart city.
3. Dioptimalisasi dukungan pimpinan sehingga dapat melakukan akselerasi program-program yang belum berjalan

Gambar 3.2
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Smart City









Selanjutnya untuk capaian Misi 1 dengan sasaran meningkatnya Pelayanan dan Informasi Publik Berbasis IT dapat dilihat dari data berikut:

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/ dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 3.14
Skor dan Status Kinerja Pencapaian Indikaor Kinerja Cakupan Pelayanan Smart City terhadap 50 (Lima Puluh) Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Baslin (10%)	Output (20%)	Outcome (30%)	Impact (10%)	Quick Wins (30%)	Nilai Final
1.	Kab. Aceh Jaya	1,88	1,95	2,27	1,45	1,65	1,9
2.	Kab. Agam	3	2.24	2,99	2,8	2,78	2,76
3.	**Kab Asahan**	**2,96**	**2,95**	**2,78**	**1,1**	**1,18**	**2,18**
4.	Kab. Bandung Barat	,3,64	3,04	3,12	3,35	3	3,14
5.	Kab. Bangka	2,08	1,73	2,16	2,6	2,45	2,2
6.	Kab.Banjarnegara	2,84	2,16	2,88	1,8	2,27	2,44
7.	Kab. Bantaeng	2	2,27	2,81	2,35	2,82	2,58
8.	Kab. Barito Selatan	3,16	1,89	2,76	2,15	1,75	2,26
9.	Kab. Batanghari	3,68	2,98	3,01	3	2,6	2,95
10.	Kab. Bondowoso	2,56	2,33	2,65	2,25	2,3	2,43
11.	Kab.Boven Digoel	1,88	1,98	1,95	1,45	2,3	2
12.	Kab Bulelang	3	2,64	3,39	2,65	3,17	3,06
13.	Kab. Ciamis	2,28	2,09	2,78	2	2,18	2,33
14.	Kab. Cilacap	2,6	2,78	3,02	2,65	3,08	2,8
15.	Kab. Garut	2,6	2,69	2,74	2,5	2,83	2,77
16	Kab. Hulu Sungai Selatan	3,32	2,78	2,99	1,7	2,93	2,83
17	Kab.Indragiri Hilir	2,04	2,05	2,38	2,15	2,73	2,36
18	Kab. JayaPura	1,36	1,45	1,87	1,5	1,75	1,66
19	Kab.KarangAsem	3,12	2,33	2,87	2,05	2,82	2,69
20	Kab. Kediri	3,28	2,76	3,27	3,8	3,73	3.36
21	Kab. ketapang	2,92	1,85	2,25	1,3	2,92	2,34
22	Kab. Lampung Tengah	2,88	2,35	2,9	1,95	2,67	2,62
23	Kab Lebak	3,6	2,75	3,08	2,65	3,15	3,04
24	Kab.Lumajang	2,64	2,16	2,85	2,5	2,48	2,55
25	Kab. Luwu	1,24	1,6	2,25	1,55	2,33	1,97

26	Kab. Majen	2,48	1,8	2,75	1,5	2,23	2,25
27	Kab. Manokwari	1,4	1,18	1,24	1,15	1,87	1,42
28	Kab.Muaro Jambi	3,36	2,8	2,66	1,75	2,85	2,72
29	Kab. Nunukan	1,64	1,93	2,25	1,75	1,98	1,99
30	Kab. Ogan Kumering Ulu	1	1,25	1	1,7	1,02	2,14
31	Kab. pemakasan	2	1,84	2,33	1,7	1,87	2
32	Kab. Poso	2,68	2,22	2,28	1,5	2,02	2,15
33	Kab Sampang	3,72	2,84	2,97	2,05	2,9	2,91
34	Kab. Sarolangun	2,12	1,87	2,46	1,7	1,83	2,04
35	Kab. Solok Selata	1,8	2,2	1,92	1,5	1,35	1,75
36	Kab. Sumba Timur	2,64	2,07	2,59	2,6	1,84	2,32
37	Kab. Tapanili Tengah	2,22	1,55	1,87	2,35	2,42	2,05
38	Kab. Tasik Malaya	3,56	2,65	2,92	2,95	3,4	2,08
39	Kab. Tegal	4	2,98	3,5	2,8	3,33	2,33
40	Kab. Wajo	1,96	1,6	5,54	1,55	1,42	3,86
41	Kota Bengkulu	1,48	1,75	2,93	1,35	1,3	1,6
42	Kota Blitar	3,72	3,02	3,33	3,75	3.43	3,38
43	Kota Gorontalo	2,68	2,40	2,50	2,35	2,27	2,46
44	Kota Kotamobagu	3,52	2,24	2,86	1,15	1,7	2,28
45	Kota Metro	2,16	2,47	2,52	1,6	1,7	2,14
46	Kota Palangkaraya	1,48	2,13	2,64	1,85	1,42	1,98
47	Kota palu	2,28	2,55	2,57	2,1	2,05	2,33
48	Kota Pemtang Siantar	1,8	1,58	1,72	,65	1,67	1,68
49	Kota Sabang	1,2	1,35	2,07	1,25	1,7	1,65
50	Kota Sawalonto	3,16	2,49	2,81	2,5	278	2,74

Sumber Data : LHE Kemenkominfo Tahun 2024

Dari Tabel di atas diketahui bahwa secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan berada pada posisi urutan ke 32 dengan Skor 2,18 dengan status masih Rendah.

Sementara terhadap perbandingan Capaian Pemkab/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.15

Skor Pencapaian **Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan *Smart City*** tahun 2024 **pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pendampingan**

No.	Kabupaten / Kota	Skor
1	Kab Asahan	2,18
2	Kabupaten Tapanuli Tengah	2,05

3	Kota Pematang Siantar	1,68

Sumber Data : LHE Kemenkominfo Tahun 2024

Dari data di atas terlihat bahwa Pemkab Asahan berada di urutan ke-1 dari 3 Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera utara dengan Skor Nilai 2,18

.

6. Indikator Indeks SPBE

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik..

Gambar 3. 6
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Indeks SPBE

<table>
<tr>
<td>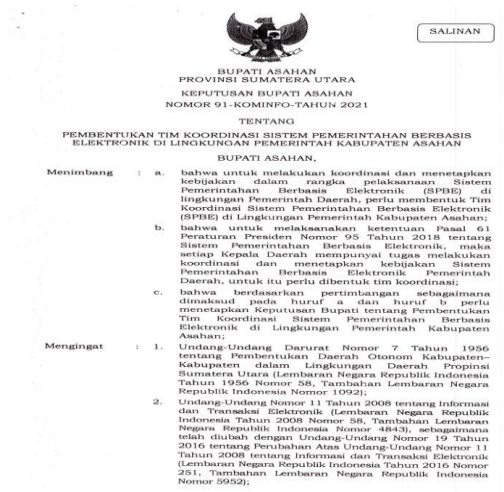
SALINAN
BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 91-KOMINFO-TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
BUPATI ASAHAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, untuk itu perlu dibentuk tim koordinasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Perbup Bupati Asahan Nomor 91-KOMINFO-TAHUN 2021</td>
<td>2. Rapat tentang SPBE di Tahun 2022</td>
</tr>
<tr>
<td>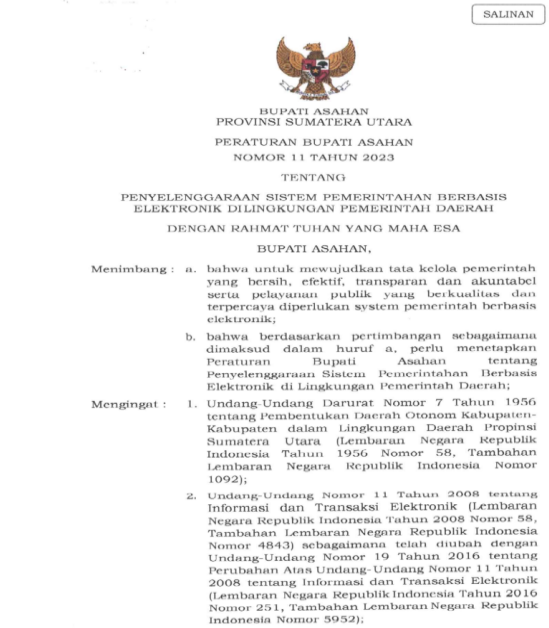
SALINAN
BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ASAHAN,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan system pemerintah berbasis elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Asahan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Perbup Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2023 Tanggal 11 April 2023</td>
<td>4. Rapat Hasil Evaluasi Tahun 2024 dengan nilai 2,86 hasil Baik</td>
</tr>
</table>

Adapun Capaian Kinerja Indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1,96	1,71	87,4	1,95	1,49	75,63	1,99	1,97	98,99	2,01	2,86	142,28

Sumber Data : Dinas Kominfo Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indeks SPBE didukung Program Aplikasi Informatika. Indeks SPBE diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari Kemenkominfo.

Pada tahun 2021 Capaiannya adalah sebesar 87,4% namun capaian pada tahun 2022 Indeks SPBE nya menurun menjadi 75,63% dikarenakan di tahun 2022 Tim Koordinasi SPBE belum berjalan optimal dan roadmap SPBE belum selesai dikerjakan karena belum dapat jadwal pendampingan dengan kemenkominfo, dan pada tahun 2023 meningkat 98,99 % dibandingkan dengan tahun 2022.

Tahun 2024 mendapat kategori sangat tinggi melebihi capaian 100 % dengan mendapat capaian 142,28 %, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 dan akan ditingkatkan lagi di Tahun 2025.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Indeks SPBE tersebut antara lain:

1. Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan telah aktif melakukan review kebijkan internal tata kelola SPBE dan sudah berupaya untuk menindaklanjuti hasil review.
2. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang telah memenuhi kreteria aspek kekuatan pemerintah Kabupaten Asahan adalah indikator : Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah pada level maksimal.
3. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya Penerapan Manajemen SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada pemerintah Kabupaten Asahan.
4. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya : Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Kinerja Pegawai sudah pada taraf reviu layanan tersebut
5. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3 yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemda Kabupaten Asahan. Rata-rata layanan publik ini sudah memiliki kapabilitas kolaborasi dan integrasi, dan beberapa sudah dioptimalisasi.

Dalam rangka mencapai target Indeks SPBE Pemkab. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan untuk Aspek kebijakan internal SPBE, kebijakan internal audit harap dibuat. Kemudian untuk meningkatkan level buatlah reviu tentang kebijakan-kebijakan tersebut serta tindaklanjuti saran dari reviu tersebut, tulis notulen rapatnya dan tanda tangan pejabat koordinator tim SPBE sehingga mendapatkan nilai maximum.
2. Aspek perencanaan strategis SPBE yang masih berupa draft harap dilakakan legalisasi, pastikan terintegrasi dan memenuhi 6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, ArsitekturAplikasi, ArsitekturInfrastruktur, dan Arsitektur Keamanan. sehingga mendapatkan level 3, setahun kemudian lakukanlah reviu dan optimasi kebijakan.
3. Nilai indikator yang sudah maximal (kematangan 5) lakukanlah perbaikan dan peningkatan secara terus menerus (continues improvement), sehingga kematangan 5 dapat dipertahankan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 3.17
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,86	Sangat Baik
2.	Kota. Tebing Tinggi	3,79	Sangat Baik
3.	Kota. Medan	3,67	Sangat Baik
4.	Kab. Nias	3,72	Sangat Baik
5.	Kab. Langkat	3,66	Sangat Baik
6.	Kab. Deli Serdang	3,57	Sangat Baik
7.	Kota. Tanjung Balai	3,24	Baik
8.	Kab. Tapanuli Selatan	3,14	Baik
9.	Kab. Kota Binjai	3,12	Baik
10.	Kota Pematang siantar	3,06	Baik
11.	Kab. Karo	3,04	Baik
12.	Kab. Toba	2,95	Baik
13.	Kab. Nias Selatan	2,90	Baik
14.	Kab. Mandailing Natal	2,89	Baik
15.	**Kab. Asahan**	**2,86**	**Baik**
16.	Kab. Tapanuli Utara	2,85	Baik
17.	Kab. Humbang Hasundutan	2,80	Baik
18.	Kab. Labuhanbatu Utara	2,78	Baik
19.	Kab. Samosir	2,70	Baik
20.	Kab. Dairi	2,69	Baik
21.	Kab. Batubara	2,67	Baik
22.	Kab. Pakpak Bharat	2,66	Baik
23.	Kota padang Sidempuan	2,66	Baik
24.	Kab. Serdang Bedagai	2,65	Baik
25.	Kab. Nias Utara	2,41	Cukup
26.	Kota Sibolga	2,41	Cukup
27.	Kab. Tapanuli Tengah	2,38	Cukup
28.	Kab. Simalungun	2,37	Cukup
29.	Kota. Gunung Sitoli	2,33	Cukup
30.	Kab. Padang Lawas Utara	2,26	Cukup
31.	Kota Padang Lawas	2,17	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
32.	Kab. Labuhanbatu Selatan	1,93	Cukup
33.	Kota Nias Barat	1,80	Kurang

Terlihat bahwa Pemkab Asahan masih berada di posisi No. 15 dari 33 Pemkab/Kota dengan indeks sebesar 2,86 Indeks ini masih perlu ditingkatkan ditahun mendatang karena Predikat Baik.

Selanjutnya untuk capaian Misi 2 dengan Indikator Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian dapat dilihat dari data berikut:

MISI 2	**:**	**Meningkatkan Kerjasama Antar Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah**
Sasaran	:	Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian dalam arti Luas

Sasaran 3	**:**	**Meningkatnya Produktivitas Ketahanan, dan Peran Ekonomi Pertanian dalam arti luas**

Pada era otonomi daerah saat sekarang, Daerah diberi kewenangan dan peluang yang luas bagi pengembangan potensi ekonomi, sosial, politik dan budaya. Salah satu bentuk peluang itu adalah perlunya penajaman orientasi pembangunan yang berbasis pada potensi daerah. Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat setempat. Berdasarkan pada kemampuan itu maka Pemkab Asahan diharapkan dapat menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya, sedangkan pemerintah pusat bertindak sebagai fasilitator dan koordinator pembangunan nasional.

Sasaran Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian dalam arti Luas menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong Perekonomian Daerah*" serta tujuan "*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.18
Pengukuran Capaian Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah sektor pertanian	1,69	1,70	100,59 %	Sangat Baik	1,73	98,27 %

7. Indikator Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian

Tabel 3.19
Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian	1,69	1,70	100,59	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
Padi (Kw/Ha)	56,35	56,62	100,48		
Jagung (Kw/Ha)	58,10	57,86	99,59		
Kedelai (Kw/Ha)	17,92	14,34	80,02		
Ubi Kayu (Kw/Ha)	335,00	335,15	100,04		
Bawang Merah (Kw/Ha)	48,50	45,42	93,65		
Cabai Merah (Kw/Ha)	79,00	65,92	83,44		
Pisang (Kw/Ha)	375,00	371,52	99,07		
Kelapa Sawit (Ton/Ha/Thn)	21,999	22,07	100,32		
Kelapa (Ton/Ha/Thn)	1,126	1,13	100,36		

Kakao (Ton/Ha/Thn)	0,613	0,64	104,40		
Karet (Ton/Ha/Thn)	1,065	1,15	107,98		

Sumber Data : Dinas Pertanian (2024)

Adapun Capaian Kinerja Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.20

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produktivitas
Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
		97,21	1,66	1.66	100	1,67	1,67	100	1,69	1,70	100,59

Sumber Data : Dinas Pertanian Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indikator Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian secara umum Tingkat Produktivitas Pertanian mengalami kenaikan. Jika dilihat dari tabel diatas, rata-rata persentase produktivitas pertanian tahun 2024 mencapai 100,59%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 100%, dan dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya disetiap indikator mengalami kenaikan, walaupun tidak terlalu signifikan namun mampu mencapai atau bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan. Produktivitas pertanian mengalami pertumbuhan. Persentase produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,83 %, namun pada tanaman perkebunan menurun sebesar 3,85% jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022. Namun realisasi untuk tahun 2024 masih dikatakan baik karena pertumbuhan produktivitas tanaman Perkebunan tahun 2023 di angka 0,27 yaitu angka yang sama dengan tahun 2024. Hal ini didukung dengan banyaknya sarana prasarana yang diberikan kepada petani untuk mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan hortikultura dan Perkebunan. Selain itu juga kegiatan-kegiatan yang

mendukung dalam pencapaian dan peningkatan pertumbuhan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman Perkebunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Kinerja Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian tersebut antara lain:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian yang optimal, seperti benih berlabel dan bersertifikat yang diperbantukan, pupuk subsidi yang tersalurkan dengan tepat dan benar, pengendalian OPT yang tepat dan terjadwal
2. Pembangunan atau rehabilitasi prasarana pertanian yang baik
3. Terlaksananya sekolah lapang bagi petani yang mendukung kapasitas petani dalam mengelola pertaniannya. Hal ini juga tidak terlepas dari peran Petuga Penyuluh Pertanian Lapangan yang sangat membantu petani dalam memahami konsep pertanian.
4. minat masyarakat untuk bertanam, khususnya komoditi bawang merah yang cukup antusias dan harga pasar yang tergolong cukup memuaskan dan menjanjikan bagi petani yang membudidayakannya

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Kinerja Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian tersebut antara lain:

1. terjadinya kekeringan pada pertanaman kedelai yang menyebabkan kurangnya pasokan air dan tentu saja memengaruhi capaian produktivitas, khususnya pada pertanaman kedelai
2. terjadinya alih fungsi lahan di beberapa titik Lokasi pertanaman kelapa sawit, namun tidak terlalu berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Asahan
3. Harga kakao yang tidak stabil membuat petani kakao kurang serius dalam melakukan budidaya tanaman kakao khususnya perawatan tanaman baik dalam pemberian pupuk maupun perawatan tanaman yang terserang OPT, yang berimbas pada penurunan produktivitas dan minat masyarakat yang kurang terhadap komoditi ini.

Dalam rangka mencapai target Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian. Pemkab Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan infrastruktur pertanian berupa sarana dan prasarana pertanian yang dibangun dan diperbaiki.
- ✓ Peningkatan peran Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dalam membantu pemahaman petani terhadap konsep bertanam padi sawah;
- ✓ Meningkatkan frekuensi pertemuan seperti sekolah lapang yang bertujuan untuk pemberdayaan petani, dan juga penggunaan pupuk organik dan pola tanam yang sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan.
- ✓ Pemberian bantuan benih padi unggul dan bersertifikat serta upaya pengendalian OPT pertanian memberikan dampak yang besar dalam peningkatan produktivitas padi.
- ✓ Meningkatkan sinergi yang baik antara petani dan petugas penyuluh lapangan yang melakukan pengawalan pertanaman.
- ✓ Melakukan Sosialisasi kepada para Petani agar saat pertanaman dilakukan saat curah hujan sangat tinggi dan menghondari penanaman saat memasuki musim kemarau sehingga tanaman kekurangan air.
- ✓ Himbauan kepada para petani agar tetap konsisten untuk terus melakukan perawatan sesuai anjuran penyuluh pertanian
- ✓ Meningkatkan peran serta dan dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Asahan untuk memberikan edukasi kepada petani.
- ✓ Meningkatkan Minat masyarakat untuk menanam bawang merah karena harga pasar yang tergolong cukup memuaskan bagi petani yang membudidayakannya.
- ✓ Meningkatkan pengetahuan petani terhadap budidaya cabai merah
- ✓ Penyuluh lapangan agar senantiasa memperkenalkan cara dan teknik penanaman cabai merah sehingga Petani merasakan manfaat jika ingin menanam cabai merah.
- ✓ Himbauan agar petani tidak melakuan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan pertanian, yang nantinya akan ditanami tanaman pangan atau hortikultura.

- ✓ Pemkab Asahan agar berusaha agar menciptakan kondisi Harga kakao yang stabil membuat petani kakao serius dalam melakukan budidaya tanaman kakao khususnya perawatan tanaman baik dalam pemberian pupuk maupun perawatan tanaman yang terserang OPT.
- ✓ Pendampingan kepada petani karet rakyat. Penyuluhan terhadap penanganan serangan OPT terus dilakukan oleh penyuluh pertanian dalam memberikan pemahaman kepada petani karet disamping dukungan saprodi yang diberikan sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas tanaman karet.

Gambar 3.7
Capaian Kinerja Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian



Peningkatan infrastruktur pertanian



Peningkatan peran Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan



Meningkatkan frekuensi pertemuan seperti sekolah lapang



Pemberian bantuan benih padi unggul



Hasil Panen Padi Meningkat



Peningkatan Kapasitas Petani dalam mengelola tanaman Perkebunan



Alsintan mendukung produktivitas

Alsintan mendukung produktivitas



Peningkatan Kapasitas Penyuluh (Bimtek)

Selanjutnya untuk capaian Misi 2 dengan Indikator Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian dapat dilihat dari data berikut:

MISI 2	**:**	**Meningkatkan Kerjasama Antar Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah**
Sasaran	:	Meningkatnya Daya Dukung dan Nilai Tambah Potensi Unggulan Daerah

Sasaran 4	**:**	Meningkatnya Daya Dukung dan Nilai Tambah Potensi Unggulan Daerah

Peningkatan daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah menjadi salah satu factor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Melalui pemanfaatan sumber daya local secara optimal serta pemuatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industry kreatif, daerah semangkin mampu mengembangkan potensi ekonominya secara lebih maksimal.

Sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Nilai Tambah Potensi Unggulan Daerah menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatka Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaat Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong Perekonomian Daerah*" serta tujuan "*Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.21
Pengukuran Capaian Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Pertumbuhan wirausaha baru yang mendukung potensi unggulan	4,52	4,71	104,20	Sangat Tinggi	4,77	98,74

	Daerah						

8. Indikator Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Mendukung Potensi Unggulan Daerah

Produk unggulan daerah merupakan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas di tingkat desa/setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang dihasilkan oleh koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Grafik 3.6 : Capaian Pertumbuhan Wirausaha Baru

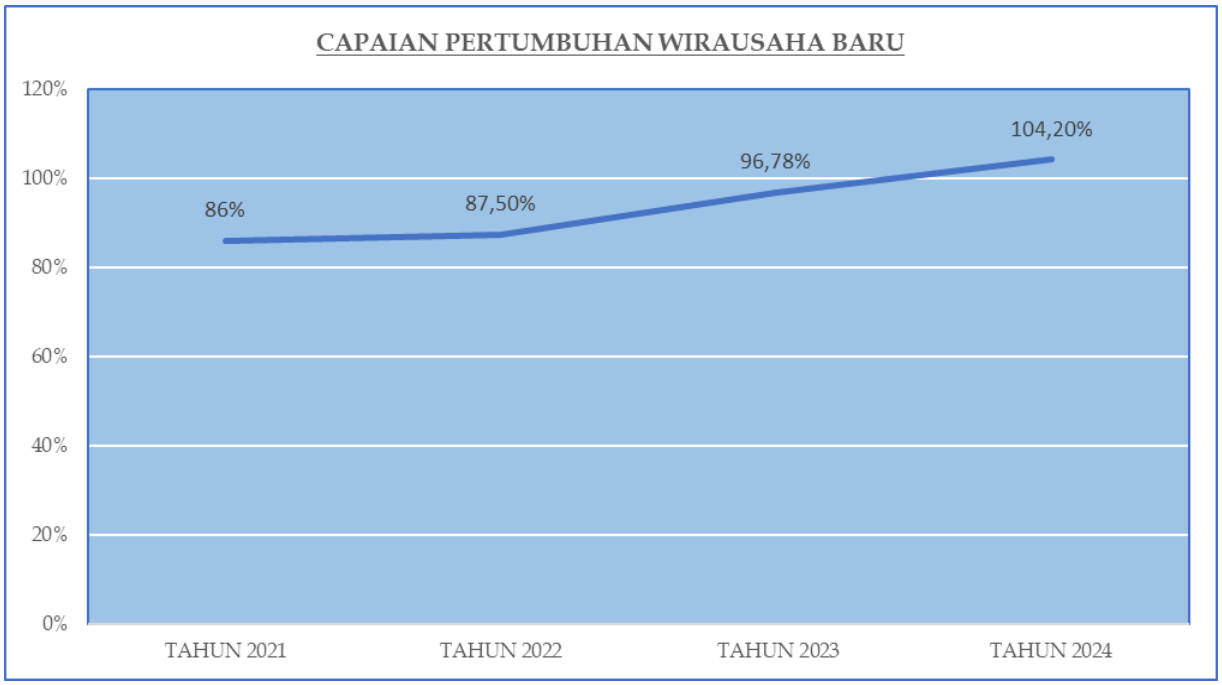

Adapun Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Mendukung Potensi Unggulan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.3.8
Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung Potensi Unggulan Daerah

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
3,93	3,48	88,04	4,16	3,64	87,50	4,35	4,21	96,78	4,52	4,71	104,20

Sumber Data : Dinas Kopdaggin Kab. Asahan (2024)

Dari tabel diatas Untuk Pertumbuhan Wirausaha baru dibandingkan tahun 2023 maka terdapat peningkatan capaian indikator kinerja, yaitu dari 96,78 % naik menjadi 104,20 %. Pertumbuhan tersebut adalah meningkatan pertambahan wirausaha dari 297 wirausaha naik menjadi 311 wirausaha, Artinya terdapat penambahan wirausaha sebanyak 14 unit wirausaha pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 terdapat penambahan 12 unit wirausaha

.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Pertumbuhan wirausaha baru yang mendukung potensi unggulan daerah tersebut antara lain:

1. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan :
   - Masih terdapatnya kreativitas dan inovasi pelaku usaha dalam pengembangan produk
   - Ketersediaan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk mendukung pengemnbangan usaha
   - Tersedianya jaringan dan komunikasi wirausaha yang dapat memberikan dukungan dan inovasi
2. Faktor yang penyebab kegagalan :
   - Kurangnya semangat dan dan motivasi untuk menjadi wirausaha
   - Kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil
   - Masih terbatasnya ketersediaan sumberdaya, modal usaha, sarana dan prasarana serta teknologi untuk mendukung perkembangan usaha

Dalam rangka mencapai target Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung Potensi Unggulan Daerah Pemkab. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Ekonomi Lokal berupa :
   - Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan berusaha;
   - Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran

b. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah berupa :
   - Bantuan dana sebagai modal untuk usaha;
   - Pembangunan prasarana sebagai pendukung dalam pengembangan sosial ekonomi rakyat;
   - Pelatihan yang ditujukan bagi aparat dan masyarakat

Selanjutnya untuk capaian Misi 2 dengan Indikator Potensi Daya Tarik Pariwisata Daerah Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat (Kelompok Sadar Wisata) yang direalisasikan dapat dilihat dari data berikut:

MISI 2	**:**	**Meningkatkan Kerjasama Antar Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah**
Sasaran	:	Meningkatnya Kelestarian Potensi Seni Budaya Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Sinergi dengan Pengembangan Wisata Daerah

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Potensi Potensi Daya Tarik Pariwisata Daerah berbasis Kearifan Lokal Masyarakat (Kelompok Sadar Wisata) yang di realiasasikan	8	16	200	Sangat Baik	10	160

.

9. Indikator Potensi Daya Tarik Pariwisata Daerah Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat (Kelompok Sadar Wisata) Yang Direalisasikan

Kearifan lokal sebagai gagasan-gagasan suatu komunitas dipenuhi oleh nilai-nilai kebijaksanan (*wisdom*), tertanam dan diikuti oleh setiap individu didalam sebuah komunitas. Juga, sebagai suatu pengetahuan yang diwariskan secara turun menurun dan dari generasi ke generasi yang tercipta melalui proses pengalaman dan pemahaman atas keadaan lingkungan disuatu tempat, lalu diintegrasikan pada pola

perilaku hidup dan kehidupan sehari-hari. Dan belakangan, kearifan lokal telah menjadi daya tarik pariwisata di Indonesia, hal ini karena didalamnya terkandung nilai keramahan atas interaksi sosial masyarakat dan lingkungan, serta keunikan kehidupan sebuah komunitas yang menjadi pesona bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan baik di Indonesia maupun mancanegara

Sasaran 5	:	Meningkatnya Kelestarian Potensi Seni Budaya Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Sinergi dengan Pengembangan Wisata Daerah

Seiring dengan menigkatnya kesadaran akana pentingnya pariwisata berbasis budaya,, berbagai daerah kini semangkin menonjolkan kekayaan seni dan kearifan local sebagai daya tarik utama.Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, tetapijuga untuk menjaga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun.

Kelestarian seni dan budaya local semakin mendapat perhatian denganadanya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan masyarakat. Berbagai festival budaya, pertunjukan seni tradisional, serta pelestarian kuliner khas daerah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pengembangan wisata. Dengan cara ini, seni dan tradisi tidak hanya lestari , tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selain itu nilai-nilai kearifan local, seperti keramahan, gotong royong, serta cara hidup yang selaran dengan alam, turut memperkaya pengalaman wisatawan. Pengelolaan wisata berbasis komunitas,seperti desa wisata dan ekowisata, semakin menunjukkan bahwa budaya dan lingkungan dapat berkembang bersama secara berkelanjutan.

Dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat, promosi, yang efektif,serta keterlibatan masyarakat yang aktif, seni buda dan kearifan lokal tdak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga ,enjadi motor penggerak utama dalam membangun pariwisata yng berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Sasaran Meningkatnya Kelestarian Potensi Seni Budaya Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Sinergi dengan Pengembangan Wisata Daerah menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatkan Kerjasama Antar Pelaku Usahadan Pemanfatan Potensi Unggulan Daerah Dalaam Rangka Mendorong*

Perkonomian Daerah" serta tujuan "*Meningkatkan meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Adapun Capaian Kinerja Indikator Potensi daya tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (Kelompok sadar wisata) yang direalisasikan pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja Potensi Daya Tarik Pariwisata Daerah Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat (Kelompok Sadar Wisata) Yang Direalisasikan

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
			6 Pok dar wis	8 Pok darwis	100,33	7 Pok darwis	12 pok dar wis	171,43	8	16	200

Sumber Data : Dispora Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja Indikator Sasaran “Potensi daya tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (Kelompok Sadar Wisata yang direalisasikan pada tahun 2022 mengalami kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 terdapat 21 Destinasi/Objek Wisata dan pada tahun 2022 menjadi 24 Destinasi/Objek Wisata. Sehingga pembagi menjadi besar dan Realisasi menjadi kecil. Sedangkan jumlah daya tarik wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tercapai sebanyak 3 (tiga) buah/perbup

Capaian tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan capaian 2024 dari 171,43 %% menjadi 200 %. terlihat juga bahwa jumlah organisasi kelompok wisata pada tahun 2021-2026 di tahun 2021 belum ada target, dan di tahun 2023 mengalami perubahan yaitu sebanyak 12 kelompok, kemudian meningkat di tahun 2024 sebanyak 4 kelompok atau menjadi sebanyak 16 kelompok.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Potensi daya tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (Kelompok sadar wisata) yang direalisasikan ***tersebut antara lain:***

1. Keindahan alay yang terja, seperti pantai, gunung, dan hutan.
2. Keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata,Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata.
3. Menjag a kelestarian lingkungan alam dan budaya local memastikan daya tarik wisata tetap terjaga.
4. Penyediaan fasilitasi pendukung yang memadai, seperti akomudasi, transportasi, dan infrastruktur lainny, serta kemudahan akses ke lokasi wisata.

Dalam rangka Potensi daya tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (Kelompok sadar wisata) yang direalisasikan Pemkab. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

- ✓ Melakukan perbaikan infrastruktur jalan,
- ✓ Pembangunan dan perawatan fasilitas wisata serta atraksi wisata
- ✓ Pemberdayaan masyarakat lokal setempat.
- ✓ Penyiapan Anggaran dan
- ✓ Kejelasan dan peciptaan status lahan sebagai objek wisata.

Selanjutnya untuk capaian Misi 3 dapat dilihat dari informasi berikut:

MISI 3	**:**	**Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi**
Sasaran	:	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat

Grafik 3.3
Pengukuran Capaian Sasaran 6

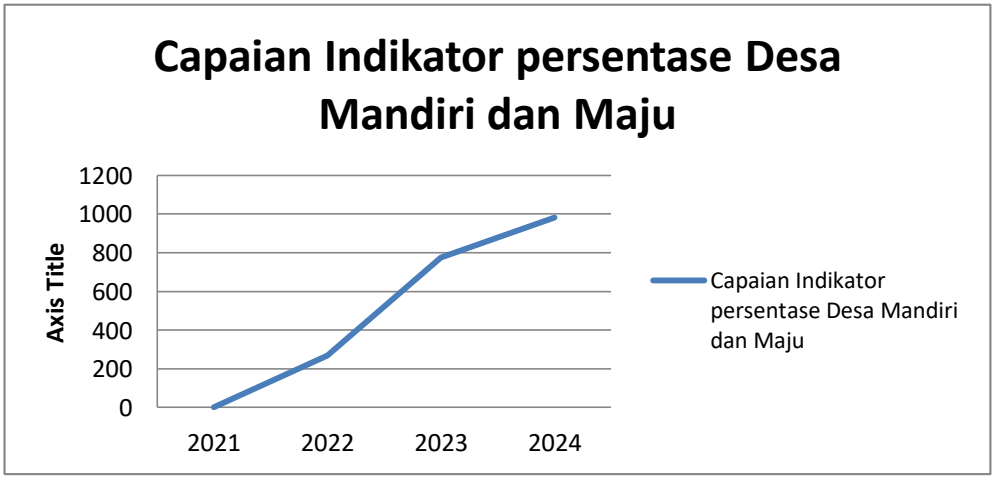

Tabel 3.25
Pengukuran Capaian Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Persentase Desa Mandiri dan Maju didasarkan dari Indeks Desa Membangun (IDM)	2,82 %	27,68 %	981,51	Sangat Baik	3,95 %	700,76 %

10. Indikator Persentase Desa Mandiri dan Maju didasarkan dari Indeks Desa Membangun (IDM)

Untuk menilai tingkat kemandirian suatu desa, diperlukan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan desa secara komprehensif. Ada dua indeks yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengklasifikasikan desa berdasarkan tingkat perkembangan atau kemajuannya, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM).

IPD adalah ukuran yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data hasil pendataan Potensi Desa (Podes). IPD terdiri dari empat variabel utama, yaitu ketersediaan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, aksesibilitas/transportasi, dan penyelenggaraan pemerintahan. IPD memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1, dengan nilai semakin tinggi menunjukkan tingkat perkembangan desa semakin baik.

Adapun Capaian Kinerja Indikator persentase Desa Mandiri dan Maju yang didasarkan dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang direalisasikan pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri Dan Maju
di dasarkan dari Indeks Desa Membangun (IDM)

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
			1,69	4,52	267,46	2,26	17,51	774,78	2,82	27,68	981,56

Sumber Data : Dinas PMD Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel terlihat bahwa capaian kinerja Indikator Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM tahun 2023 untuk indikator Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM sebesar 774,78 % meningkat menjadi 981,51% pada Tahun 2024. Peningkatan persentase Capaian disebabkan adanya beberapa faktor yang menunjang naiknya status desa, seperti adanya penambahan quisioner pada indikator yang menjadi penilaian IDM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian persentase Desa Mandiri dan Maju yang didasarkan dari Indeks Desa Membangun (IDM) ***tersebut antara lain:***

5. Faktor Keberhasilan
   a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) :
      - **Pendidikan & Kesehatan**: Tingginya tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
      - **Partisipasi Masyarakat**: Masyarakat aktif dalam pembangunan desa, gotong royong, serta adanya organisasi sosial yang kuat.
      - **Keamanan & Ketertiban**: Rendahnya tingkat konflik sosial dan kriminalitas.
   b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) :
      - **Diversifikasi Ekonomi**: Tersedianya berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, UMKM, pariwisata, dan industri kreatif

- **Ketersediaan Lapangan Kerja**: Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja oleh sektor ekonomi desa.
- **Dukungan Modal & Teknologi**: Akses yang baik terhadap modal usaha, kredit, serta teknologi pertanian atau produksi.

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) :
- **Akses Infrastruktur Dasar**: Tersedianya jalan yang layak, listrik, air bersih, serta sanitasi yang baik.
- **Pengelolaan Lingkungan yang Baik**: Adanya sistem pengelolaan sampah, konservasi hutan, serta penanggulangan bencana.

d. Kebijakan & Dukungan Pemerintah :
- **Kebijakan Dana Desa yang Efektif**: Penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan lokal.
- **Pendampingan & Pembinaan**: Dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis.

6. Faktor Kegagalan

a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) :
- **Rendahnya Pendidikan & Kesehatan**: Minimnya sekolah dan fasilitas kesehatan yang memadai.
- **Tingkat Konflik Sosial Tinggi**: Ketidakharmonisan dalam masyarakat akibat konflik adat, agama, atau politik.
- **Kurangnya Partisipasi Masyarakat**: Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa.

b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) :
- **Ketergantungan Ekonomi pada Sektor Tertentu**: Tidak adanya diversifikasi ekonomi, bergantung hanya pada pertanian tradisional.
- **Kurangnya Akses Permodalan & Teknologi**: Sulitnya memperoleh modal usaha dan lambatnya adopsi teknologi.
- **Lapangan Kerja Terbatas**: Banyaknya pengangguran akibat kurangnya sektor produktif di desa.

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) :
- **Infrastruktur Minim**: Jalan rusak, listrik tidak stabil, dan sulitnya akses air bersih.

- **Kerusakan Lingkungan**: Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, pencemaran, atau bencana alam yang tidak tertangani.

d. Kebijakan & Tata Kelola yang Lemah :

- **Dana Desa Tidak Efektif**: Pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan atau penyalahgunaan anggaran.
- **Kurangnya Pembinaan & Pendampingan**: Minimnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait.

Kesimpulan :

Keberhasilan desa menjadi **Desa Mandiri dan Maju** sangat bergantung pada **pembangunan infrastruktur, ekonomi yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang efektif**. Sebaliknya, jika faktor-faktor di atas tidak terpenuhi, maka desa akan mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/ dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan diperoleh informasi sebagai berikut :

Gambar 3. 2

Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target persentase Desa Mandiri dan Maju yang didasarkan dari Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024



1. Gotong Royong kecamatan silau laut



2. Tanaman hortikultura dusun V Desa Punggulan



7. Gotong Royong kecamatan kisaran barat



4. Dusun I Desa Hessa Air Genting budidaya tanaman hidroponik

Selanjutnya untuk capaian Misi 4 dapat dilihat dari Tabel berikut:

MISI 4	**:**	**Menciptakan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Investasi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja**
Sasaran	:	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

Tabel 3.27
Pengukuran Capaian Sasaran 7

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Realisasi Investasi PMA (Juta US $)	390	370,99	95,12	Sangat Tinggi	217,2	170,8%
2	Realisasi Investasi PMDN (Triliyun Rupiah)	11,1	8,7	78,37%	Tinggi	11,6	75%

11. Indikator Realisasi Investasi PMA
12. Indikator Realisasi Investasi PMDN

Realisasi investasi adalah data yang diambil dari hasil pencatatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh Penanam Modal secara daring, atas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran 7 : Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

Realisasi investasi Daerah yang terus meningkat menjadi indikator positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa iklim infestasi di daerah semangkin kondusif, di dukung oleh regulasi yang ramah investasi, infrastruktur yang berkembang, serta kemudahan perizinan yang semakin efisien.

Sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 4 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatkan realisasi Investasi daerah*" serta tujuan "*Meningkatkan daya saingInvestasi daerah"*

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 2 (empat) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Jumlah investasi di Kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir juga cenderung mengalami peningkatan. Selengkapnya jumlah Investasi tersebut tergambar dari Grafik berikut :

Grafik 3.8
Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Asahan

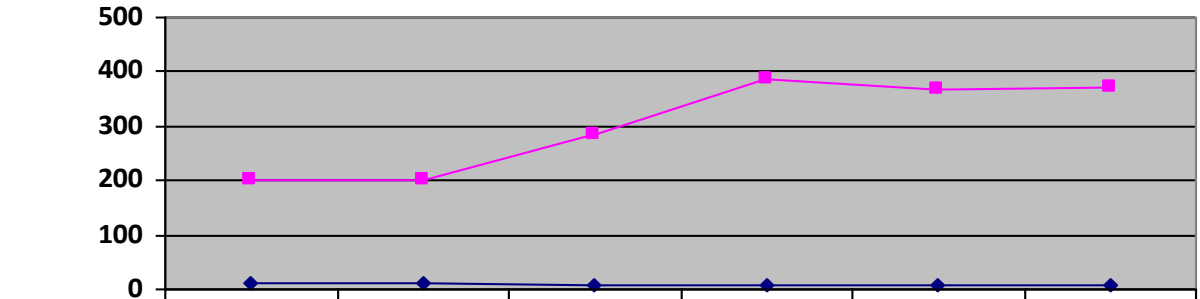

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PMDN	11,99	10,29	6,7	6,73	8,3	8,7
PMA	199,54	200,86	285,7	386,3	366,1	370,99

Sumber Data : Dokumen LKPJ Bupati Kab. Asahan Periode 2019 - 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah investasi PMDN pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 10,29 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 6,7 triliun pada tahun 2021, namun mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 30 milyar dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 1,57 triliun dan 2024 sebesar 400 milyar hal ini dikarenakan terus bertambahnya Perusahaan PMDN di Kabupaten Asahan. Selain itu, jumlah investasi PMA cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, dari tahun 2020 sebanyak US$ 84,84 juta naik hingga mencapai US$ 370,99 juta pada tahun 2024. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2022 yaitu mencapai US$ 100,6 juta dari tahun sebelumnya. Namun di tahun 2023 justru terjadi penurunan sebesar yaitu sebanyak US$ 20,2 juta dengan jumlah investasi hanya US$ 366,1 juta. Namun demikian pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali sebesar US$ 4,48 juta dengan capaian sebesar US$ 370,99 juta.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergambar dari tabel berikut:

Gambar 3.9
Capaian Indikator Kinerja Realisasi Investasi PMA (Juta US $)

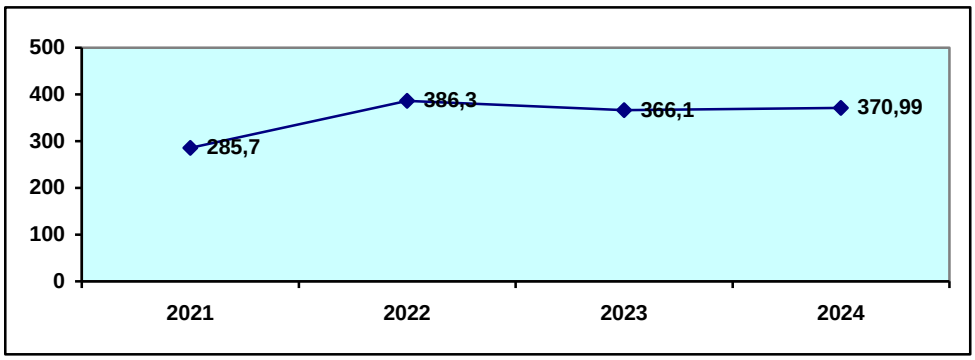

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Realisasi Investasi PMA (Juta US $)

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126,3	285,7	226,21	202,6	386,3	190,71%	204,7	366,1	178,84%	390	370,99	95,12%

Sumber Data : Dinas PM&PTSP Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Realisasi Investasi PMA dari tahun 2021 sampai 2024 cenderung mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2021 sebesar 226,21% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 190,71% dan pada tahun 2023 sebesar 178,84% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 95,12%, hal itu disebabkan oleh dinaikkannya target PMA dari 207,7 menjadi 390 juta US$ pada tahun 2024. Kenaikan target dikarenakan pada tahun 2023 realisasi sudah mencapai 178,84%. Namun demikian pada tahun 2024 persentase capaian kinerja masih tergolong sangat tinggi dari target yang telah ditetapkan realisasi investasi PMA di kabupaten Asahan mencapai 370,99 juta US$. Adapun upaya yang terus dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Asahan yaitu terus melakukan sosialisasi agar perusahaan PMA memiliki kesadaran dan mau melaporan kegiatan usahanya dan melakukan pemantauan secara periodik kepada pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM.

Selanjutnya untuk capaian terhadap Indikator Realisasi Investasi PMDN dapat kita lihat dari Tabel berikut:

Grafik 3.10

Capaian Indikator Kinerja Realisasi Investasi PMDN (Triliyun Rupiah)

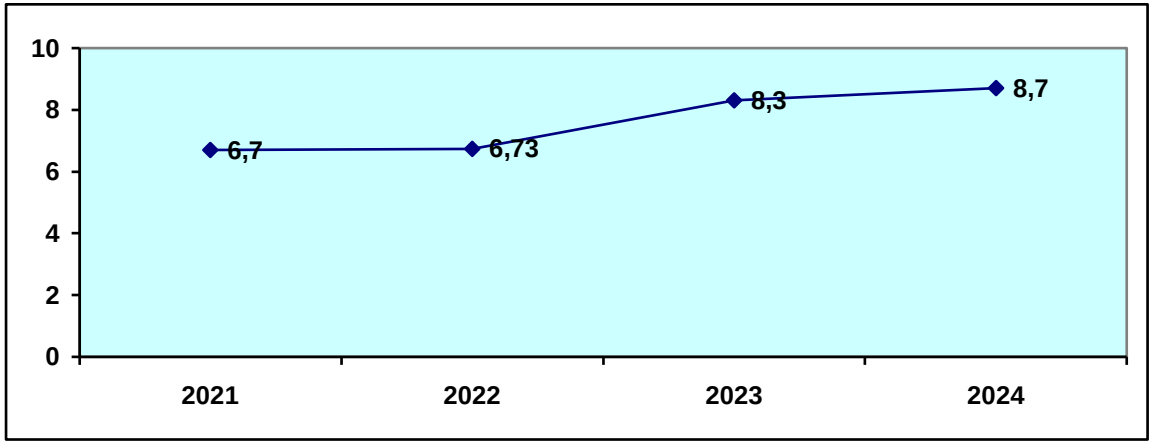

Tabel 3.29

Capaian Indikator Kinerja Realisasi Investasi PMDN (Triliyun Rupiah) sejak Tahun 2021 sd Tahun 2024

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
8,1	6,7	82,72	10,8	6,73	62,34	10,9	8,3	76,14	11,1	8,7	78,37%

Sumber Data : Dinas PM&PTSP Kab. Asahan (2024)

Dari tabel di atas terlihat bahwa Capaian kinerja pada indikator realisasi investasi PMDN pada tahun 2021 sebesar 82,72% dan mengalami penurunan capaian pada tahun 2022 yaitu sebesar 62,34%, namun pada tahun 2023 capaian indikator kinerja mengalami kenaikan yaitu sebesar 76,14% dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 78,37%, namun belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha PMDN untuk melaporkan kegiatan usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, pihat DPMPTSP terus melakukan sosialisasi agar perusahaan PMDN memiliki kesadaran dan mau melaporan kegiatan usahanya dan melakukan pemantauan secara periodik kepada pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian investasi PMDN / PMA ***tersebut antara lain:***

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Asahan yang Mendukung investasi di daerah:
    - Kebijakan pemerintah yang transparan, konsisten, dan pro-investasi sangat penting termasuk kemudahan dalam pengurusan perizinan dan perlindungan hukum bagi investor. Pengurusan perizinan saat ini sangat dipermudah dengan adanya Online Single Submission (OSS) dan juga siCantik Cloud. Kabupaten Asahan juga memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga memudahkan setiap pelaku usaha/investor dalam melakukan pengurusan perizinannya.

2. Infrastruktur yang Memadai:
    - Ketersediaan infrastruktur yang baik, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi, sangat penting untuk mendukung kegiatan investasi. Kabupaten Asahan merupakan wilayah yang strategis dalam pengembangan investasi, karena infrastruktur yang sudah sangat mendukung, seperti tersedianya jalan tol yang memperlancar konektifitas antar wilayah.

3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas:
    - Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas merupakan daya tarik bagi investor. Tenaga kerja yang terampil terutama di sektor industri yang membutuhkan keahlian khusus. Populasi penduduk juga besar, investor akan sangat mudah merekrut tenaga kerja, terutama untuk sektor perkebunan dan pertanian.

4. Potensi Pasar yang Besar:
    - Kabupaten Asahan memiliki pasar domestik yang besar dan berkembang merupakan daya tarik bagi investor yang ingin menjual produk atau jasa mereka.

5. Kepastian Hukum:
- Kepastian hukum yang adil dan transparan akan membuat investor merasa aman dalam melakukan investasinya. Kabupaten Asahan sangat berkomitmen dalam melindungi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Asahan, hal ini di dukung dengan adanya peraturan-peraturan daerah yang mendukung investasi dan juga melakukan harmonisasi produk hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam rangka mencapai investasi PMDN / PMA Pemkab. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Terus melakukan sosialisasi agar perusahaan PMDN dan PMA memiliki kesadaran dan mau melaporan kegiatan usahanya secara periodik kepada pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM.
2. Mengupayakan secara berkala melakukan pendampingan penyusunan LKPM yang masih menghadapi kendala dalam menyusun laporannya.

Gambar 3. 2
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indikator Kinerja Realisasi Investasi PMA / PMDN tahun 2025









DOKUMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA

Pengawasan dilakukan melalui penjadwalan di Akun OSS RBA yang kemudian dilakukan tindaklanjut dengan turun kelapangan. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. indikator pengawasan perizinan berusaha meliputi:

1. Standar dan kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha
2. Perkembangan realisasi penanaman modal
3. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk penanaman modal
4. Kewajiban kemitraan
5. Kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha
6. Kepatuhan pelaku usaha dalam perizinan berusaha berbasis risiko
7. Kesesuaian data informasi yang telah disampaikan pelaku usaha dengan keadaan yang sebenarnya

Kemudian untuk capaian Misi 5 dapat dilihat dari Tabel berikut:

MISI 5	**:**	**Meningkatkan Akurasi Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APBD yang Transparan dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat**
Sasaran 8	:	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD

Sasaran	**:**	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD

Sasaran Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD yang indikatornya Opini BPK adalah pendapat atau kesimpulan yang diberikan Oleh BPK terkait dengan kinerja dan keuangan suatu entitas, seperti

pemerintah, BUMD atau lembaga Lainnya. Opini BPK biasanya diberikan setelah melkukan pemeriksaan atas laporan keungan dan kinerja entitas tersebut. Disini kami sampaikan bahwa Kabupaten Asahan dalam waktu 10 tahun terakhir mendapatkan Opini WTP (wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 7 (tujuh) kali dan Wajar dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 3 (tiga) kali. Dan sejak tahun 2017 opni WTP (wajar Tanpa Pengecualian) diperoleh secara berturut turut sebanyak 7 (enam) kali sampai dengan tahun 2023

Sasaran Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 5 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatkan Akurasi Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat*". serta tujuan "*Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Penganggaran daerah*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.30
Pengukuran Capaian Sasaran 8

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Indikator Opini BPK	WTP	Masih Dalam Proses	Masih Dalam Proses		WTP	Opini BPK

13. Indikator Opini BPK

Grafik 3.11
Indikator Opini BPK

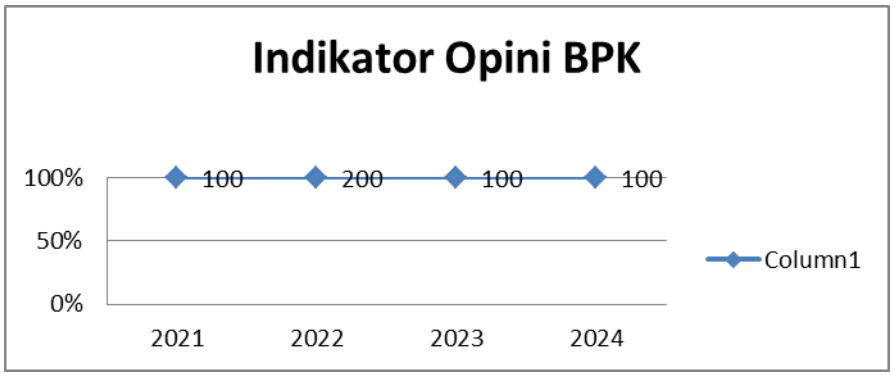

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikator penilaian pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan, terutama dalam fungsi keuangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 telah mengatur jika BPK memiliki kewenangan, antara lain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan merupakan tindakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai jika laporan keuangan yang telah disajikan tersebut wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adapun pemeriksaan keuanganyang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pembuatan laporan keuangan ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Opini BPK pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.31
Capaian Indikator Kinerja Opini BPK

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	Masih dalam proses	Masih dalam proses

Sumber Data : BKAD Kab. Asahan (2024)

Dari hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Asahan, diperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut turut (2017-2020). Opini WTP tersebut diperoleh apabila penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD memenuhi syarat, yaitu sistem pengendalian internal milik daerah memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya, disusun laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini sebagai bagian dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan oleh BPK. Sampai dengan Tahun 2024 Pemkab Asahan sudah 6 kali berturut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provsu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian opini WTP tersebut antara lain:

1. Dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Asahan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

2. Pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, selanjutnya konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan dengan baik.
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah melalui reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
4. BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah. Disamping hal itu untuk peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun.
5. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah disusun kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Kabupaten Asahan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan progam dan kegiatan pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yaitu BKAD Kabupaten Kabupaten Asahan dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah serta reviu dan pengawasan oleh APIP. Pada konteks SKPKD diadakan rekonsiliasi setiap bulan dengan perangkat daerah agar terjadi kesesuaian dalam penatausahaan keuangan.
6. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD 2023, dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
7. Pengelolaan aset dan persediaan dengan menggunakan instrumen aplikasi SIM Aset dan SIM Persediaan yang telah digunakan sejak tahun 2016.
8. Rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah sebagai upaya pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. telah dilakukan.
9. Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebagai instrumen aplikasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kabupaten Asahan. Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Upaya Menjaga Kosnsitensi terhadap Faktor yang mendukung keberhasilan laporan keuangan harus sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

Gambar 3.10
Raih Opini WTP 6 Kali Berturut – Turut, Bupati Asahan Terima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2022



Selanjutnya untuk capaian Misi 6 dilihat dari Tabel berikut:

MISI 6	**:**	**Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan**
Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Mayarakat

Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Mayarakat

Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Mayarakat merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, tenaga medis, serta partisifasi aktif masyarakata. Peningkatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama, seperti peningkatan fasilitasi kesehatan, ketersediaan tenaga medis yang kompeten, akses yang lebih muda terdapat layanan kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dalam dunia medis.

Pemerintah terus berupaya memperbaiki inprastruktur kesehatan, dengan membangun rumah sakit, puskesmas, dan klinik di berbagai darah,terutama di wilayah . Selainitu, tenaga kesehatan juga semakin ditinggkatkan kualitasnya melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan , sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik dan professional.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Mayarakat menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 6 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan" serta tujuan "*Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.32
Pengukuran Capaian Sasaran 9

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	58	33	175,76	Sangat Tinggi	83	251,51
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran Hidup	1	1,52	65,79	Sedang	1	65,79
3.	Angka Stunting	11,23	11	102,09	Sangat Tinggi	20	181,82

14. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu dan bayi merupakan dua indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan di suatu negara. Di Indonesia dua hal ini menjadi perhatian pemerintah karena angka kematian ibu dan bayi di Tanah Air masuk peringkat tiga besar di ASEAN. Angka Kematian Ibu (*maternal mortality rate*) merupakan jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan yang dijadikan indikator derajat kesehatan perempuan.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Gambar 3.12
Capaian Indikator Angka Kematian Ibu (AKI)
per 100.000 Kelahiran Hidup

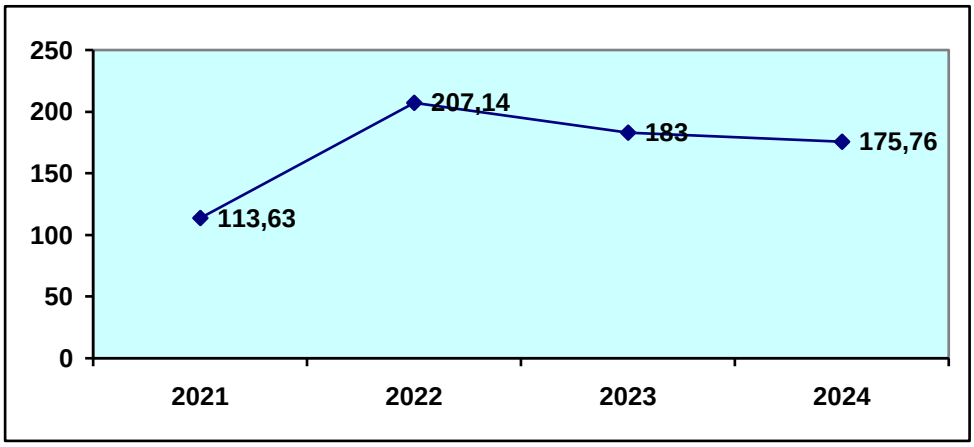

Tabel 3.33
Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

2021			2022			2023			2024	
get	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
4	1	195,83	116	56	207.14	108	68	183,00	58	33

Sumber Data : Dinkes Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian target Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 merupakan hal yang baik. Dari 58/100.000 Kelahiran Hidup (KH) AKI yang di targetkan, Dinas Kesehatan berhasil menurunkan AKI sampai 33/100.000 KH. Pencapaian target AKI ini sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan anggaran Rp.738.070.968,00 dan kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin yang juga mencapai target diatas 90% dengan anggaran Rp.42.606.000,00.

Kegiatan tersebut di atas merupakan kebijakan pusat yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Asahan berupa pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil yang dulunya hanya dilakukan empat kali kini diubah menjadi enam kali. Dua kali dalam enam pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi risiko komplikasi yang terjadi pada ibu hamil yang mungkin akan berdampak pada sang ibu dan bayi yang dikandungnya.

Selanjutnya adalah pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil yang wajib dikonsumsi satu kali dalam sehari. Ibu hamil yang memiliki penyakit anemia tidak hanya diberikan tablet tambah darah tapi juga dilakukan terapi untuk menanggulangi anemia. Adapun ibu yang mengalami kurang energi kronik (KEK) ketika mengandung akan diberikan makanan tambahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Angka Kematian Ibu (AKI) ***tersebut antara lain:***

- ✓ Menyusun Rencana Aksi Daerah dalam percepatan penurunan Angka Kematian Ibu;
- ✓ Menyalurkan pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);

- ✓ Pelaksanaan Surveilans Ibu dan Anak dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu;
- ✓ Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Bumil beresiko dan Kurang Energi Kronis (KEK)
- ✓ Pelaksanaan deteksi resiko Ibu Hamil “Pemeriksaan Glukoprotein Urin, Golongan Darah, Hb” dan Kelas Ibu Hamil
- ✓ Penguatan Puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat

AKI dapat dicegah dengan dilakukan upaya seperti berikut:

a. Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (Ante Natal Care/ ANC terpadu-10T);
b. Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (Peer Review Asuhan Persalinan Normal), Kelas Ibu, kegawatdaruratan;
c. Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
d. Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
e. Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja I (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulan Desa);
f. Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus emergency/ rujukan darurat persalinan;
g. Melakukan pengkajian dan pembelajaran Audit Maternal Perinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
h. Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di wila

Gambar 3. 11
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2025

	
Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil	Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN, Kelas Ibu
	
Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan	Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dalam Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/ dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan diperoleh informasi sebagai berikut :

Dari data di atas terlihat bahwa Pemkab Asahan berada di urutanke-7 dari 33 Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera utara dengan Skor Nilai 2,54 dengan status Rendah.

Adapun Capaian Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 dapat dilihat dari data berikut:

15. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun).

Adapun Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Anak (AKB) pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.34
Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
0	0	0	1	1	100,00%	1	1	100,00 %	1	1,52	69,79

Sumber Data : Dinkes Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 tidak mencapai target yaitu 1,52/1000 Kelahiran Hidup dengan target 1/1000 kelahiran dengan capaian 69,79% mengalami kenaikan angka kematian di banding dengan tahun 2023.

Penurunan AKB di Pemerintah Kabupaten Asahan didukung karena semakin sadarnya orang tua untuk memberikan imunisasi kepada balita dan memberikan ASI saat tumbuh kembang bayi, peningkatan persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap, peningkatan rata-rata lama pemberian ASI, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup perempuan berdampak pada anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup.

Upaya untuk menekan Angka Kematian Bayi, dengan melaksanakan program-program, antara lain :

a. Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;

b. Adanya rujukan dini berencana, maksudnya dari persalinan yang bermasalah (mulai ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko dan neonatus beresiko) dilakukan monitoring evaluasi untuk kemudian dirujuk ke RS;
c. Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;
d. Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian neonatal;
e. Pemberian pelayanan Ante Natal Care (ANC) terpadu (10 T);
f. Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

Selanjutnya untuk Capaian Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 dapat dilihat dari data berikut:

16. Indikator Angka Stunting

Dari segi kesehatan, WHO menggunakan indikator untuk menentukan apakah seorang anak mengalami stunting. Indikator stunting adalah pengukuran yang membantu mendeteksi dan mengukur stunting pada anak, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

Untuk mengidentifikasi anak yang mengalami stunting, WHO pun menggunakan indikator Tinggi Badan untuk Umur (TB/U) anak dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Seorang anak mengalami stunting jika Tinggi Badan untuk Umur anak berada di bawah minus 2 standar deviasi atau kurang dari persentil ke-2 dari median referensi pertumbuhan WHO.
- ✓ Seorang anak disebut mengalami stunting parah jika Tinggi Badan untuk Umur anak berada di bawah minus 3 standar deviasi atau kurang dari persentil ke-1 dari median referensi pertumbuhan WHO.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.35

Capaian Indikator Kinerja Angka Stunting

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
0	0	0	27	15.3	176.47%	26	15	169,93 %	11,23	11	102,09

Sumber Data : Dinkes Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian target angka stunting pada tahun 2024 juga hal yang sangat baik, dari targetnya 26 angka stunting yang dapat dicapai pada tahun 2024 yaitu 15,3. Pencapaian target angka stunting ini sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024, yaitu kegiatan pelayanan gizi masyarakat yang juga mencapai target 100% dengan anggaran sebesar Rp.8.218.598.484,00 Sebagian besar anggaran gizi masayarakat di prioritaskan pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil.

Angka Stunting di Kabupaten Asahan pada tahun 2022 mengalami penurunan. Penurunan angka stunting ini berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, dimana pada tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Asahan sebesar 18,9 % dan pada tahun 2022 menjadi 15,3 %.

Faktor – faktor Keberhasilan dalam mencapai indikator angka stunting yaitu :

1. Pemenuhan gizi ibu hamil dan anak di bawah 5 tahun.
2. Pemberian asi eksklusif selama 6 bulan dam MPASI yang bergizi seimbang
3. Akses terhadap makanan bergizi seimbang
4. Penyuluhan bagi masyarakat terkait pentingnya gizi masyarakat 1.00 har pertama kehidupan

Pencapaian target angka Stunting di atas, dilakukan Pemkab dengan melakukan intervensi sejak dini agar kondisi stunting dapat dicegah. Dengan mengenali penyebab dari segi kesehatan terkait masalah stunting, ibu bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah stunting pada anak, antara lain:

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting antara lain:

1. Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Rematri
2. Pemeriksaan Kesehatan pada calon pengantin
3. Pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin/ibu
4. Antenatal Care pada ibu hamil,
5. Ibu hamil kek mendapatkan PMT,
6. Ibu hamil mendapatkan TTD 90 tablet
7. ASI EKsklusif (0-6 bulan)
8. MPASI 6-23 bulan
9. Tatalaksana Balita Gizi Buruk
10. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan pada Balita
11. Pemberian PMT pada Balita Gizi Kurang
12. Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap
13. STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
14. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
15. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting
16. Mengaktifkan kader pendamping ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) cegah stunting;
17. Pemberdayaan masyarakat (toga, kader lansia, toma) deteksi dini percepatan penurunan stunting dengan lebih aktif dating ke posyandu;
18. Mengaktifkan konseling PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak).

19. Melanjutkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita dan Ibu Hamil,
20. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamiL,
21. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita,
22. Pemberian vitamin A

Selanjutnya untuk capaian Misi 7 dapat dilihat dari Tabel berikut:

MISI 7	**:**	**Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dan Daya Dukung Generasi Muda Yang Melek Teknologi Dan Budaya Literasi Tinggi**
Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Peran Generasi Muda Melek Teknologi

Sasaran 10	**:**	**Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Peran Generasi Muda Melek Teknologi**

Peningkatan kualitas pendidkan di era digital saat ini sangat dipengaruhi oleh peran generasi muda yang melek teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam proses belajar-mengajar, menjadikannya lebih interaktif, fleksibel, dan muda diakses.

Teknologi telah mengubah cara pendidikan disampaikan dan diterima. Dengan adanya platform e-learning, wbiner, dan media social pendidikan, siswa dapat mengakses berbagai sumber beajar dari seluruh dunia tanpa batasan geigrafis

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Peran Generasi Muda melek Teknologi menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 7 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Daya Dukukun Generasi Muda yang Melek teknilogi dan Buda Literasi Tnggi*" serta tujuan "*Meningkatkan Pendidikan yang unggul dan berkualitas serta peran generasi muda*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.36
Pengukuran Capaian Sasaran 10

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	APK PAUD	70.07	61,81	88,22	Tinggi	70,15	99,87
2.	APM SD	99,7	99,97	100,27	Sangat Tinggi	99,72	99,98
3.	APM SMP	82,98	83,02	100,05	Sangat Tinggi	83,4	99,50
4.	Persentase SMP Yang Memilik Ruang Baca Digital	51,00	51,34	100,67	Sangat Tinggi	60,00	85,00

17. Indikator APK PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan.

Grafik 3.13
Capaian APK PAUD

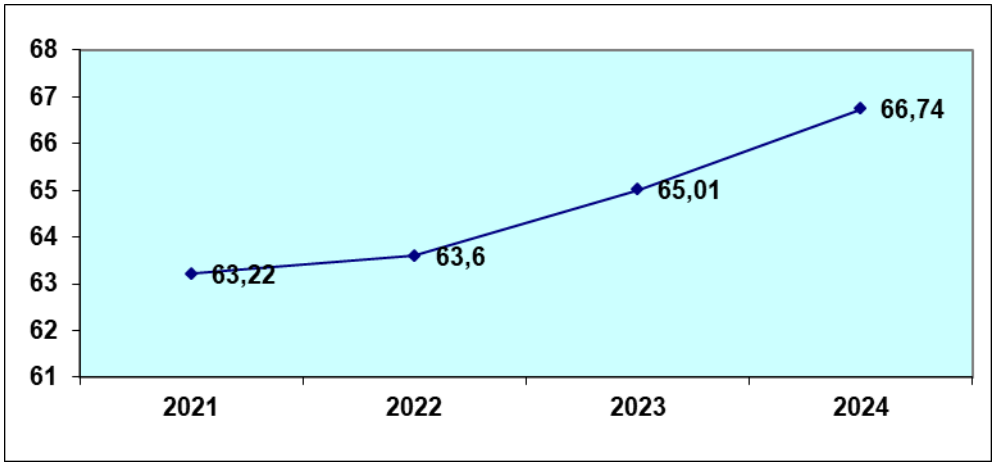

Capaian Kinerja Indikator APK PAUD secara terpisah dari Angka Pastisipasi Kasar pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja APK PAUD

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
64,40	69,91	108,56	64,60	69,96	108,30	70,02	70,11	100,13	70.07	61,81	88,22

Sumber Data : Dikjar Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa APK PAUD tahun 2024 capaian 88,22 % menurun dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 100,13%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian* APK PAUD *tersebut antara lain:

1. Pendapatan keluarga berperan penting dalam kemampuan mereka untuk mengakses layanan PAUD. Keluarga dengan pendapatan rendah mungkin kesulitan membiayai pendidikan anak usia dini, sehingga menurunkan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang Pendidikan PAUD.
2. Tingkat pendidikan orang tua dan pandangan masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini. Kurangnya pemahaman tentang manfaat PAUD dapat mengurangi minat orang tua untuk menyekolahkan anak mereka pada usia dini.
3. Keterbatasan jumlah dan kualitas fasilitas PAUD, seperti taman kanak-kanak (TK), Kelompok Belajar (KB), serta distribusinya yang tidak merata, dapat menghambat aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini serta masih ada beberapa Desa kekurangan fasilitas PAUD yang memadai.
4. Kualifikasi dan kompetensi guru PAUD memengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Guru yang berkualitas dapat meningkatkan minat dan motivasi anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan usia dini.

Dalam rangka mencapai target **APK PAUD Pemkab**. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana PAUD terutama di daerah yang jauh dari jangkauan Masyarakat
2. Menerapkan program "Satu Desa Satu PAUD" untuk memastikan setiap desa memiliki akses ke pendidikan anak usia dini
3. Melaksanakan pelatihan berjenjang dan diklat untuk pendidik PAUD guna meningkatkan kompetensi mereka, Memberikan insentif kepada pendidik PAUD untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini serta Melibatkan Bunda PAUD mulai dari Kabupaten sampai desa/kelurahan sebagai motor penggerak gerakan PAUD berkualitas

Gambar 3. 12
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Angka PAUD tahun 2025



Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD



Sosialisasi Pendirian Satuan Pendidikan PAUD dan Akreditasi PAUD dan PNF





Selanjutnya untuk Capaian Indikator APM SD dapat dilihat dari data berikut:

18. Indikator APM SD

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Adapun Capaian Kinerja Indikator APM SD pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Grafik 3.14
Capaian APM SD

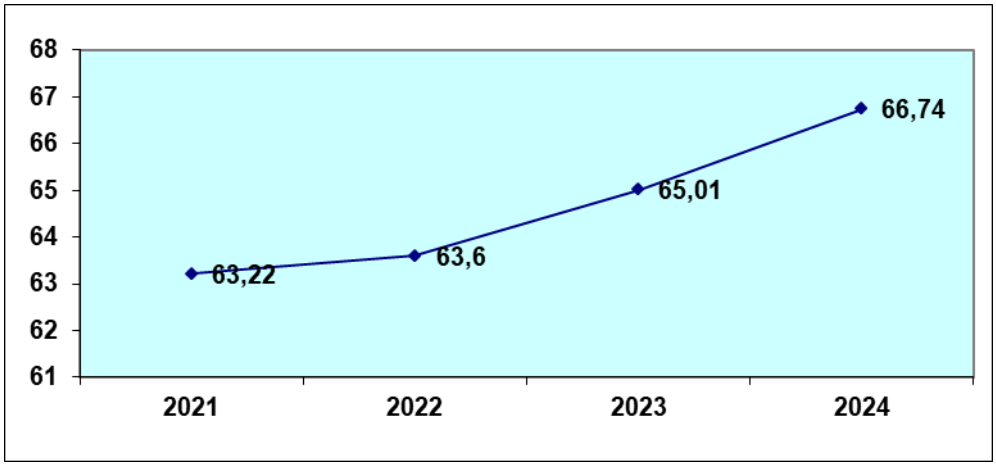

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja APM SD

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
111,57	105,31	94,499	111,67	106,59	95,46	99,69	99,71	100,02	99,7	99,97	100,27

Sumber Data : Dikjar Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa APM SD tahun 2024 capaian 100,02 % meningkat dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 97,84 %

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian APM SD tersebut antara lain:

1. Kemampuan mengajar yang sesua dengan kebutuhan siswa.
2. Kesesuaian kurikulum denga standar kompetensi yang diukur dalam APM
3. Ketersediaan fasilias pembelajaran seperti buku, alat peraga, dan teknologi pendukung.
4. Minat belajar dan dukungan dari lingkungan sekolah
5. Keterlibatan orang tua dalam mendukung proses belajar anak.
6. Tingkat Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan

upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target APM SD Pemkab. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah di daerah terpencil atau tertinggal, menyediakan sekolah satu atap (SD-SMP) di daerah dengan keterbatasan akses, mengembangkan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, Memperluas akses ke pendidikan berbasis teknologi seperti sekolah digital atau pembelajaran daring.
2. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai operasional sekolah agar bebas biaya melaksanakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu serta Penyediaan perlengkapan sekolah gratis.
3. melksanakan berbagai sosialisasi seperti kampanye pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anak kepada masyarakat serta keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan melalui program parenting dan sosialisasi di daerah dengan angka putus sekolah tinggi.
4. Melaksanakan bimbngan teknis dan pelatihan guru secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar kemudian melakukan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan berbasis keterampilan hidup serta meningkatkan ketersediaan buku dan alat bantu belajar yang memadai.

Gambar 3.13 Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas





Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN))





Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Kompetisi Siswa Nasional (KSN))

Selanjutnya untuk Capaian Indikator APM SMP dapat dilihat dari data berikut:

19. Indikator APM SMP

Adapun Capaian Kinerja Indikator APM SMP pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.39
Capaian Indikator Kinerja APM SMP

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
71,16	69,55	97,74	71,35	69,89	97,96	82,95	83,09	100,17	82,98	83,02	100,05

Sumber Data : Dikjar Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa APM SMP tahun 2024 capaian 100,17 % meningkat dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 97,96%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian APM SMP tersebut antara lain:

1. Meningkatkan sarana prasarana Pembangunan sekolah baru di daerah terpencil seperti diKecamatan Rahuninng yaitu SMP Negeri 2 Rahuning kemudian Program SMP Satu Atap serta Penggunaan teknologi yang maksimal untuk terutama untuk melaksanakan ANBK pendidikan jarak jauh.
2. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan meningkatkan dukungan keluarga dalam memastikan anak tetap sekolah dengan melaksanakan sosialisasi parenting serta penting nya menghindari perundungan terhadap siswa ataupun orang tua dan kekerasan sesksual terhadap anak.
3. Jarak ke sekolah daerah terpencil yang jauh dari masyarakat dapat mengurangi minat anak-anak dalam pendidikan, Ketersediaan fasilitas Pendidikan yang layak Sekolah yang tidak memiliki ruang kelas yang memadai, toilet yang layak serta air bersih kemudian Kondisi infrastruktr jalan dan transportasi Jalan yang buruk atau biaya transportasi yang jarang

Dalam rangka mencapai target APM SMP. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membiayai operasional sekolah agar bebas biaya melaksanakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu serta Penyediaan perlengkapan sekolah gratis.
2. Merehabilitasi dan memelihara sarana dan prasarana sekolah di daerah yang dibutuhkan serta menyediakan sekolah satu atap Sekolah Menengah Pertama di daerah dengan keterbatasan akses, mengembangkan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, Memperluas akses ke pendidikan berbasis teknologi seperti sekolah digital atau pembelajaran daring.
3. melaksanakan berbagai sosialisasi seperti kampanye pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anak kepada masyarakat serta keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan melalui program parenting dan sosialisasi di daerah dengan angka putus sekolah tinggi.

4. Melaksanakan bimbngan teknis dan pelatihan guru secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar kemudian melakukan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan berbasis keterampilan hidup serta meningkatkan ketersediaan buku dan alat bantu belajar yang memadai.

Gambar 3. 14
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target APM SMP tahun 2025

 	 
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Gala Siswa Indonesia)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Kompetisi Olahraga Siswa Nasiona)

Selanjutnya untuk Capaian Indikator Persentase SMP yang memiliki ruang baca Digital dapat dilihat dari data berikut:

20. Indikator Persentase SMP yang memiliki ruang baca Digital

Adapun Capaian Kinerja Indikator Persentase SMP yang memiliki ruang baca Digital pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.40
Capaian Indikator Kinerja Persentase SMP yang Memiliki Ruang Baca Digital

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
40,73	41,33	101,47	41,00	42,92	104,68	45,50	47,41	104,19	51,00	51,34	100,67

Sumber Data : Dikjar Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase SMP yang memilik ruang baca digital tahun 2024 capaian 104,19 % menurun dibandingkat tahun 2022 sebesar 104,68

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Kin**erja Persentase SMP yang Memiliki Ruang Baca Digital tersebut antara lain:**

1. Ketersediaan perangkat seperti computer , tablet, atau e-reader di sekolah.
2. Akses internet yang stabil dan cepaat untuk mendukung penggunaan sumber baca digital.
3. Pelatihan bagi guru dan pustakawan dalam penggunaan dan pengelolaan Ruang Baca digital
4. Kegiatan literasi sperti diskusi buku digital, resensi, atau proyek berbasis bacaan digital..

Dalam rangka mencapai target Kinerja Indikator Persentase SMP yang memiliki ruang baca Digital Pemkab. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan akses ruang baca digital tanpa biaya atau melalui subsidi internet bagi siswa kurang mampu, memastikan platform ruang baca bisa diakses melalui berbagai perangkat (HP, tablet, laptop), Menggunakan tampilan yang menarik dan mudah digunakan oleh siswa, Menambahkan fitur pencarian yang memudahkan siswa menemukan buku favorit mereka dan memberikan pelatihan literasi digital bagi siswa dan guru agar mereka lebih terbiasa menggunakan ruang baca digital mengadakan sesi demo atau workshop untuk memperkenalkan fitur-fitur yang tersedia.
2. Guru dapat memberikan tugas berbasis ruang baca digital untuk mendorong penggunaannya Orang tua diajak untuk mendukung anak-anak mereka dalam menggunakan bahan bacaan digital di rumah, Mengadakan seminar atau webinar bagi siswa dan orang tua tentang pentingnya literasi digital dan menampilkan testimoni siswa yang sukses memanfaatkan ruang baca digital.
3. Melakukan pendataan sekolah yang belum memiliki Laboratorium Komputer dan mengusulkan pada APBD untuk pembangunannya serta melaksanakan pengadaan laptop dan peralatan TIK melaui sumber dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pendidika maupun dari APBD Pemerintah Kabupaten Asahan.

Selanjutnya untuk capaian Misi 8 dapat dilihat dari Tabel berikut:

MISI 8	**:**	**Mendorong Terciptanya Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat**
Sasaran	:	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum di Masyarakat

21. Indikator Cakupan Penyelesaian Penanganan Gangguan Trantibum Daerah

Adapun Capaian Kinerja Indikator Cakupan Penyelesaian Penanganan Gangguan Trantibum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.41
Capaian Indikator Kinerja Cakupan Penyelesaian
Penanganan Gangguan Trantibum Daerah

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100

Sumber Data : Satpol PP Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa Capaian kinerja Persentase penyelesaian penanganan gangguan trantibum daerah tahun 2022 dan tahun 2024 realisasinya sebesar 100%.

Sasaran 10	:	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum di Masyarakat

Keamanan dan ketertiban umum merupakan factor fundamental dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, kondusip, dan mendukung aktifitas sosial serta ekonomi masyarakat. Dalam beberpa waktu terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban umum semakin terasa dengan berkurangnya angka kriminalitas, meningkatan kesadaran hukum di masyarakat, serta semakin kuatnya sinergi antara aparat keamanan dan warga.

Sasaran meningkatnya keamanan dan ketertiban umum dimsyarakat. menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 8 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat"* serta tujuan "*kondusivitas daerah*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.42
Pengukuran Capaian Sasaran 11

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	**Cakupan Penyelesaian Penanganan Gangguan Trantibum Daerah**	100	100	100	Sangat Tinggi	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Nilai Cakupan penyelesaian penanganan gangguan trantibun daerah tersebut antara lain:

1. Jumlah dan kopetensi personel Satpol PP yang memadai
2. Ketersedaaan sarana dan prasarana operasional, seperti kendaraan patrol dan system komunikasi.
3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam menangani gangguan trantibun secara professional dan humanis.
4. SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas dala penanganan gangguan ketertiban.Mekanisme respon cepat dalam menangani laporan gangguan ketertiban.
5. Penyelesaian masalah secara persuasive sebelum tindakan represif dilakukan.

Dalam rangka mencapai target ***pencapaian Nilai Cakupan penyelesaian penanganan gangguan trantibun daerah*** yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

- Senantiasa melaksanakan kegiatan deteksi dini,
- Pembinaan dan penyuluhan,
- Pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan,
- Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan
- Dilaksanakannya penanganan dan penindakkan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum terhadap unjuk rasa dan kerusuhan massa melalui penertiban dan penanganan berdasarkan perda dan perkara.

Selanjutnya untuk capaian Misi 9 dapat dilihat dari data berikut:

MISI 9	**:**	**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berorientasi Mendukung Produktivitas Dan Pengembangan Kawasan Strategis**
Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur yang Baik

Sasaran 11	**:**	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang baik**

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata merupakansalah satu kunci utama dalam mendorong partum uhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah dan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur telah menjadi prioritas utama pemerintah, yang tercermin dalama berbagai proyek pembangunan jalan, jembatan, fasilitas transportasi, energy, serta infrastruktur digital.

Secara kuantitatif, bertambahnya jumlah jalan yang terhubung, jaringan listrik yang menjangkau daerah terpencil,serta ekspansi infrastruktur telekomunikasi menunjukkan kemjuan yang signifikan. Sementara itu, dari sisi kualitas, pembangunan infrastruktur kini lebih memperhatikan espek keberlanjutan, daya tahan, serta pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaannya.

Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, mobilitas masyarakat semakin lancer, konektivitas antarwilayah semakin kuat, dan akses terhadap layanan public menjadi lebih muda. Selain itu, pertumbuhan investasi dan pengembangan sektor industri juga semakin terdorong, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan dalam pemerataan pembangunan insfrastruktur masih perlu terus diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya semakin luas cakupannya membersihkan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat

Dengan komitmen yang kuat, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik akan terus berlanjut, mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi`

Sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang baik** menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 9 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatkan kualitas pembangunan insprastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pembangunan kawasan strategis,*" serta tujuan "*Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.43
Pengukuran Capaian Sasaran 12

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Indikator Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	41,00	36,18	88,24	Tinggi	50	72,36

22. Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Indikator Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan yang memiliki Pagu Anggran bersumber dari DAU dan DAK. Dari segi kondisi jalan, terdapat klasifikasi meliputi kondisi baik, sedang, rusak sedang, rusak, dan rusak berat.

Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik berikut:

Grafik 3.15
Panjang Jalan berdasarkan Kondisi

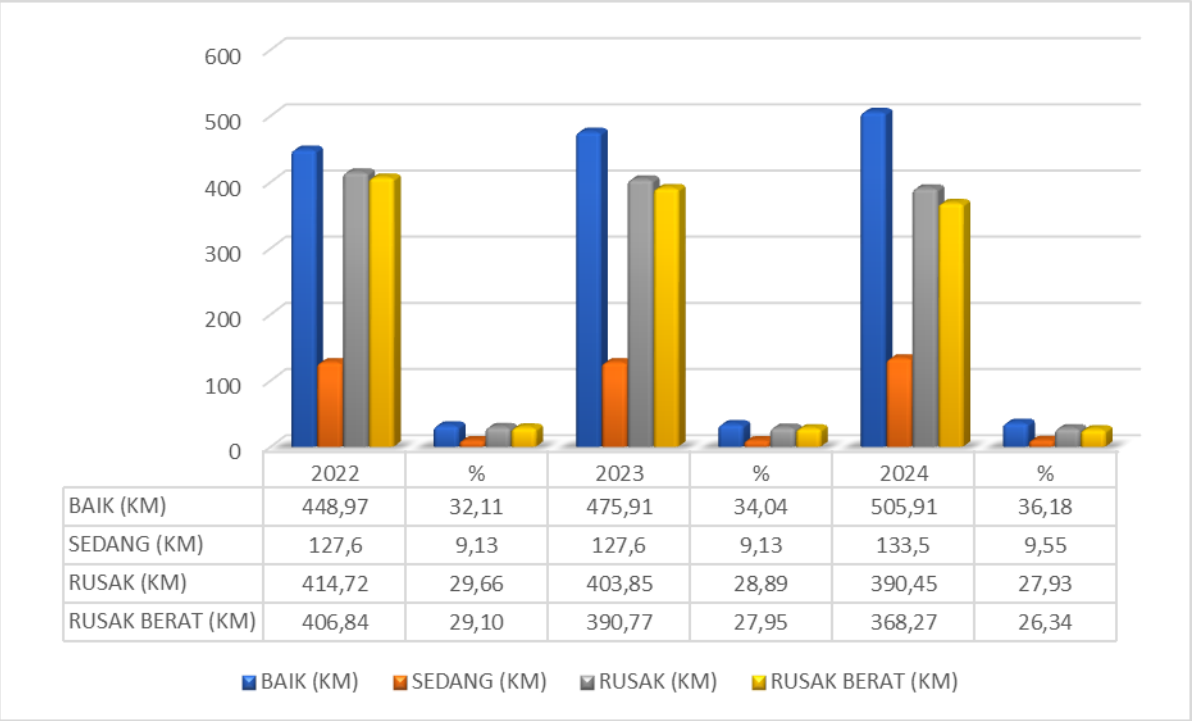

	2022	%	2023	%	2024	%
BAIK (KM)	448,97	32,11	475,91	34,04	505,91	36,18
SEDANG (KM)	127,6	9,13	127,6	9,13	133,5	9,55
RUSAK (KM)	414,72	29,66	403,85	28,89	390,45	27,93
RUSAK BERAT (KM)	406,84	29,10	390,77	27,95	368,27	26,34

Sumber Data : PUTR Kab. Asahan (2024)

Adapun Capaian Kinerja Indikator Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.44
Capaian Indikator Kinerja Proporsi Panjang Jaringan
Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
41	30,24	73,24	33,00	32,11%	97,31	37	34,04	92,00	41,00	36,18	88,24

Sumber Data : PUTR Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut di atas terlihat bahwa Indikator Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan yang memiliki Pagu Anggran bersumber dari DAU dan DAK dan DBH. Panjang Jalan Kabupaten Asahan sebesar 1398,13 km dengan Kondisi Baik sebesar 505,91 km atau 36,18%. Kondisi ini meningkat dari tahun 2023 sebesar 1,93. Peningkatan ini juga karena adanya dukungan kegiatan Pembangunan jalan kabupaten yang ditangani oleh Kementerian PUPR sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2024 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan **Kinerja Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik** ***tersebut antara lain:***

8. Pendanaan dan Anggaran: Ketersediaan dana yang memadai untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan sangat penting. Sistem anggaran tahunan yang tidak fleksibel sering menjadi kendala dalam mempertahankan/menambah jalan Kabupaten dalam kondisi baik.

9. Adanya Manajemen Jalan dalam Pembangunan: Penerapan sistem manajemen jalan yang efektif, seperti *Kabupaten Road Management System* (KRMS), dapat meningkatkan kondisi jalan.
10. Beban Lalu Lintas: Beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan *(overloading)* dapat mempercepat kerusakan jalan.
11. Kondisi Lingkungan: Faktor lingkungan seperti curah hujan tinggi, banjir, dan kondisi tanah dapat memengaruhi daya tahan jalan.
12. Kualitas Material dan Konstruksi: Penggunaan material berkualitas rendah atau metode konstruksi yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan jalan cepat rusak.
13. Pengawasan dan Evaluasi: Kurangnya pengawasan selama proses pembangunan dan evaluasi berkala terhadap kondisi jalan dapat menghambat keberhasilan

Dalam rangka mencapai target Kinerja Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik, Dinas PUPR Kabupaten Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah:

1. Mengusulkan pembangunan Jalan Kabupaten melalui sumber pendanaan lainnya seperti DAK, Dana Inpres, DBH, BKP, dll.
2. Melakukan survey inventarisasi dan kondisi jalan dan jembatan kabupaten dalam rangka pelaksanaan penerapan aplikasi PKRMS *(Provincial and Kabupaten Road Management System)* sehingga ada sistem manajemen jalan untuk memantau kondisi jalan dan merencanakan perbaikan secara lebih efisien.
3. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk pembuatan Portal Jalan agar kendaraan yang lintas tidak melebihi kapasitas.
4. Menyesuaikan pembangunan jalan terhadap kondisi lingkungan setempat, yaitu menggunakan material Readymix atau Hotmix
5. Menggunakan material berkualitas yang memenuhi standar teknis dalam pembangunan jalan. Seperti untuk pembangunan Jalan Kabupaten menggunakan Mutu Beton K-300 s/d K-350 dengan ketebalan 25 cm.

6. Melakukan pengawasan pembangunan jalan dengan melibatkan Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disetiap Kecamatan.

Gambar 3.15

Dokumentasi Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja Proporsi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

 Desk Pengusulan Pembangunan Jalan Kabupaten menggunakan dana DAK dengan Kementerian Pekerjaan Umum	 Peninjauan Pembangunan Jalan Kabupaten oleh Bapak Wakil Bupati Asahan, Kepala Dinas PUTR dan Kepala Bapperida
 Pembangunan Jalan dengan Hotmix	 Pembangunan Jalan dengan Cor Beton Readymix

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/ dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan diperoleh informasi

Selanjutnya untuk capaian Misi 10 dapat dilihat dari informasi berikut:

MISI 10	**:**	**Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas, Berkelanjutan Dan Bernilai Ekonomis**
Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan Dan Pemanfaatan Potensi Ekonomis Lingkungan Hidup

Sasaran 12	**:**	**Meningkatnya** Kualitas Air, Udara, Lahan Dan Pemanfaatan Potensi Ekonomis Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan, seiring dengan berbagai upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, kualitas air, udara, dan lahan mengalami perbaikan yang signipikan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan dari sektor lingkungan.

Peningkatan kualitas air tercermin dari berkurangnya pencemaran sungai, danau, dan sumber air tanah akibat kebijakan pengelolaan limbah yang lebih ketat serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Upaya rehabilitasi ekosistem perairan juga semangkin ditingkatkan untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Sasaran meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 10 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis*" serta tujuan "*Meningkatkan Kualitas dan kelestarian lingkungan hidup*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.45
Pengukuran Capaian Sasaran 13

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Indeks Air	52,90	56,57	110,71	Sangat Tinggi	54,59	107,29
2.	Indeks Udara	87,53	87,21	99,63	Sangat Tinggi	88,67	98,35
3.	Indeks Kualitas Lahan	41,93	33,20	79,17	Tinggi	61,79	53,73
4.	Persentase RTH	40	12,78	31,95	Rendah	-	-

23. Indikator Indeks Air

Indeks Kualitas Air berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 dihitung dengan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Air pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Grafik 3.16

Capaian Indikator Kualitas Air

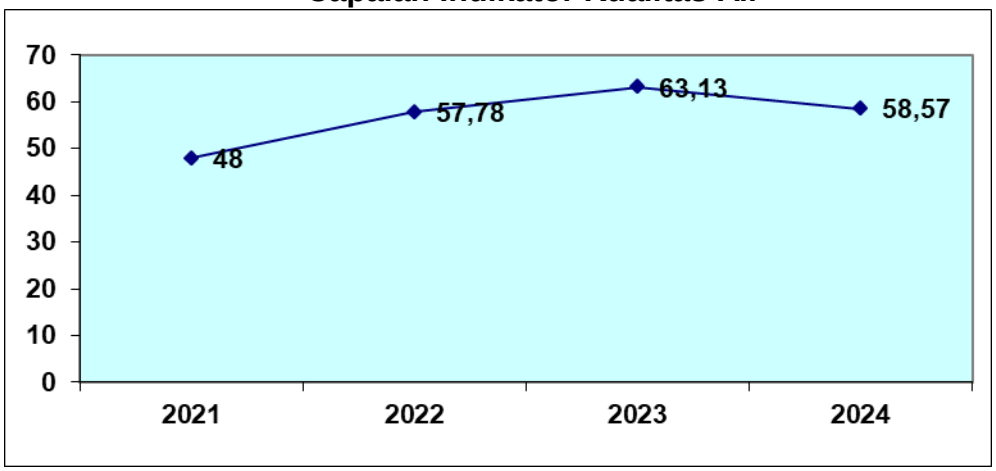

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Air pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.46
Capaian Indikator Indeks Air

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
			52,70	57,78	109,63	52,80	63,13	119,56	52,90	56,57	110,71

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa Capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dengan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan pada Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut pada tahun 2024 dari target 52,90% telah terealisasi 58,57% atau capaiannya sebesar 110,71%;

Walaupun capaiannya sudah melebihi 100% tetap perlu adanya upaya dalam meningkatkan kualitas air yaitu :

1. Pengelolaan limbah: Mengelola limbah secara efisien dan bertanggung jawab, baik itu limbah industri maupun domestik, untuk mencegah pencemaran air;
2. Edukasi dan kesadaran masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air;
3. Pengawasan dan regulasi yang ketat: Menerapkan regulasi yang ketat dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya serta limbah industri untuk mencegah pencemaran air;
4. Kolaborasi lintas sektor: Melibatkan berbagai pihak, termasuk industri, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas air dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam rangka mencapai target Indikator Kualitas Air Pemkab . Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan terlaksananya pengujian terhadap media air dan Media Udara

Gambar 3.16

Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indikator Kualitas Air tahun 2025

	
melaksanakan kalibrasi alat onlimo (sistem pemantauan kualitas air sungi secara otomatis, kontinyu dan online)	Bersama dengan operator onlimo melihat pipa yang menuju ke sungai yang tersumbat
	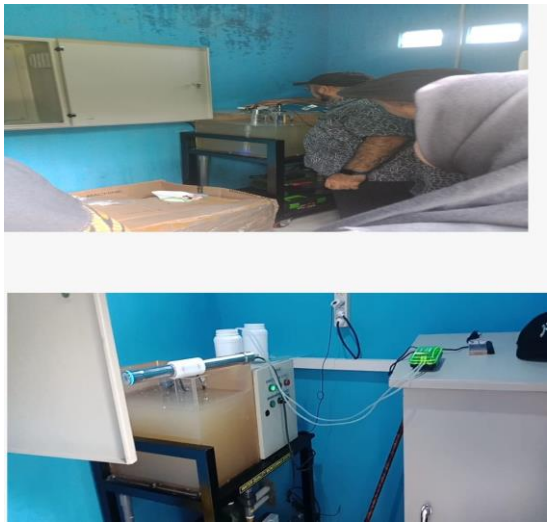
Melaksanakan monitoring rutin untuk seluruh kinerja sistem sensor onlimo yang terintergrasi dengan data logger	Melakukan peninjauan lokasi ke stasiun ONLIMO bersama Operator ONLIMO

Selanjutnya untuk capaian Indikator Indeks Udara dapat dilihat dari data berikut:

24. Indikator Indeks Udara

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat digambarkan dengan Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat. Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:

1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau
2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan

Indeks Kualitas udara (IKU) dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan passive sampler. Namun, pemantauan pada Roadside secara manual aktif dan AQMS pun tetap dilakukan untuk mengetahui kecenderungan perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil pengukuran dengan metode passive sampler dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Udara pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Grafik 3.17

Capaian Indikator Indeks Udara

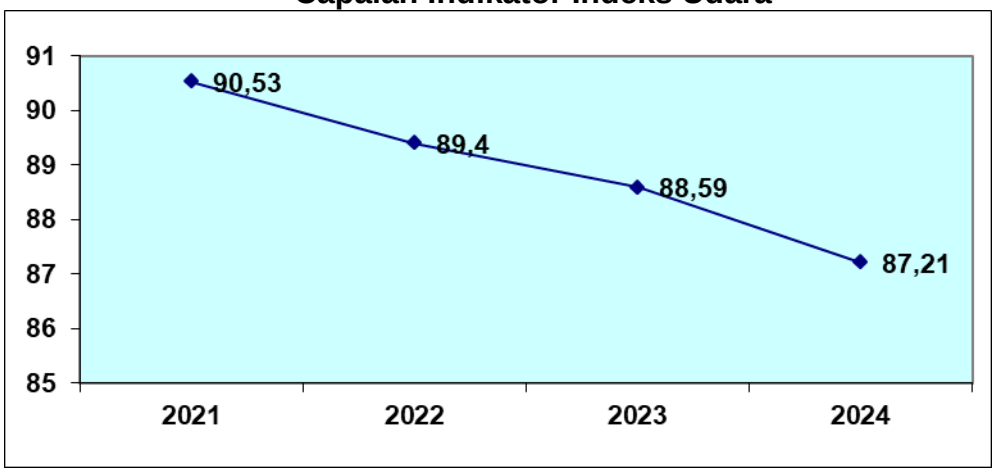

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Udara pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.47
Capaian Indikator Indeks Udara sejak Tahun 2021 sd Tahun 2024

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
			87,33	89,40	102,37	87,43	88,59	101,44	87,53	87,21	99,63

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan pada Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut pada tahun 2024 dari target 87,53% telah terealisasi 87,21% atau capaiannya sebesar 99,63%.

Perlu adanya upaya dalam peningkatan kualitas udara di Kabupaten Kabupaten Asahan khususnya dibeberapa titik industri :

1. Pengendalian polusi udara: Mengurangi emisi dari sumber-sumber polusi utama seperti industri, transportasi, pembangkit listrik, dan pembakaran sampah.
2. Promosi transportasi ramah lingkungan: Menggalakkan penggunaan transportasi umum, berbagi kendaraan, dan transportasi berbasis non-motor untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor.
3. Penghijauan perkotaan: Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau, taman kota, dan pelestarian lahan terbuka untuk menyerap polusi udara dan menyediakan sumber oksigen yang lebih baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian* Indikator Indeks Udara *tersebut antara lain:

1. Meningkatnya jumlah kendaraan yang menimbulkan tingginya tingkat emisi
2. Meningkatnya proses produksi dan pengolahan limbah industry menghasilkan tingginya polutan
3. Wilayah yang padat penduduk menyebabkan kualitas udara yang buruk

Gambar 3. 17
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target **Indikator Indeks Udara** tahun 2025

	
Pemantauan meteran kandungan zat dalam udara alat AQMS	pergantian silica gel filter udara AQMS
	
Pembersihan sensor udara Alat AQMS	Pergantian kabel layar pantau kualitas udara alat AQMS

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/ dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 3.48
Skor dan Status Indikator Indeks Udara
terhadap 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kabupaten

No	Kabupaten / Kota	Skor	Status
1.	Kabupaten ----------	-------	Baik
334.	**Kabupaten Asahan**	**87,21**	**Baik**
514.	Kabupaten ----------	-------	Sangat Kurang

Sumber Data : Website KLHK IKLH (2024)

Dari Tabel di atas diketahui bahwa secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan berada pada posisi urutan ke 334 dengan Skor 87,21 dengan status Baik.

Sementara terhadap perbandingan Capaian Pemkab/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.49
Skor dan Status Indikator Indeks Udara
pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
berdasarkan urutan Kode Wilayah

.No	Kabupaten / Kota	Skor	Status
1.	Kabupaten ----------	------	Baik
31.	**Kabupaten Asahan**	**87,21**	**Baik**
33.	Kabupaten ----------	------	Sangat Kurang

Sumber Data : Website KLHK IKLH (2024)

Dari data di atas terlihat bahwa Pemkab Asahan berada di urutanke-31 dari 33 Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera utara dengan Skor Nilai 87,21 dengan status Baik.

Selanjutnya untuk capaian Indikator Indeks Kualitas Lahan dapat dilihat dari data berikut:

25. Indikator Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggambarkan kondisi penggunaan lahan di suatu wilayah. Kualitas tutupan lahan maksimal yang diharapkan adalah hutan dan apabila tidak digunakan untuk hutan, diharapkan lahan ditutupi oleh vegetasi sehingga fungsi ekologis dan hidrologisnya dapat terpenuhi.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lahan pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Grafik **3.18**

Capaian Indikator Indeks Kualitas Lahan

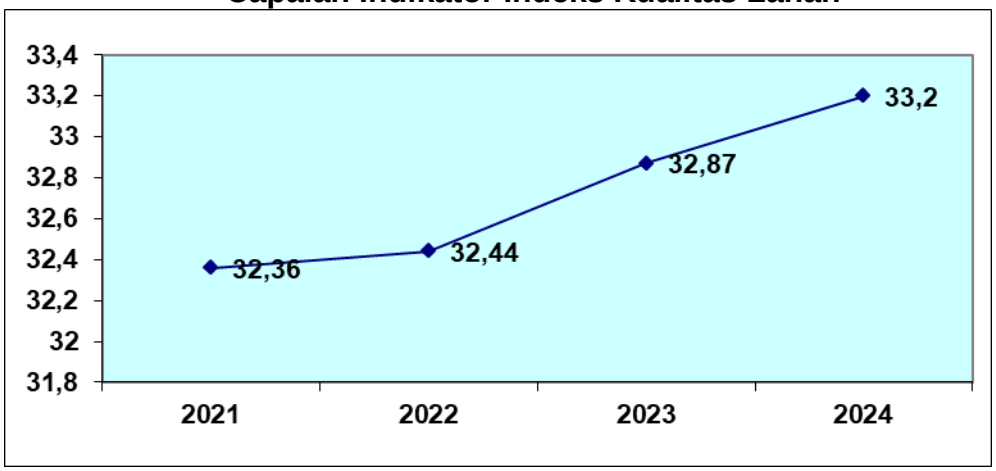

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lahan pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.50
Capaian Indikator Indeks Kualitas Lahan sejak Tahun 2021 sd Tahun 2024

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
			36,97	32,44	87,74	39,45	32,87	78,25	41,93	33,20	79,17

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa Capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan bahwa pada Tahun 2024 capaian kinerja meningkat dari tahun 2021.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan pada Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut pada tahun 2024 dari target 41,93% terealisasi sebesar 33,20% atau capaiannya sebesar 79,17%.

Permasalahan ketidak tercapaian masih sama dengan tahun – tahun sebelumnya, yaitu kurangnya area penghijauan tajuk ke tajuk. Sebenarnya pada tahun 2023 sudah banyak dilakukan revitalisasi taman, namun pepohonan yang ditanam masih belum memenuhi ketinggian tajuk. Solusi untuk peningkatan kualitas tutupan lahan, yaitu :

1. Menambah SDM atau memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk melakukan deliniasi RTH dengan mempertimbangkan karakter daerah Kabupaten Kabupaten Asahan serta kemampuan dalam pencapaian target IKL dan terus

2. berkoordinasi dengan DLH Provinsi ataupun KLHK dan turut serta aktif mengikuti bimbingan teknis yang berkaitan dengan pemetaan atau deliniasi RTH dan Indeks Kualitas Lahan;
3. Melakukan pemetaan eksisting RTH secara terpadu melalui deliniasi RTH serta dilakukan verifikasi secara mandiri oleh Pemerintah kabupaten Kabupaten Asahan terhadap kondisi eksisting RTH di lapangan dan bekerjasama meningkatkan penghijauan yang dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan stakeholder terkait;
4. Pengendalian alih fungsi lahan serta mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penambahan RTH atau vegetasi pepohonan, pengayaan dan pemeliharaan RTH maupun tutupan hutan mangrove yang ada, serta mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota/taman lingkungan, ikut aktif menjaga keindahan, keserasian, serta kebersihan taman kota/taman lingkungan;
5. Pemerintah dapat membeli / membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman atau RTH dan penyerahan fasum perumahan
6. Mempertahankan area hijau (green belt) yang sudah ada dan menghindari/ meminimalisir untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, meningkatkan kawasan penyangga (buffer zone) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan, terutama tanaman pelindung yang bertajuk.

Gambar 3. 18
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target **Indeks Kualitas Lahan** tahun 2025

	
Pemeliharaan taman di Hutan Kota Taufan Gama Simatupang	Pemeliharaan taman di Alun-Alun Kota Kisaran

	
Pembangunan Tugu Selamat Datang Pulo Bandring	Pembangunan Tugu Selamat Datang di Sentang

Tabel 3.51
Skor dan Status Indeks Kualitas Lahan
terhadap 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kabupaten

No	Kabupaten / Kota	Skor	Status
1.	Kabupaten ----------	-------	Baik
377.	**Kabupaten Asahan**	**33,2**	**Kurang**
514.	Kabupaten ----------	-------	Sangat Kurang

Sumber Data : Website KLHK IKLH (2024)

Dari Tabel di atas diketahui bahwa secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan berada pada posisi urutan ke 377 dengan Skor 33,2 dengan status masih Kurang.

Sementara terhadap perbandingan Capaian Pemkab/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.52
Skor dan Status Indeks Kualitas Lahan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urutan Kode Wilayah

.No	Kabupaten / Kota	Skor	Status
1.	Kabupaten ----------	-------	Baik
22.	**Kabupaten Asahan**	**33,2**	**Kurang**
33.	Kabupaten ----------	-------	Sangat Kurang

Sumber Data : Website KLHK IKLH (2024)

Dari data di atas terlihat bahwa Pemkab Asahan berada di urutan ke-22 dari 33 Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera utara dengan Skor Nilai 33,2 dengan status Kurang.

Selanjutnya untuk capaian Indikator Persentase RTH dapat dilihat dari data berikut:

26. Indikator Persentase RTH

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Untuk mengukur ketersediaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah dapat menggunakan rasio ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota.

Luas Ruang Terbuka Hijau Kota sampai tahun 2018 adalah sebesar 2.041,56 Ha. Pada tahun 2019 terdapat penambahan luas RTH sebesar 1,96 Ha dari pembangunan taman RW sebanyak 24 lokasi seluas 2.088 M2 (0,21 Ha) dan penambahan lahan RTH dari pengadaan lahan untuk RTH seluas 17.513 M2 (1,75 Ha).Sehingga luasan RTH yang tersedia di Kabupaten Asahan seluas 2043,52 Ha atau 12,22% dari total luas wilayah keseluruhan Kabupaten Asahan 16.729,65 Ha. Capaian ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan harus melakukan inventarisasi pengembangan lahan RTH untuk menambah target luas lahan RTH hingga tahun akhir RPJMD.

Walaupun luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Asahan selama periode 2021-2025 cenderung mengalami peningkatan, tetapi masih jauh dari target Nasional sebesar 30% dari luas kota secara keseluruhan.

Sasaran Meningkatnya ruang Kabupaten yang nyaman dan berkelanjutan dilaksanakan dengan program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, Program Penyelenggaraan PSU yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Persentase RTH pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Capaian Indikator Indikator Persentase RTH

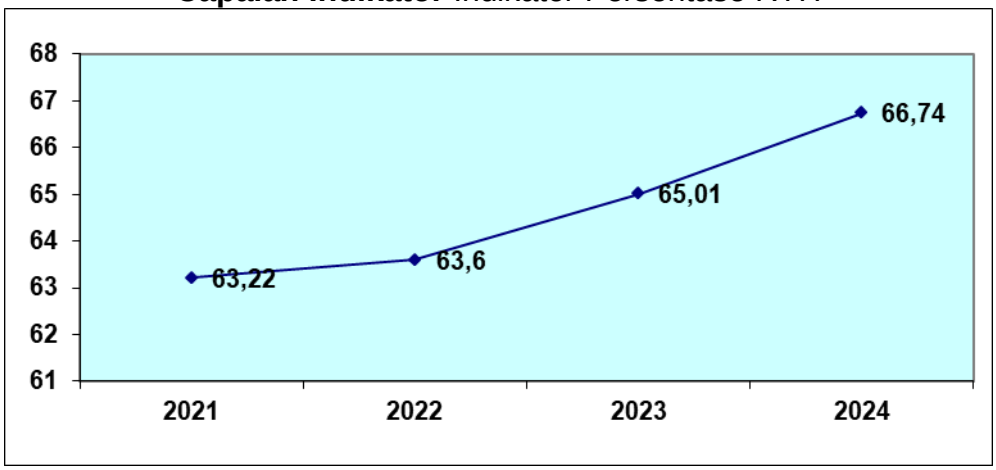

Adapun Capaian Kinerja Indikator Persentase RTH pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.53
Capaian Indikator Persentase RTH

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
			40	10,89	27,22	40	10,89	27,22	40	12,78	31,95

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa Capaian kinerja Indikator kinerja Persentase RTH tahun 2024 meningkat jumlah capaian kinerja pada tahun 2023. Persentase RTH dengan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2024 dari target 40% telah terealisasi 12,78% atau capaiannya hanya mencapai 31,05%. Capaian yang sangat rendah ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Untuk luas RTH di Kabupaten Asahan belum dilakukan pengukuran/perhitungan.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja, yaitu :

a. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada, serta tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain.
b. Melaksanakan intensifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik maupun privat.
c. Pengembangan pola kemitraan mengenai pengelolaan RTH dengan berbagai stakeholder.
d. Melaksanakan peralihan PSU Perumahan dari Pengembang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Asahan;

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

Keterbatasan lahan untuk RTH yang tersedia di Kabupaten Asahan, selain itu harga tanah/ lahan di Kabupaten Asahan yang cenderung meningkat sehingga menjadi kendala dalam pengadaan lahan untuk menambah luasan RTH.

Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai solusi/ rekomendasi untuk tahun yang akan datang; yaitu :

a. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan RTH.
b. Melibatkan peran serta aktif dari unsur kewilayahan dalam pengelolaan dan pengendalian RTH terutama yang berada di lingkungan sekitarnya.
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi tentang pentingnya peranan RTH yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan estetika.
d. Melakukan inventarisasi lokasi pengadaan lahan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Asahan yang akan berdampak positif dalam penambahan luasan RTH.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH,
- Penambahan alokasi anggaran untuk pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan RTH,
- Mempertahankan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan,
- Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan,
- Melakukan pengayaan dan pemeliharaan di tutupan hutan dan RTH,
- Melakukan pengayaan dan pemeliharaan di tutupan hutan dan RTH,

- Meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya,dan
- Melakukan pencegahan kerusakan lahan serta kebakaran hutan dan lahan;

Gambar 3. 19
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indikator Persentase RTH tahun 2025

	
Pemeliharaan taman di Hutan Kota Taufan Gama Simatupang	Pemeliharaan taman di Alun-Alun Kota Kisaran
	
Pembangunan Tugu Selamat Datang Pulo Bandring	Pembangunan Tugu Selamat Datang di Sentang

Tabel 3.54
Skor dan Status Indikator Persentase RTH
terhadap 400 (Empat Ratus) Kabupaten

:No	Kabupaten / Kota	Skor	Status
1.	Kabupaten ----------	--------	Tinggi
?.	**Kabupaten Asahan**	12,78	Rendah
400.	Kabupaten ----------	-------	Sangat

		Rendah

Sumber Data : (2024)

Dari Tabel di atas diketahui bahwa secara Nasional Pemerintah Kabupaten Asahan berada pada posisi urutan ke 150 dengan Skor 12,78 dengan status masih Rendah.

Sementara terhadap perbandingan Capaian Pemkab/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.55
Skor dan Status Indikator Persentase RTH
pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
berdasarkan urutan Kode Wilayah

.No	Kabupaten / Kota	Skor	Status
1.	Kabupaten ----------	---------	Sedang
?.	**Kabupaten Asahan**	**12,78**	**Rendah**
33.	Kabupaten ----------	----------	Sangat Rendah

Sumber Data : LHE PPD Kemendagri (2022)

Dari data di atas terlihat bahwa Pemkab Asahan berada di urutan ke-7 dari 33 Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera utara dengan Skor Nilai 12,78 dengan status Rendah.

Kemudian untuk capaian Misi 11 dapat dilihat dari data berikut:

MISI 11	**:**	**Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong**
Sasaran	:	Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat Dan Wawasan Kebangsaan

Selanjutnya untuk capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan dari data berikut:

Sasaran 14	**:**	Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat Dan Wawasan Kebangsaan

Dalam dinamika social yang semangkin konpleks, peningkatan nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan menjadi factor penting dalam menjaga keharmonisan serta persatuan bangsa. Kesadaran akan pentingnya gotong royong, toleransi, dan rasa saling menghormati terus berkembang di berbagai lapisan

masyarakat, mencerminkan semangkin kuatnya nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.

Sasaran Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat Dan Wawasan Kebangsaan menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 11 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan masyarakat yang Demokratis, Rukun dan Gotong Royong*" serta tujuan "*Meningkatkan kehidupan harmoni intern dan antar masyarakat dan umat beragama"*

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.56
Pengukuran Capaian Sasaran 14

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan	66,4 %	67%	100,9	Sangat Tinggi	67,48	99,29

27. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan

Adapun Capaian Kinerja Indikator Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.57
Capaian Indikator Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
0	0	0	62,20	65	104,8	62,80	63,15%	100,5	66,4 %	67%	100,9

Sumber Data : Bakesbang Pol Kab. Asahan (2024)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa Capaian kinerja Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan bahwa pada Tahun 2024 capaian kinerja meningkat dari tahun 2022 dan 2023.

Tahun 2024 capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah konflik SARA sebesar 100,9, meningkat dengan jumlah capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100,9%

Terlaksananya Kegiatan pendukung hanya ada 1 variabel, yaitu Cakupan Ormas yang mendapat wawasan kebangsaan sedangkan untuk Tahun 2023, ada 3 variabel yang mendukung perhitungan indikator, yaitu :

- Kelompok Yang Dibina Tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Pendidikan Politik terhadap masyarakat Kab. Asahan
- Pembinaan Ormas yang terdaftar di Kab. Asahan.

Selanjutnya untuk capaian Misi 12 dapat dilihat dari Tabel berikut:

MISI 12	**:**	**Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumber daya manusia**
Sasaran 15	:	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran 16 : Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah danmasyarakat dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan sosial. Melalui kebijakan yang terarah, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pemnerdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, angka PMKS secara bertahap mengalami penurunan yang seknifikan.

Sasaran Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 12 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatkan Perlindungan dan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatanyang berbais pada Kompetensi Sumber Daya Manuasia*" serta tujuan "*Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.58
Pengukuran Capaian Sasaran 15

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024
1.	Persentase PMKS Kategori	0.40	0.45	112.5%	Sangat Tinggi	0,40	112,5%

	Miskin Yang Ditingkatkan Kompetensinya						

28. Indikator Persentase PMKS Kategori Miskin Yang Ditingkatkan Kompetensinya

Kemiskinan di suatu daerah umumnya dilihat dari indikator jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri atas penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non-Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2022 Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 13 orang dari 3.252 PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terdata di Kabupaten Asahan dengan realisasi capaian 100%, sedangkan pada tahun 2024 jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 14 orang dari 3.212 PMKS yang terdata di Kabupaten Asahan dengan realisasi capaian 107,5 %.

Hal tersebut dapat disajikan dari Grafik berikut :

Grafik 3.20
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Asahan

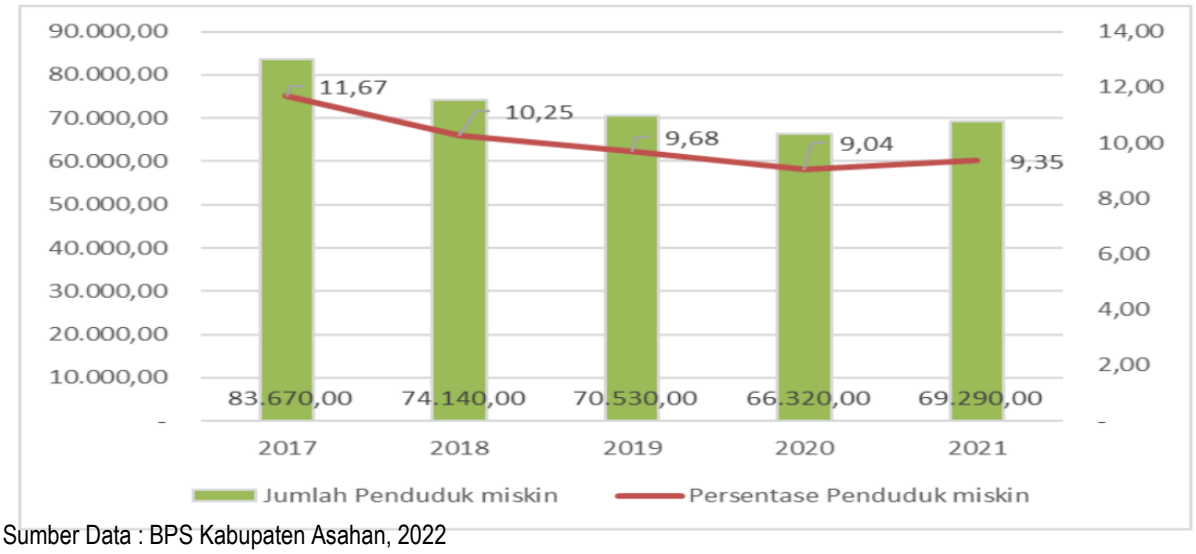

Sumber Data : BPS Kabupaten Asahan, 2022

Terlihat bahwa kemiskinan di Kabupaten Asahan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti terlihat pada Grafik di atas. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebanyak 83.670 jiwa dengan persentase peduduk miskin di Kabupaten Asahan sebesar 11,67 persen. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin turun menjadi 69.290 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,35 persen. Sementara itu, laju penurunan persentase kemiskinan di

Kabupaten Asahan cenderung fluktuatif dengan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2018, sebesar 12,17 persen. Adapun Capaian Kinerja Indikator Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.59
Capaian Indikator Persentase PMKS Kategori Miskin
Yang Ditingkatkan Kompetensinya

2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
			62,20	65	104,8 %	62,80	63,15%	100,5%	0.40	0.45	112.5%

Sumber Data : Dinsos Kab. Asahan (2024)

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kategori Miskin Yang Ditingkatkan Kompetensinya diperoleh dengan kondisi amat baik pada tahun 2024 sebesar 112,5% didukung melalui Program Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial yang meliputi penyediaan permakanan,penyediaan sandang,penyediaan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik,mental,spiritual dan sosial,pemberian akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar,pemberian layanan kedaruratan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Asahan.

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang meliputi pemberian layanan rujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

c. ten Asahan.

Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2022 Jumlah PMKS yang di tingkatkan kompetensinya sebanyak 13 orang dari 3.252 PMKS yang terdata di Kabupaten Asahan, sedangkan pada tahun 2024

Jumlah PMKS yang di tingkatkan kompetensinya sebanyak 14 orang dari 3.212 PMKS yang terdata di Kabupaten Asahan.

Dalam rangka mencapai target Persentase kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya yaitu yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

- ✓ Melakukan pembinaan kepada PMKS tentang Pelatihan Skill dan Koordinasi dengan Stakeholder.
- ✓ Pemkab Asahan diharapakan menciptakan Strategi yang selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu:
  - Penyediaan Kebutuhan Pokok;
  - Pengembangan Sistem Jaringan Sosial;
  - Pengembangan Budaya Usaha

1. Realisasi Anggaran

Secara umum, kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam memenuhi target masing-masing sasaran dapat tercapai berkat dukungan pengalokasian anggaran yang baik. Dukungan pagu anggaran untuk 15 Sasaran Strategis pada tahun 2024 sebesar Rp. 382.276.657.795,00. Pada akhir tahun 2024, anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp. 332.292.627.150,00 dengan persentase serapan anggaran sebesar 86,92%

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya didasarkan pada persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui program-program daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan serapan anggaran tiap indikator atau program. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien apabila perbandingan tersebut sama dengan atau lebih besar 100%, dan tidak efisien jika kurang dari 100%. Efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran/indikator kinerja diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.60

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran/Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Pencapaian Kinerja	Program	Pagu (Rupiah) A	Realisasi (Rupiah) A	Serapan (A/B) x 100%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Nilai LPPD		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	794.175.990	760.339.968	98,73	
		Nilai SAKIP		Program Penujang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	163.528.800	159.710.193	97,66	-9,13
		Level Maturitas SPIP	100%	Program penyelenggaraan pengawasan	838.300.000	832.291.700	99,28	0,72
		Indeks	104,62%	Program	2.531.903.280	2.438.958.581	96,33	8,29

		Profesionalitas ASN		Kepegawaian Daerah				
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	985.536.950	977.739.579	99.20	5,41
2	Meningkatnya Pelayanan Dan Informasi Publik Berbasis IT	Cakupan Pelayanan Smart City	100%		235.422.350	217.426.513	92.35	31,78
		Indeks SPBE	142,28%					
3	Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian dalam arti Luas	Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian	100,59	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.500.219.160	1.457.335.284	97.14	3,45
				Program penyediaan dan pengemb	3.726.838.875	3.447.913.867	92.51	8,07

				angan prasarana pertanian				
				Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	386.429.680	361.624.880	93,58	7,01
				Program perizinan usaha pertanian	149.966.120	148.991.020	99,35	1,24
				Program penyuluhan pertanian	684.624.950	679.647.650	99,27	1,32
4	Meningkatnya Daya Dukung Dan Nilai Tambah Potensi Unggulan	Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang	104,20%	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan	50.000.000	49.373.500	98,75	5,45

	Daerah	Mendukung Potensi Unggulan Daerah		Koperasi				
5	Meningkatnya Kelestarian Potensi Seni Budaya Dan Nilai Nilai Kearifan Lokal Yang Sinergi Dengan Pengembangan Wisata Da	Potensi Daya Tarik Pariwisata Daerah Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat (Kelompok Sadar Wisata) yang direalisasikan	200%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parisata	9.000.000	8.075.000	89,72	100,28
6	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Persentase Desa Mandiri dan Maju Indeks	112,5%	Program penataan desa	53.000.000	52.964.100	99,93	12,57
				Program peningkat	50.001.050	43.797.978	87,59	24,91

		Desa Membangun (IDM)		an kerjasama desa				
				Program administrasi pemerintahan desa	6.326.851.306	6.117.634.065	96,69	15,81
				Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	2.707.853.100	2.369.580.212	87,51	24,99
7	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA (Juta US $)	95,12%	program pengembangan iklim	96.966.750	96.647.293	99,67	-13,26

		Realisasi Investasi PMDN (Triliyun Rupiah)	78,37%	penanaman modal				
8	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD	Opini BPK	Masih dalam proses pemeriksaan PBK	Prgram umum Pemerintahan daerah	200.000.000	188.494.900	94,25	5,75
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Mayarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	175,76%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	781.132.490	780.132.490	99,87	75,89
		Angka Kematian Bayi Per 1.000	65,79%	Program pemenuhan upaya	116.683.111	116.503.131	99,85	-34,06

		Kelahiran Hidup		kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat				
		Angka Stunting	102,09%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	58.390.000	57.981.000	99,30	2,79
10	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Peran Generasi	APK PAUD	61,81	Program Pengelolaan Pendidika	13.075.856.500	12.897.547.500	98,66	-30,30

	Muda Melek Teknologi.			n				
		APM SD	100,27	Program Pengelolaan Pendidikan	90.742.742.028	83.584.188.761	92,11	8,16
		APM SMP	100,05	Program Pengelolaan Pendidikan	41.641.974.050	40.982.624.714	98,42	1,63
		Persentase SMP Yang Memilik Ruang Baca Digital	100,67	Program Pengelolaan Pendidikan	950.180.000	948.827.107	99,86	0,81
11	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Cakupan Penyelesaian Penanganan Gangguan	100	Program peingkatan ketentraman dan ketertiban umum	1.521.896.062	1.500.878.107	98.61	1.39

		Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum) Daerah						
12	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur yang Baik	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	88,24%	Program Penyelenggaraan Jalan	147.557.912.642,82	111.136.793.670,00	75,32%	0,13
13	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan Dan Pemanfaatan Potensi Ekonomis Lingkungan Hidup	Indeks Air	110,71%	Program perencanaan lingkungan hidup	288.749.100	207.257.200	71,77	38,93
		Indeks Udara	99,63%	Program pengendalian pencemaran dan/	4.410.327.316.	3.526.480`662	79,96	19,67

				atau perusakan lingkungan hidup				

		Indeks Kualitas Lahan	79,17%	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3)	39.078.200	38.964.700	99,71	-20,54
				Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindun	89.439.850	88.507.300	98.96	-19,79

				gan dan pengelolaan lingkungan				
				Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	215.980.550	185.726.850	85.99	-6,82
				Program penanganan pengaduan lingkunga	13.564.950	13.228.350	97,52	-18,35

				n hidup				
				Program pengelolaan persampahan	2.002.496.600	1.982.629.651.02	99,00	-19,84
		Persentase RTH	31,95%	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	3.616.840.800	3.603.211.515,18	99,62	-68,27
14	Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat Dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan	100,9%	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.168.753.600	1.163.852.430	99.58	1,32
				Program peningkatan peran partai	2.280.347.850	2.255.063.275	98,89	2,01

				politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik				
				Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	51.295.038.500	49.130.843.750	95,78	5,12
				Program pembinaa	198.030.450	195.638.830	98,79	2,11

				n dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				
				Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1.316.797.500	1.297.818.000	98.55	2,34

15	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS Kategori Miskin Yang Ditingkatkan Kompetensinya	112,5	Program rehabilitasi sosial	934.050.000	866.505.525	92,77	8,13
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	880.104.600	831.986.662	94,53	6,37

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Govermen)Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024. Pembuatan LKJ ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagai harapan semua pihak.

Dalam Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Asahan menetapkan sebanyak 12 tujuan, 15 sasaran dengan 28 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan terdiri dari 12 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 148,33 % (Sangat Tinggi)
- Sasaran terdiri dari 15 Sasaran dan 28 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 148,33% (Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 15 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pencapaian target indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan juga di dukung dengan adanya alokasi anggaran dalam perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp. 382.276.657.795,00. sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 332.292.627.150,00 dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 serapan anggaran sebesar 86,92% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 13,92 %

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Asahan

Kisaran,

Bupati Asahan



Taufik Zainal Abidin

LAMPIRAN

REVIU LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. ASAHAN

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DAERAH

PENGHARGAAN DAN PIAGAM PENGHARGAAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024



© Madison Park Greetings
Original art by Susan Sellen

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jend. Ahmad Yani Telepon (0623) 41606 Fax (0623) 43254
K I S A R A N

21213

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Asahan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kisaran, 06 Maret 2025

INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN

ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6041):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Assahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
6. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

a. menyusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
b. menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan
c. menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
(2) Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI ASAHAN,

S U R Y A

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Amanah, Bersih dan Transparan	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai LPPD	Hasil penilaian Evaluasi Tim EXPPD	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, BPKP Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
			Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Asahan yang diberikan Menteri PAN dan RB pada tahun 2024	Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Asahan

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA

1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Asahan	Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan	Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan	Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan Reses x 100%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang melaksanakan Kunjungan Kerja	Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan Kunker x 100%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Ranperda yang disetujui DPRD bersama Bupati Asahan	Jumlah Ranperda yang disetujui x 80%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan	Jumlah Rancangan Peraturan yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan x 80%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang mengikuti Pendalaman Tugas	Jumlah Anggota Dewan yang mengikuti Pendalaman Tugas x 100%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan

			Level Kapasitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Hasil penilaian dari BPKP	BPKP
			Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Pada Inspektorat	Hasil Evaluasi SAKIP	Inspektorat

4. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi	Persentase penyedia kualitas pendidikan	Angka pendidikan dasar yang ditamatkan	Jumlah siswa jenjang tertinggi yang ditamatkan / jumlah penduduk usia sekolah x 100%	Dinas Pendidikan
			APK PAUD	Jumlah siswa jenjang PAUD formal berbagai usia / jumlah penduduk usia jenjang PAUD formal x 100 %	Dinas Pendidikan
			APM SD	Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A usia berbagai usia / jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan
			APM SMP	Jumlah siswa jenjang SMP /MTs/Paket B usia 13-15 tahun / jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan
			Persentase SMP yang memiliki ruang baca digital	Jumlah SMP yang memiliki ruang baca digital atau labkomputer/ jumlah SMP se Kabupaten Asahan	Dinas Pendidikan

2	Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah		Cakupan event budaya skala kabupaten	jumlah event budaya yang dilaksanakan skala kabupaten / jumlah event budaya lokal daerah x 100 %	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan		Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan BPK/Inspektorat x 100 %	Dinas Pendidikan
			Nilai Evaluasi AKIP	jumlah nilai evaluasi AKIP	Dinas Pendidikan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil survey kepada masyarakat	Dinas Pendidikan

5. DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan angka harapan hidup	Angka kematian Ibu	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000 kelahiran hidup	Dinkes
			Angka kematian Bayi	Jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000 kelahiran hidup	Dinkes

			Angka Stunting	Jumlah anak balita sangat pendek dibagi jumlah anak balita yang diukur dikali 100 %	Dinkes
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%	Dinkes

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Indeks Infrastruktur wilayah	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik dibagi jumlah panjang seluruh X100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik / Total panjang irigasi Kabupaten x 100 %	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
			Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang dalam pembangunan	Jumlah Rekomendasi IKTR yang dikeluarkan dibagi jumlah rekomendasi ijin pembangunan yang diajukan dikali 100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
			Persentase dranase kota dengan kondisi baik	jumlah panjang drainase kota dalam kondisi baik dibagi kota panjang drainase kota dikali 100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025

			persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	jumlah penduduk terlayani air minum (perpipaan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025

7. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaran Penyelesaian Masalah Pertanahan	Cakupan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase kasus pertanahan yang dimediasi	Jumlah kasus sengketa tanah yang dimediasi X 100% Jumlah Kasus sengketa tanah yang terdaftar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah	Jumlah ganti kerugian tanah yang di selesaikan X 100% Jumlah ganti kerugian tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Cakupan pelayanan invertarisasi dan verifikasi tanah objek reforma agraria	Jumlah rekomendasi terverifikasi X 100% Seluruh permohonan verifikasi tanah objek reforma agreria	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

			Persentase luas lahan tanah asset Pemda yang bersetifikat	Luas lahan bersetifikat yang akan disertivikasi x 100 % Luas lahan keseluruhan yang akan disertifikasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya cakupan Rumah layak huni	Persentase Rumah layak huni	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ---------- X 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase PSU perumahan yang telah diserahkan ke Pemda dalam kondisi baik	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan ke Pemda dalam kondisi baik----------X 100% Jumlah Perumahan yang PSU nya diserahkan ke Pemda	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Cakupan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tertangani dikawasan kumuh	RTLH yang ditangani di kawasan kumuh tahun n X 100 % Jumlah total RTLH kawasan kumuh kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Menurunnya luasan kawasan kumuh		Cakupan perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Jumlah RTLH yang diperbaiki di luar kawasan kumuh tahun n----------X 100% Jumlah RTLH di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan peran masyarakat dalam mejaga keamanan dan ketertiban umum	Persentase Meningkatnya Kondusivitas Daerah	1. Cakupan penyelesaian penanganan gangguan Trantibum Daerah	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban : Jumlah kasus yang di tangani x 100 %	SATPOL PP
			1.1 Persentase Ganggunan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan yang ditangani	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan : Jumlah kasus yang di tangani x 100 %	SATPOL PP
			1.2 Persentase Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang tertangani	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP : jumlah laporan yang ada x 100 %	SATPOL PP
			2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	SATPOL PP

			2.1 Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM pencegahan penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya : jumlah pencegahan/penanggulangan yang ditangani x 100 %	SATPOL PP
			2.2 Persentase Relawan Pemadam Kebakaran ditingkat Desa	Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran setiap tahunnya : jumlah desa/kel 100%	SATPOL PP

9. DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Menurunya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Keluarga Sejahtera	Persentase PMKS Kategori Miskin yang ditingkatkan Kompetensinya	PMKS yang ditingkatkan kompetensinya /jumlah PMKS yang ada x 100	Dinas Sosial

10. DINAS TENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Pelayanan Pencari Kerja, Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase pertumbuhan ekonomi sektor primer	Persentase tenga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis bahasa kompetensi	(Jumlah tenaga kerja yang dilatih / Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi) x 100%	Disnaker

			persentase layanan penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang difasilitasi dan didampingi dalam pekerjaannya dibagi jumlah tenaga kerja terdaftar dikali 100%	
			persentase perusahaan yang mempunyai sarana hubungan	jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah Perusahaan x 100%	

11. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia usaha	persentase lembaga PHA pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk	Jumlah Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	jumlah lembaga PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah pada dunia usaha yang dibentuk dibagi jumlah seluruh lembaga	Dinas P2KBP3A Kab.Asahan
2	jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak yang dibuna		persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina dibagi seluruh jumlah lembaga penyedia	Dinas P2KBP3A Kab.Asahan

3	kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan		terselesaikannya kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani	jumlah anak (penduduk kurang dari 18 Tahun) korban yang ditangani instansi dibagi jumlah anak yang menjadi korban melapor	Dinas P2KBP3A Kab.Asahan

12. DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya produktivitas, Ketahanan, dan peran ekonomi sektor Pertanian dalam arti luas	Persentase ketersediaaan Pangan Utama (Beras)	Nilai Skore PPH Konsumsi	63,20% x Produksi padi (GKG)	Dinas Ketahanan Pangan

13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	Persentase Peningkatan kualitas kelestarian dan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	Dinas Lingkungan Hidup

			Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai relatif = Ci/Lij	
				$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$	
				Rumus Metode IP :	
				0 ≤ Plj ≤ 1,0 → balik (memenuhi baku mutu)	
				1,0 ≤ Pjl ≤ 5,0 → cemar ringan	
				5,0 ≤ Plj ≤10,0 → cemar sedang	
				Plj ≥ 10,0 → cemar berat	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU = 100 - [50/0,9 x (leu – 0,1)]	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKTL = 100 - {(84,3 - (TH x 100)) x 50/54,3}	
			Persentase RTH	Luas RTH dibagi Luas Kabupaten dikali 100%	

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan dan	Indeks Penilaian	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP	DISDUKCAPIL
			Tingkat tertib administrasi kependudukan	jumlah penduduk wajib Adminduk (KTP, KK, Akta Kelahiran<Akta Nikah) yang telah memiliki dokumen adminduk dibagi jumlah penduduk wajib adminduk dikali 100%	DISDUKCAPIL
			Persentase layanan pendaftaran penduduk	Jumlah E-KTP ber-NIK yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk wajib E-KTP dikali 100%	DISDUKCAPIL

			Persentase layanan penerbitan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatanan sipil (kematian perkawinan perceraian dan catatan sipil lainnya) yang diterbitkan sesuai SOP dibagi jumlah layanan Pencatan Sipil (Kematian Perkawinan Perceraian dan catatan Sipil lainnya) yang dimohonkan dikali 100%	DISDUKCAPIL
			cakupan pemenfaatan data kependudukan	Jumlah Tenaga Teknis Pengelolaan Data Kependudukan yang terampil dibagi jumlah Tenaga Teknis Pengelolah Data Kependudukan dikali 100%	DISDUKCAPIL
			cakupan ketersediaan profil kependudukan tingkat kecamatan	Jumlah Data Profil kependudukan tingkat kecamatan dibagi jumlah kecamatan dikali 100%	DISDUKCAPIL

15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase pencapaian Target Indeks Desa Menbangun	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	Jumlah desa kategori mandiri dan maju dasar dari IDM dibagi jumlah desa dikali 100%	Dinas PMD
			Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	Jumlah Nilai Indeks Desa Membangun seluruh Desa dibagi Jumlah Desa	Dinas PMD

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana angkutan umum	Indeks Infrastruktur Wikayah	Cakupan aksesibitas antar wilayah	Panjang jalan kabupaten yang dilalui moda transportasi publik dibagi panjang jalan Kabupaten dikali 100%	Dinas Perhubungan

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	Cakupan Pelayanan Smart City	Indeks Kategori PPID	Hasil penilaian PPID tiap tahun	Dokumen renstra dan RPJMD 2021-2026
			Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	(Jumlah Perangkat Daerah yang tersambung layanan Intra pemerintah daerah / jumlah perangkat daerah) x 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021-2026
			Indeks SPBE	Hasil Penilaaian dari Instansi terkait	Dokumen renstra dan RPJMD 2021-2026
			Tingkat Keamanan Informasi Persandian Daerah	Jumlah media informasi perangkat daerah yang telah dilakukan standarisasi keamanan sesuai BSSN bagi jumlah media informasi dikali 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021-2026

			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Jumlah media informasi perangkat daerah yang telah dilakukan standarisasi keamanan sesuai BSSN bagi jumlah media informasi dikali 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021-2026
			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Jumlah perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat Daerah / jumlah total perangkat daerah x 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021-2026
			cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan dibagi jumlah data statistik sektoral dikali 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021-2026
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		Nilai SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP tiap tahun	Dokumen renstra dan RPJMD 2021-2026

18. DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA

		Meningkatnya Daya Dukung dan Nilai Tambah Potensi Unggulan Daerah	Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung Potensi Unggulan Daerah	∑ Wirausaha baru tahun (n) - tahun ke (n-1) X 100 % ∑ Wirausaha baru tahun (n-1)	Diskopdagin
1	Meningkat dan berkembangnya Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase Jumlah Wirausaha	Jumlah Wirausaha X 100% Jumlah Usaha Mikro	Diskopdagin
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian		Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	Jumlah PDRB Perdagangan X 100% Jumlah total PDRB	Diskopdagin dan BPS
3	Meningkatnya pertumbuhan industri berbasis komoditas unggulan daerah		Pertumbuhan Sektor Industri dalam PDRB	Jumlah PDRB Industri X 100% Jumlah total PDRB	Diskopdagin dan BPS
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai Hasil SAKIP	Diskopdagin

19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Tujuan: Meningkatkan daya saing investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah		((Jumlah Investasi Tahun 2024 - Jumlah Investasi Tahun 2023) / Jumlah Investasi Tahun 2023)) x 100%	Dokumen Renstra dan Laporan Minitoring Penanaman Modal
1	Meningkatkan realisasi investasi daerah		Realisasi Investasi PMA (Juta US$)	Jumlah realisasi investasi PMA tahun 2024	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal
			Realisasi Investasi PMDN (Trilyun Rupiah)	Jumlah realisasi investasi PMDN tahun 2024	Dokumen Renstra dan Laporan Minitoring Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Skala nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan	Laporan IKM DPMPTSP
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP		Nilai Evaluasi AKIP (akor)	Skala Nilai AKIP oleh Inspektorat	Dokumen Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat

20. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA

1	Meningkatkan Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran serta generasi muda dalam pembangunan	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	Persentase pemuda yang berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi X 100 % Jumlah Pemuda yang Mengikuti	Disporapar kab. Asahan
			Persentase Organisasi pemuda yang aktif	Jumlah Organisasi yang Aktif X 100 % Jumlah Organisasi pemuda yang ada	Disporapar kab. Asahan
			Tingkat prestasi event olahraga	Jumlah Event Berprestasi X 100 % Jumlah enent yang di ikuti	Disporapar kab. Asahan
			Persentase Kelompok Pramuka Aktif	Jumlah Gudep Aktif X 100 % Jumlah Gudep Keseluhruhan	Disporapar kab. Asahan
2	Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Persentase daya tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (kelompok sadar wisata yang direalisasikan)	Persentase daya Tarik Wisata yang ditetapkan	Jumlah Daya Tarik Wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati X 100% Jumlah Daya tarik Wisata se-Kabupaten Asahan	Disporapar kab. Asahan
			Persentase Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain/Pihak Ketiga	Perjanjian kerjasama pariwisata antara pemuda dengan Pemda lain/Pihak ketiga X 100% Kerjasama & Kemitraan Pariwisata yang direncanakan	Disporapar kab. Asahan

			Persentase pelaku ekraf yang aktif	Produk/Karya Ekraf terdaftar HAKI X 100 % Produk/Karya Ekraf yang difasilitasi HAKI	Disporapar kab. Asahan
		Kontribusi PAD Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memiliki Sertifikat Tingkat Dasar X 100% Jumah SDN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina pada Kompetensi Dasar	Disporapar kab. Asahan
			Kontribusi sektor Pariwisata terhadap Daerah	Sewa tempat, parkir dan sewa wahana wisata	Disporapar kab. Asahan

21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya budaya baca masyarakat		Persentase masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan	Jumlah masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan (termasuk online e-library) dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Terwujudnya penyelamatan, pelestarian dan tertib arsip daerah		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip

22. DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Pertumbuhan Sektor Perikanan dalam PDRB	PDRBt - PDRBt-1 x 100 % PDRBt-1	Dinas Perikanan

23. DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produktivitas Pertanian		Pertumbuhan Produktivitas Komuditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikutura	Rata-rata pertumbuhan Produktivitas komoditi strategis tanaman pangan dan holtikultura	Dinas Pertanian
			Pertumbuhan Produktivitas Komuditi Strategis Tanaman Perkebunan	Rata-rata pertumbuhan Produktivitas komoditi strategis tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian
2	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian		Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam PDRB	$\frac{PDRBt - PDRBt\text{-}1}{PDRBt\text{-}1} \times 100\%$	Dinas Pertanian

24. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA

1	Meningkatnya Produktivitas, ketahanan, dan peran Ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan sektor pertanian (Pertenakan) dalam PDRB	Pertumbuhan sektor pertanian (Pertenakan) dalam PDRB	PDRBt - PDRBt-1 X 100% PDRBt-1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persentase pertumbuhan produksi peternakan	Persentase pertumbuhan produksi peternakan	Rata-rata pertumbuhan produksi peternakan	
2		Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA

1	Meningkatnya kualitas Akurasi Perencanaan dan Pengelolaan APBD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		∑Dn= D1+D2+D3+D4+D5+D6	Bappeda Asahan
				D1 = Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penggangaran	
				D2 = Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dengan APBD	
				D3 = Dimensi Transparan Pengeluaran Anggaran Keuangan Daerah	
				D4 = Dimensi Penyerapan Anggaran	
				D5 = Dimensi kondisi Keuangan Daerah	
				D6 = Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan	
			Persentase hasil Penelitian untuk bahan kebijakan	=jumlah hasil penelitian untuk bahan kebijakan x 100% / Total Penelitian	
			Indeks Inovasi Daerah	= Skor Total x 100% / Skor total Maxsimum	Bappeda Asahan
			Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Asahan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Kab.Asahan

26. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA

1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Persentase tercapainya Manajemen ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Rumus Pengolahan hasil yang terdapat pada sistem Aplikasi Indeks Implementasi NSPK	BKN
			Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dan bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masingjawaban dimensi/indikator	BKN
			Indeks Sistem Merit	jumlah total dari aspek Implementasi Sistem Merit	KASN
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kepegawaian	Jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan kepegawaian dikalikan dengan penimbamh yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur)	BKPSDM
			Nilai SAKIP	Jumlah rata-rata Nilai per Aspek Penilaian SAKIP	INSPEKTORAT

27. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat tertib Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Barang Milik Daerah	Opini BPK	Hasil Opini BPK	BKAD
			Indeks Pengelolaan	Total Indeks = D1 + D2 +D3 + D4 +D5 +D6	BKAD

			Keuangan Daerah	D1=Dimensi 1, D2=Dimensi 2, D3= Dimensi 3, D4= Dimensi 4, D5= Dimensi 5, D6= Dimensi 6	
			Tingkat Tertib Penyusunan Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu ----------x 100% Jumlah Dokumen Anggaran Daerah	BKAD
			Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan tepat waktu----------x 100% Jumlah seluruh SP2D yang diterbitkan	BKAD
			tingkat tertib administrasi barang milik daerah	JumlahPerangkat Daerah dengan aset yang sudah sesuai dengan neraca dan tanpa catatan --------- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	BKAD
			Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKAD Kabupaten Asahan oleh Tim Evaluasi Sakip Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Kab.Asahan

28. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Jumlah temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti ----------x 100 % Total Temuan BPK dan Inspektorat	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%)	Jumlah realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n) - Jumlah Realisasi pendapatan Daerah Tahun (n-1)--------- x 100% Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1)	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah		Tingkat layanan pendukung urusan Pemerintahan (persen)	Jumlah realisasi pagu anggaran ---------- x 100% Total Pagu Anggaran	Bidang Sekretariat

29. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Kondustivitas Daerah	Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana	Jumlah penanganan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dibagi jumlahkejadian bencana dikali 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik

			Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa tangguh bencana dibagi jumlah desa rawan bencana dikali 100%	Bidang Pencegahan dan Kesiapaan
			Persentase layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kasus evakuasi korban bencana yang terjadi dikali 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik
			Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dalam sistem manajemen bencana dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi
2	meningkatnya akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Asahan	INSPEKTORAT

30. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA

1	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama Demokrasi dan Kegotong royongan di Masyarakat	Indeks Demokralisasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan	Cakupan Kelompok yang dibina tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaaan	Cakupan kelompok yang dibina dibagi dengan jumlah kelompok yang menjadi sasaran x 100 %	Badan Kesbangpol
			Persentase Partai Politik yang difasilitasi	Jumlah partai politik yang Difasilitasi dibagi dengan jumlah partai politik yang terdaftar di Kab. Asahan x 100 %	Badan Kesbangpol
			Persentase Pembinaan Ormas	Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan pembinaan dibagi dengan jumlah Ormas yang terdaftar di Kab.Asahan x 100 %	Badan Kesbangpol
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan baeragama dan kepercayaan	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina terkait Narkoba, kerukunan Beragama dan Kepercayaan dibagi dengan jumlah kelompok Sasaran masyarakat yang akan dibina terkait Narkoba, Kerukunan beragama dan kepercayaan x 100 %	Badan Kesbangpol
		Jumlah Konflik SARA	Persentase Konflik Sosial terselesaikan	Potensi konflik SARA dibagi dengan jumlah potensi konflik SARA yang tertangani x 100%	Badan Kesbangpol

31. UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
I	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan RS	Akreditasi layanan Rumah Sakit	Nilai kelulusan Akreditasi rumah sakit	Nilai evaluasi tim akreditasi rumah sakit	RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG

1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Cakupan layanan Rumah Sakit	1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			2. tingkat pemakaian tempat tidur / bed occupancy rate (BOR)	(jumlah hari perawatan / (jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam satu periode)) x 100 %	RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			3. rata-rata lama pasien dirawat / average length of stay (AvLOS)	jumlah lama dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)	RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			4. Rata-rata lama tempat tidup tidal terpakai / turn of interval (TOI)	((jumlah tempat tidur x periode) - hari perawatan) / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)	RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			5. frekuensi pemakaian tempat tidur / bed turn over I(BTO)	jumlah pasien keluar (hidup + meninggal) / jumlah tempat tidur	RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			6. angka kematian . 48 jam setelah dirawat / net death rate (NDR)	(jumlah pasien meninggal seluruhnya . 48 jam setelah dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)) x 1000 permil	RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG

			7. angka kematian umum / gross death rate (GDR)	jumlah pasien meninggal seluruhnya / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)) x 1000 permil	RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
2	Meningkatnya kemandirian BLUD Rumah Sakit		Cost recovery rate (CRR)	realisasi pendapatan / realisasi belanja operasional	RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			Sales Growh rate (SGR)	pendapatan tahun ini - pendapatan tahun sebelumnya) / pendapatan tahun sebelumnya	RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG

32. KECAMATAN (25 KECAMATAN)

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan dan Pembinaan Kewilayahan yang di tangani	1. tingkat tertib administrasi layanan pemerintahan	Jumlah Administrasi Layanan Pemerintahan yang baik dibagi jumlah layanan pemerintahan dikali 100%	Sekretaris Kecamatan
			2. Cakupan kelompok masyarakat yang dibina dengan baik di tingkat kecamatan	Kelompok masyarakat yang dibina dibagi kelompok masyarakat yang ada dikali 100%	Kasi Kesra Kecamatan

			3. Persentase Penyelesaian Permasalahan bidang pemerintahan	permasalahan bidang pemerintahan yang diselesaikan dibagi permasalahan bidang pemerintahan yang ada di kali 100%	Kasi Pemerintahan dan Trantibum Kecamatan
			4. persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan pangan	jumlah peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional periode sebelumnya dikali 100%	Kasi Pemerintahan dan trantibun Kecamatan
			5. cakupan administrasi pemerintahan desa	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Kasi PMK Kecamatan
			6. Tingkat Penyelesaian Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah permasalahan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan dibagi jumlah permasalahan ketentraman dan ketertiban dikali 100%	Kasi Pemerintahan dan Trantibum Kecamatan

BUPATI ASAHAN,

SURYA

PERJANJIAN KINERJA BUPATI ASAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. SURYA, B.Sc**
Jabatan : Bupati Asahan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kisaran,

BUPATI ASAHAN

H. SURYA, B.Sc

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2024)
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi			BB=71
		1. Meningkatnya akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1. Nilai LPPD	Tinggi = 3,15
			2. Nilai SAKIP	BB=75
			3. Level Maturitas SPIP	3=3,3
			4. Indeks Profesionalitas ASN	70
		2. Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	1. Cakupan pelayanan Smart City	77,78%
			2. Indeks SPBE	2,01
Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi sektor Primer			4,88
		Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan Produktivitas potensi unggulan daerah sektor pertanian	1,69
	Pertumbuhan ekonomi Sektor Sekunder dan Tersier (Jasa, perdangangan, industri)			4,12
		1. Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung potensi unggulan daerah	4,52
		2. Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Potensi daya Tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (kelompok sadar wisata) yang direalisasikan	8 pokdarwis

Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten			0,6599
		Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	2,82
Meningkatkan daya saing investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah			2%
		Meningkatnya realisasi investasi daerah	1. Realisasi Investasi PMA (Juta US $)	207,7
			2. Realisasi Investasi PMDN (Trilyun Rupiah)	11,1
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			79,62
		Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	Opini BPK	WTP
Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Indeks Kesehatan			78,18
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan mayarakat	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	58
			2. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	1
			3. Angka Stunting	11,23%
Meningkatkan pendidikan yang unggul dan berkualitas serta peran generasi muda	Indeks Pendidikan			79,80
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi	1. APK PAUD	70,07
			2. APM SD	99,70
			3. APM SMP	82,98
			4. Persentase SMP yang memiliki ruang baca digital	51,00
Meningkatkan kondusivitas daerah	Angka kriminalitas			18,74
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat	Cakupan penyelesaian penanganan gangguan Trantibum daerah	100%

Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks infrastruktur wilayah			68,70
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	40,5 %
Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten			64.52
		Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	1. Indeks air	52,90
			2. Indeks Udara	87,53
			3. Indeks Kualitas Lahan	41,93
			4. Persentase RTH	40%
Meningkatkan kehidupan harmoni intern dan antar masyarakat dan umat beragama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan			68,10
		Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Cakupan ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	55%
Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	Persentase Keluarga Sejahtera			63,96%
		Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya	0,4%

BUPATI ASAHAN,

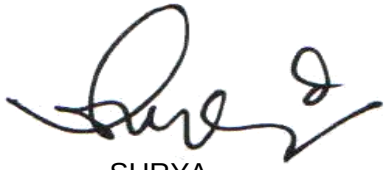

SURYA

Lampiran 4 : Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Asahan Tahun 2024

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	DOKUMENTASI
1.	Peringkat I Penilaian Barang Milik Daerah Pada Kekayaan Negara Awards 2024	Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara	  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan berhasil meraih Peringkat I Kategori Pemerintah Daerah Terinisiatif Dalam Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2024. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si, mewakili Pemkab Asahan, di Aula Sri Deli Gedung Keuangan Negara Medan, Selasa (17/12/2024).
2.	Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.	Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	  Pemerintah Kabupaten Asahan menerima penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

			Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Mhd Jahari Sitepu kepada Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Lantai 5, Senin (18/12/2023).
3.	Penghargaan Outstanding Cultural Diversity Preservation Initiative Tahun 2024	CNN Indonesia	  Bupati Asahan H. Surya, BSc menerima penghargaan Outstanding Cultural Diversity Preservation Initiative Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh CNN Indonesia pada acara CNN Indonesia Award 2024 di Grand Ballroom Lt 2 JW Marriott International Hotel Medan, Jumat (09/08/2024) malam
4.	Peringkat tertinggi keempat di Provinsi Sumatera Utara Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik Tahun 2024	Ombudsman RI	 

			Pemerintah Kabupaten Asahan di masa kepemimpinan H. Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si selaku Bupati dan Wakil Bupati Asahan kembali tingkatkan prestasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Asahan berhasil meraih nilai 93.37% dan menjadikannya Kabupaten dengan peringkat tertinggi keempat di Provinsi Sumatera Utara. Prestasi ini juga menempatkan Kabupaten Asahan di Zona Hijau dengan opini kualitas tertinggi
5.	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sumut Tahun 2024 kategori Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Sumut	  Pemerintah Kabupaten Asahan menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sumut Tahun 2024 kategori Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Sumut di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Senin (09/12/2024). Penghargaan ini diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, M.Si didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan

6.	Penghargaan Nominasi Anugerah Layanan Investasi 2024 Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Kementerian Dalam Negeri RI	  Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Zainal Arifin Sinaga menerima penghargaan Nominasi Anugerah Layanan Investasi 2024 Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (30/9/2024)
7.	Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Sumut 2024	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	  Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyerahkan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Sumut 2024 kepada sejumlah perusahaan, Walikota dan Bupati. Acara pemberian penghargaan tersebut berlangsung di

			Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Sumut, Rabu (4/12/2024). Bupati Asahan yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Pj Gubsu